

# **Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri**

dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan



# **Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri**

dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

**Tim Peneliti:**

Risfan Munir

Eko Putranto

Yusuf Faisal Martak



**Penerbit IPB Press**  
Jalan Taman Kencana No. 3,  
Kota Bogor - Indonesia

C.01/06.2020

**Judul Buku:**

Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri  
dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

**Tim Peneliti:**

Risfan Munir  
Eko Putranto  
Yusuf Faisal Martak

**Penyunting:**

-----

**Korektor:**

-----

**Desain Sampul & Penata Isi:**

Alfyandi

**Jumlah Halaman:**

96 + 10 halaman romawi

**Edisi/Cetakan:**

Cetakan 1, Mei 2020

**PT Penerbit IPB Press**

Anggota IKAPI

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: penerbit.ipbpress@gmail.com

www.ipbpress.com

ISBN: 978-623-256-000-0

Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia

Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2020, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa izin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu. Salam sejahtera untuk kita semua*

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) pengembangan kawasan secara terintegrasi diarahkan mendorong setiap kawasan untuk saling mendukung dan bekerjasama memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Kebijakan pengembangan kawasan dalam konteks pemerataan kesejahteraan perlu dikaji untuk meningkatkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Lokasi Prioritas (Lokpri) kecamatan di kawasan Perbatasan adalah lokasi strategis untuk menjadi muara berbagai program dan kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Dalam rangka pengembangan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis kesejahteraan masyarakat, perlu dibangun koordinasi perumusan kebijakan di tingkat kementerian/lembaga untuk kemudian diterjemahkan turunannya dengan penyiapan instrumen pelaksanaan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Di semua tingkatan perlu dibangun dua pilar rancangan, yaitu rancangan model bisnis, dan kelembagaan pengelola kawasan. Rancangan model bisnis didorong melalui pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan dikaitkan dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat di kota sekitar, sehingga menjadi suatu usaha baru yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Sedangkan unsur kelembagaan perlu melibatkan multipihak (Penta Helix) yaitu Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha (lembaga usaha desa BUMDes, swasta atau BUMD), perguruan tinggi hingga peran media untuk melakukan pengelolaan kawasan dengan berbagai kegiatan yang inklusif dan melibatkan peran masyarakat. Melalui pembentukan model pemberdayaan dari dua unsur tersebut diharapkan dapat memberi rujukan bagi daerah-daerah lain dalam mengembangkan kawasan-kawasan yang inklusif.

Laporan Kajian dengan judul “Peningkatan Koordinasi Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan” ini merupakan program kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lembaga Kajian Article 33 Indonesia, dan dua pemerintah kabupaten perbatasan. Pada kajian ini dipilih dua kabupaten perbatasan yaitu Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai lokasi kajian penguatan koordinasi Lokpri Perbatasan. Harapan saya, hasil kajian ini dapat mengisi kebutuhan informasi tentang pengembangan kawasan perbatasan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Indonesia, selain kita juga memerlukan sosialisasi, transformasi dan strategi kebijakan



**Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri**  
dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

pengembangan kawasan secara meluas di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kajian ini dan semoga dapat menjadi salah satu rujukan bagi penentu kebijakan di tingkat pusat, daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu*

Jakarta, Juni 2020

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Drs. RM. Wijanarko Setyawan, M.Sc

# KATA PENGANTAR

Komitmen Pemerintahan Jokowi untuk “membangun dari pinggiran” salah satunya diwujudkan dalam pembangunan wilayah perbatasan. Di sebagian wilayah yang berbatasan dengan negara lain dilakukan renovasi pos lintas batas yang dapat menjadi penanda kebanggaan (dignity) dalam berhadapan dengan negara lain. Namun tentu saja, permasalahan pengembangan wilayah perbatasan lebih luas dari itu. Masyarakat di wilayah perbatasan membutuhkan peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, memastikan peran pemerintah yang optimal di berbagai tingkatan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sangat penting. Koordinasi program dan anggaran untuk memberikan prioritas pembangunan di wilayah perbatasan akan menjadi langkah strategis bagi perwujudan keadilan dan pengurangan ketimpangan.

Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data dan informasi terkait pembangunan di wilayah perbatasan, terutama menyangkut peran kecamatan dalam mengoptimalkan fungsi sebagai media koordinasi atas program program pembangunan di wilayah perbatasan. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang penting dalam mengoptimalkan peran kecamatan, menfokuskan prioritas pembangunan, dan mendorong kemajuan wilayah perbatasan. Studi ini juga mendorong lahirnya peraturan yang lebih operasional, misalnya dalam bentuk pedoman umum, agar dapat menjadi acuan teknis tentang pembanguann di wilayah perbatasan.

Kajian yang dilakukan ini merupakan rangkaian dari kerjasama jangka panjang antara Article 33 Indonesia dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Ucapan terima kasih ditujukan pada Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Startegis dan Khusus, Bapak RM Wijanarko Setyawan atas dukungan dan kerjasamanya. Terima kasih juga ditujukan untuk tim peneliti Article 33 Indonesia dan tim dari Kemenko PMK sehingga kajian ini dapat diselesaikan.

Salam hormat,

Santoso  
Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia





# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus..... v

## KATA PENGANTAR

Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia ..... vii

## BAB I

PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ..... 3

1.3 Signifikansi ..... 3

1.4 Metode ..... 3

1.5 Sistematika ..... 6

## BAB II

KONSEPSI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN LOKPRI PERBATASAN NEGARA ..... 7

2.1 Konsep Pengembangan Wilayah ..... 7

2.2 Konsep Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan..... 11

## BAB III

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN ..... 15

3.1 Dasar Acuan Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan dan Pengembangan  
Kawasan Perbatasan ..... 15

3.2 Pengembangan Kelembagaan ..... 24

## BAB IV

TEMUAN LAPANGAN..... 29

4.1 Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara..... 30

4.2 Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur ..... 42

4.3 Analisis Tambahan: Kondisi Umum Lokasi Prioritas di Indonesia ..... 55

4.4 Aspek Gender..... 70

## BAB V

PEMBAHASAN ..... 73

5.1 Lokasi Kajian-1: Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) ..... 74

5.2 Lokpri Insana Utara (Wini), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ..... 79

5.3 Analisis GESI..... 86

## BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN ..... 89

6.1 Kesimpulan ..... 89

6.2 Rekomendasi Kebijakan ..... 91

DAFTAR PUSTAKA..... 95



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendekatan pembangunan Kawasan Perbatasan, selain melalui pendekatan keamanan (*security*), saat ini diimbangi dengan pendekatan pembangunan kesejahteraan (*prosperity*). Selain itu, Pemerintah juga mengubah pendekatan pembangunan yang bersifat *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga Kawasan Perbatasan diperlakukan sebagai “gerbang” aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan menetapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua Pengarah II Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan posisi itu, Kementerian Koordinator Bidang PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan perbatasan, khususnya yang terkait dengan masalah pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam kerangka *Strategic Development Region* (Wilayah Pengembangan Strategis), suatu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis, antara lain berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi, sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sinergisme di antaranya.

1. Beberapa permasalahan manajemen dan koordinasi pembangunan dan pengelolaan yang saat ini dihadapi memberikan ruang gerak penguatan pengelolaan perbatasan, setidaknya pada empat permasalahan strategis, yaitu (BNPP, 2011):
  - a. Belum adanya keterpaduan program dan kejelasan prosedur penetapan kebijakan program, untuk program-program terkait dengan perbatasan yang secara sektoral menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
  - b. Belum adanya keterpaduan di antara proses penentuan prioritas kebutuhan anggaran di semua sektor dan keterbatasan keuangan negara yang akan digunakan untuk memenuhi anggaran program sebagaimana telah direncanakan.
  - c. Belum adanya koordinasi pelaksanaan program-program pengelolaan perbatasan, sehingga terjadi “kekosongan” atau “tabrakan” aktivitas di perbatasan, bahkan banyak program yang dinilai kurang fungsional karena tak saling terkait. Sering terjadi pembangunan gedung atau pasar tanpa listrik dan sarana transportasi, misalnya, sehingga tidak berfungsi dengan baik atau bahkan dibiarkan kosong.
  - d. Belum adanya pola evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program untuk perbatasan negara sehingga kemajuan dan permasalahan yang dihadapi tidak terpetakan secara komprehensif. Hal ini menyulitkan pengambilan keputusan dan tindakan korektif serta penanganan permasalahan secara efektif.

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

*Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2025* (BNPP, 2011) menegaskan bahwa *basis Wilayah* diterapkan untuk Koordinasi Manajemen Penanganan Perbatasan, yang difokuskan pada Problem dan Wilayah (*area and problem focus*).

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah (*problem and area focus*), yang intinya adalah secara terpadu mengembangkan potensi kawasan dan memecahkan problem strategis perbatasan di wilayah konsentrasi pengembangan tertentu. Penerapan manajemen berbasis wilayah (*problem and area focus*) di kawasan perbatasan akan mempermudah kerja pengelola kawasan perbatasan, dengan penetapan awal lokasi prioritas, tempat berbagai input pembangunan dari sektor terkait (K/L) dan daerah, termasuk sektor swasta, akan *digiring masuk secara terpadu sesuai kebutuhan kawasan*. Input sektoral yang dimaksudkan di sini mencakup program dan perangkat pendukungnya, antara lain kegiatan, anggaran, tenaga, peralatan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah sasaran utama, yang diharapkan *menerima input pembangunan sesuai kebutuhan*. Mengingat sifat dan karakteristik kebutuhan, beberapa kegiatan program hanya akan digiring masuk sampai ke Wilayah-Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP), sebagai sasaran antara, namun diperhitungkan mempunyai efek sistemik dan secara signifikan mendukung aktivitas lain yang dibutuhkan di lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan.

2. Lokakarya Nasional (BAPPENAS, 2016) tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara memberi arahan mengenai karakteristik perencanaan pembangunan perbatasan negara sebagai berikut:
  - a. Kebijakan pembangunan perbatasan difokuskan ke Lokpri sebagai wilayah pinggiran negara;
  - b. Pemda memahami pembangunan Lokpri perbatasan menjadi kewajiban/kewenangan Pemerintah Pusat (di samping Pemda);
  - c. Pemda dan Settap BNPP mengetahui karakter kebutuhan dan arah pengembangan Lokpri, sementara K/L memerlukan input informasi yang konkret;
  - d. K/L mensyaratkan usulan dilakukan oleh daerah melalui *e-planning*.
  - e. K/L memberikan anggaran ke Lokpri (kecamatan terluar perbatasan) sebagai dana afirmasi. Selain itu, K/L juga memberikan program/kegiatan dan regulasi khusus (asimetris) yang diperlukan sebagai program antisipasi;
  - f. BNPP memberikan dorongan agar Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) intensif memberikan input ke SKPD, Bappeda, dan Bupati/Walikota mengenai kebutuhan Lokpri Perbatasan.

Dengan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini ialah: belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan kebijakan dan program di antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (L/K), khususnya untuk program-program perbatasan yang secara sektoral menjadi tanggung jawab K/L, pemerintah daerah, dan non-pemerintah.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan efektivitas koordinasi program pembangunan dan pengelolaan di kawasan perbatasan yang disesuaikan dengan pola pengembangan kawasan. Dengan demikian, rencana pengembangan kawasan perbatasan diharapkan akan dapat membantu memajukan kawasan di sekitar lokasi-lokasi prioritas.

### Tujuan

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Mendapatkan gambaran tentang potensi dan persoalan Kawasan Lokpri Perbatasan;
2. Melakukan analisis persoalan dalam peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembangunan Kawasan Lokpri Perbatasan, terutama menyangkut efektivitas koordinasi dan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan dari berbagai sektor atau K/L, Pemerintah Daerah, dan pelaku terkait lainnya di kawasan Lokpri Perbatasan.

## 1.3 Signifikansi

Gambaran potensi dan persoalan pengelolaan di kawasan Lokpri Perbatasan ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, sehingga dapat “menggiring” program dan kegiatan dari semua pemangku kepentingan ke Lokpri (dan Wilayah Konsentrasi Pengembangan/WKP-nya), sesuai dengan harapan dalam *Desain Besar Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara*; di samping itu dapat memberikan saran peningkatan kinerja koordinasi, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian di tingkat LokPri/Kecamatan sesuai prinsip HITS (*holistic, integrated, thematic, spatial*, atau menyeluruh, terintegrasi, tematik, dan spasial).

## 1.4 Metode

1. Teknik pengumpulan data kajian literatur (*desk-top study*), terutama untuk mengkaji peraturan dan perundang-undangan, kebijakan pengembangan Kawasan Perbatasan, serta Konsep Pengembangan Wilayah.
  - a. *Pertama*, konsepsi Pengembangan Wilayah yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan Lokpri Kawasan Perbatasan.
  - b. *Kedua*, peraturan/perundang-undangan menyangkut arah kebijakan pengelolaan Kawasan Perbatasan dan kelembagaan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), termasuk:
    - 1) Peraturan/perundang-undangan yang dikembangkan berdasar inisiatif BNPP termasuk Desain Besar Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan, dan Renaksi (Rencana Aksi) Kawasan Perbatasan
    - 2) Peraturan/perundang-undangan, kebijaksanaan K/L lain yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perbatasan.

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

2. Secara teknis, untuk mendapatkan data dilakukan observasi lapangan ke dua lokasi prioritas, yaitu:
  - a. Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, khususnya Lokpri Kecamatan Tanjung Beringin, yang mempunyai pulau perbatasan (Pulau Berhala);
  - b. Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Lokpri Kecamatan Insana Utara, yang mempunyai PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dengan Timor-Leste.
3. Pengumpulan data dilakukan dengan:
  - a. Melakukan diskusi (*focused group discussion/FGD*) pada tingkat kabupaten, di Kabupaten Sergai, bersama Kepala Bappeda, Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait, untuk membahas masalah umum dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, seperti pengembangan wilayah; pengembangan ekonomi lokal, manusia, dan kebudayaan; masalah koordinasi perencanaan; pengelolaan pembangunan di daerah perbatasan (kabupaten); serta aspirasi dan kiat/inovasi daerah dalam pengembangan kawasan lokpri perbatasan negara.
  - b. Melakukan diskusi (FGD) sejenis di Kabupaten Sergai, bersama Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda, Pejabat BPPD, OPD teknis terkait. Khusus untuk daerah perbatasan di NTT, diskusi dilengkapi dengan kunjungan ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Tingkat Provinsi NTT di Kupang.
  - c. Melakukan kunjungan lapangan, untuk: *pertama*, melakukan diskusi (FGD) dengan pemerintah kecamatan, wakil pemerintah desa (pemdes), dan wakil lembaga pelayanan (ekonomi/BUMDES, sosial dasar), tokoh masyarakat (sosial-budaya, ekonomi, pemberdayaan). Diskusi ini terutama difokuskan pada pembahasan aspirasi terkait peningkatan efektivitas koordinasi pembangunan dan pengelolaan kawasan lokpri perbatasan. *Kedua*, observasi lapangan untuk berbicara secara langsung dengan pelaku ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk Kabupaten Sergai, Sumatra Utara, kunjungan difokuskan ke Kecamatan Tanjung Beringin, khususnya ke Desa Bagan Kuala yang mempunyai Pulau Berhala (strategis sebagai pulau terdepan perbatasan), sedang untuk Kabupaten TTU, Provinsi NTT, kunjungan lapangan difokuskan pada Kecamatan Insana Utara, yang memiliki pos lintas batas antar-negara (PLBN).
  - d. Serial pembahasan dalam rapat koordinasi antara Kementerian/Lembaga (K/L anggota BNPP) dan beberapa pemerintah daerah (yang mempunyai kawasan lokpri perbatasan) di Kemenko PMK untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan dalam pengembangan lokpri perbatasan, kebijakan, dan program yang ada; permasalahan yang dihadapi (terutama terkait koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan); serta untuk menjaring aspirasi semua pihak. Diskusi publik dihadiri K/L (anggota BNPP), dan komunitas pemerhati pengembangan perbatasan, terutama untuk menyampaikan hasil sementara kajian dan temuan lapangan, untuk mendapatkan umpan balik dalam mempertajam hasil kajian dan rekomendasi kebijakan.

4. Kerangka GESI:

Analisis dengan kerangka *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) atau Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial digunakan terhadap peran pemerintah kecamatan dalam mendorong kesetaraan gender di wilayah perbatasan. Ranah intervensi pemerintah kecamatan yang akan dianalisis dengan menggunakan kerangka GESI terdiri atas: (1) intervensi di ranah rumah tangga; (2) intervensi di ranah komunitas desa; (3) intervensi di ranah pembuatan kebijakan dan tata kelola wilayah perbatasan.

Kerangka GESI – diperluas dari program Water, Sanitation and Hygiene (WASH)  
(Carrard et al., 2013)

	<b>Household sphere</b> <i>Household and family networks</i>	<b>Public arena</b>	
		<b>Local public arena</b> <i>Social and community networks</i>	<b>Broader public arena</b> <i>Governance institutions and beyond</i>
<b>Changes in self/ individuals</b> <i>Includes changes for women or men</i> <i>Includes changes relating to roles as well as self-perception and attitudes</i>	Changes in roles, self-perceptions and attitudes within the household sphere, related to family networks and household roles and responsibilities	Changes in roles, self-perceptions and attitudes within the local public arena including social networks, community and local institutions	Changes in roles, self-perceptions and attitudes within the broader public arena including national and sub-national government institutions, medium to large scale private sector actors
<b>Changes in relationships</b> <i>Includes changes in relationships between women/ men and within gender groups</i>	Changes in relationships within the household sphere, related to family networks and household roles and responsibilities	Changes in relationships within the local public arena including social networks, community and local institutions	Changes in relationships within the broader public arena including national and sub-national government institutions, medium to large scale private sector actors

Konsekuensi metodologis dari analisis yang berfokus pada peran pemerintah kecamatan ini adalah penggalan informasi tentang peran kecamatan dalam mengintervensi program terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan diintegrasikan dalam kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan FGD.

Dengan menggunakan kerangka di atas, studi ini diharapkan dapat menemukan ranah tempat terjadinya kesenjangan dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik kesenjangan kebijakan maupun kesenjangan intervensi. Dengan demikian, studi ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap perbaikan peran kecamatan dalam mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam program-program intervensinya.

## 1.5 Sistematika

Laporan ini terdiri atas lima bab, yaitu:

1. **Bab I - Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, maksud, tujuan, dan metode kajian.
2. **Bab II - Kebijakan Pengembangan Wilayah**, membahas tentang: kajian konsepsi pengembangan wilayah yang sesuai dengan kondisi umum wilayah perbatasan; prinsip-prinsip dalam pengembangan kelembagaan (organisasi, aturan main).
3. **Bab III - Kajian Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Kawasan**, menjelaskan arah pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan negara, yaitu peraturan/perundang-undangan yang dikembangkan berdasar inisiatif BNPP termasuk Desain Besar Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Kawasan Perbatasan, dan Rencana Aksi (Renaksi) Kawasan Perbatasan. Bab ini juga menelaah peraturan/perundang-undangan serta kebijakan lain yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perbatasan, terutama menyangkut pengembangan kawasan perdesaan, kelembagaan kecamatan, dan badan pengelolaan perbatasan daerah (BPPD).
4. **Bab IV – Temuan Lapangan: Kondisi, Potensi, dan Tantangan Perkembangan Kawasan Perbatasan pada Tingkat Daerah**, menguraikan kondisi, perkembangan, serta tantangan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan, mulai dari tingkat (kecamatan) prioritas atau Lokpri, kawasan sekitar Lokpri, sampai kabupaten.
5. **Bab V–Pembahasan**, merupakan rangkaian pembahasan sintesis dari konsep pengembangan, kebijakan, temuan lapangan, dan saran-saran atau pelajaran untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan kualitas koordinasi pembangunan Kawasan Perbatasan pada tingkat daerah.
6. **Bab VI - Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan**, mengerucutkan kesimpulan analisis sebelumnya kemudian menjabarkan butir-butir rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi pembangunan Kawasan Perbatasan.



# BAB II

## KONSEPSI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN LOKPRI PERBATASAN NEGARA

### 2.1 Konsep Pengembangan Wilayah

#### 2.1.1 Kerangka Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan upaya mengawinkan secara harmonis sumber daya alam (SDA), manusia, dan teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan. Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah (Mahi, 2016, hlm. 1).

Dengan demikian, pengembangan wilayah merupakan upaya memberdayakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di suatu wilayah dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan teknologi, untuk memberi nilai tambah atas apa yang dimiliki oleh wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, pengembangan wilayah bertujuan menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kajian pengembangan wilayah mencakup dua aspek: spasial dan sektoral. Aspek spasial (keruangan) menunjukkan lokasi tempat kegiatan sebaiknya dilakukan, dan bagaimana penyebarannya. Sementara itu, kajian sektoral berfokus pada jenis dan besaran aktivitas (ekonomi) masyarakat dalam suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alamnya.

Pendekatan yang mengacu kepada aspek spasial dan sektoral tersebut melahirkan konsep pengembangan wilayah yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai daya dukungnya, memberikan kesempatan kepada berbagai sektor untuk berkembang tanpa konflik, dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Konsep tersebut merupakan konsep pengembangan wilayah yang didasarkan pada penataan ruang. Dalam hal ini, terdapat tiga kelompok konsep pengembangan wilayah, yaitu pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional, dan desentralisasi.

Konsep pusat pertumbuhan (*growth poles*) menekankan pada perlunya investasi besar pada pusat-pusat pertumbuhan yang telah mempunyai infrastruktur yang relatif baik. Wilayah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan mendapat limpahan (*spread-effect*) dari pusat tersebut. Konsep integrasi fungsional (*spatial-integration*) mengutamakan adanya integrasi ruang yang diciptakan secara sengaja di antara beberapa “pusat pertumbuhan” karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan kota atau wilayah tertentu secara hierarkis sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah lainnya. Sementara itu, konsep desentralisasi (*local*) merupakan penyeimbang dua pendekatan sebelumnya, yang dianggap berisiko dalam

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

hal penyedotan (*backwash-effect*) atau aliran sumber daya manusia, hasil sumberdaya alam, dan dana keluar wilayah. Dalam hal ini, ada beberapa konsep/pendekatan, antara lain *people-centered approach*, yang menekankan pada pembangunan sumber daya manusia lokal; *natural resource-based development*, yang menekankan pada pengolahan sumber daya alam sebagai modal pembangunan; serta *technology-based local development*. Kemudian, ada pula yang mencakup ketiganya yaitu: konsep pengembangan agropolitan (*agropolitan development*) (Mahi, 2016, hlm. 4).

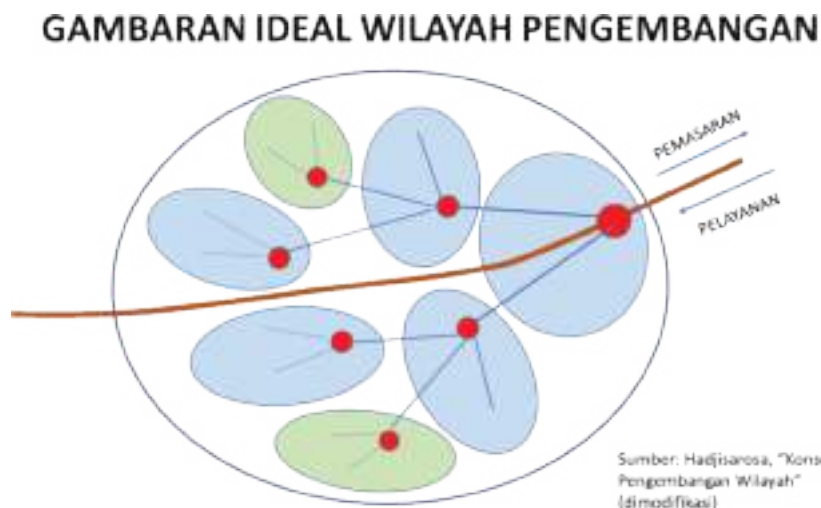
Pendekatan pusat-pusat pertumbuhan (*growth-poles*) diterapkan untuk menguatkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus dan strategis. Pada kawasan-kawasan seperti ini, tujuan utama pengembangan wilayah memang pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional.

Di Indonesia, kombinasi dari ketiga pendekatan pengembangan wilayah tersebut diterapkan sesuai dengan karakteristik, posisi, dan luas wilayah.

Dalam pengembangan wilayah nasional, diterapkan konsep integrasi fungsional, dengan seluruh wilayah nasional dikembangkan dalam satuan-satuan wilayah pengembangan, baik wilayah pulau maupun wilayah provinsi. Struktur ruang wilayah pun direncanakan dalam RTRW Pulau, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, di samping RTRW Kawasan tertentu. Sebagai pusat-pusat pelayanan dari setiap wilayah dan sub-wilayah, ditumbuhkan kota-kota sebagai pusat pelayanan dengan ukuran dan skala pelayanan yang bersifat hierarkis (Orde-I, Orde-II, Orde-III, dst). Sesuai skala pelayanannya, kota-kota ini secara formal didefinisikan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) (UU No. 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang).

Pendekatan pengembangan wilayah menekankan pada kemandirian kawasan/lokal. Pendekatan agropolitan memadukan pendekatan yang berpusat pada manusia (*people-centered*), dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan. Pendekatan berbasis pemberdayaan manusia ini menguatkan kawasan yang belum maju akibat berbagai keterbatasan yang masih jadi kendala, termasuk: kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur (sarana-prasarana), keterpencilan, dan kekurangan modal, baik modal finansial, modal sosial, maupun kelembagaan.

Gambar 2.1



## 2.1.2 Konsep Klaster Pengembangan Ekonomi Lokal

Istilah klaster (*cluster*) mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan objek tertentu yang memiliki kesamaan, atau atas dasar karakteristik tertentu. Dalam konteks ekonomi/bisnis, klaster industri (*industrial cluster*) merupakan terminologi yang mempunyai pengertian khusus. Walaupun begitu, dalam literatur, istilah klaster industri diartikan dan digunakan secara beragam. Secara umum, Michael Porter mendefinisikan klaster industri sebagai konsentrasi geografis dari beberapa perusahaan yang saling berhubungan dan lembaga pada bidang tertentu (Porter, 1998). Hal ini menjelaskan bahwa sebuah klaster industri tidak hanya terdiri atas perusahaan, namun juga didukung oleh institusi lainnya. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa klaster industri merupakan sekumpulan perusahaan dan lembaga-lembaga terkait di bidang tertentu yang berdekatan secara geografis dan saling terkait karena “kebersamaan (*commonalities*) dan komplementaritas” (Porter, 2000).

### Model Daya Saing Berlian Porter

Berbagai model untuk mempelajari klaster industri telah dikembangkan oleh berbagai peneliti dan pakar selama beberapa dekade terakhir. Salah satu model yang sering dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam pengembangan klaster industri adalah Model Berlian Porter (*Porter's Diamond Model*). Konsep “*the four diamond*” Porter ini mengajukan empat faktor yang saling terkait yang merupakan penentu keunggulan daya saing suatu industri, yaitu:

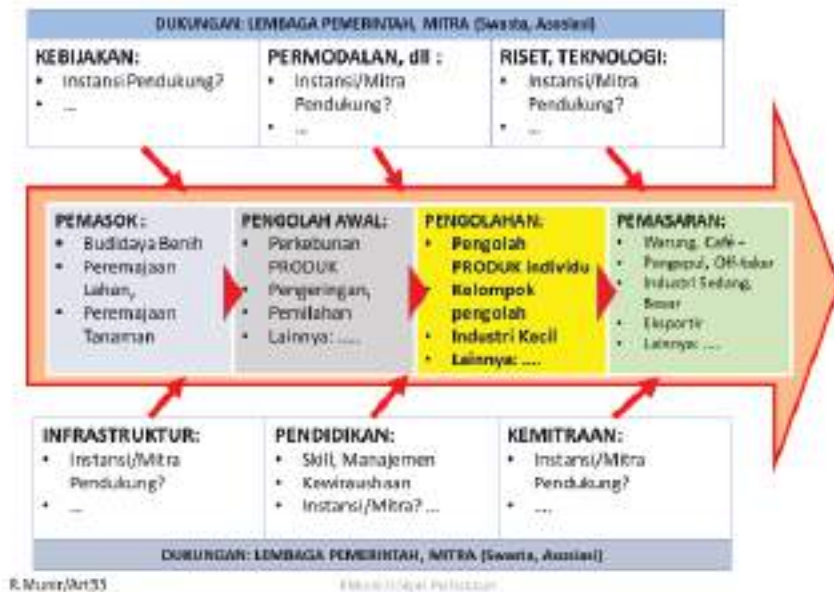
1. Strategi perusahaan, struktur, dan persaingan
1. Kondisi permintaan
2. Kondisi faktor
3. Industri terkait dan pendukung.

Porter selanjutnya juga menambahkan faktor *chance* dan *government* dalam model berlian tersebut. Kedua faktor tambahan ini bukanlah determinan, tetapi berpengaruh terhadap keempat faktor di atas.

Keenam faktor tersebut secara bersamaan membentuk sebuah sistem yang membedakan suatu lokasi dengan lokasi yang lain, dan hal ini menjelaskan mengapa beberapa perusahaan (industri) hanya berhasil di suatu lokasi tertentu. Tidak semua faktor harus optimal dalam menjamin keberhasilan sebuah perusahaan atau industri (Porter, 2000).

Gambar 2.2

**PENGEMBANGAN KLASTER (HULU-HILIR) PRODUK UNGGULAN KAWASAN**



(Sumber: M. Porter, 1998, dimodifikasi)

Secara lebih terperinci, masing-masing faktor dari model berlian Porter dapat dijelaskan sebagai berikut (Porter, 2000):

4. Potensi dan kondisi permintaan (*demand conditions*) atau pasar, mulai dari permintaan lokal untuk produk barang dan/atau jasa yang diproduksi. Pokok penting dari faktor ini adalah adanya permintaan domestik yang merupakan faktor pemicu pertumbuhan kegiatan ekonomi, sementara besaran dan pola pertumbuhannya dapat memperkuat keunggulan produk/jasa tersebut dengan mempengaruhi perilaku investasi, *timing*, dan motivasi. Hal penting berikutnya adalah upaya promosi dan pemasaran domestik dan luar negeri.
5. Kondisi faktor (*factor conditions*), atau kondisi yang menggambarkan posisi “faktor-faktor produksi” (*input* yang dibutuhkan kegiatan unggulan) suatu wilayah, seperti ketersediaan infrastruktur, ketenagakerjaan, modal, dan teknologi yang diperlukan untuk bersaing.
6. Mata rantai kegiatan produksi (hulu-hilir) yang terkait dan mendukung. Ketersediaan kegiatan-kegiatan produksi pendukung dan terkait di kawasan akan mendukung tumbuhnya kegiatan unggulan dan mata rantai nilai dan pasokannya. Adanya relasi hulu-hilir yang lengkap menjadi keunggulan klaster/kawasan yang bersangkutan.
7. Strategi usaha, struktur, aturan main, kerjasama, dan kemitraan merupakan kondisi yang menentukan bagaimana kegiatan unggulan kawasan tumbuh, terorganisasi dalam kawasan, dan berhubungan dengan potensi kawasan sekitar.

Kebijakan pemerintah nasional dan daerah tentu mempengaruhi dinamika model pertumbuhan klaster kegiatan unggulan, termasuk iklim investasi dan dunia usaha, serta aturan main yang dibuat yang mempengaruhi dinamika hubungan antarpelaku usaha (usaha besar, menengah, kecil, dan mikro).

### 2.1.3 Pendekatan Pemberdayaan Kawasan

Salah satu pendekatan pemberdayaan kawasan ini ialah konsep agropolitan, atau konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dari bawah. Pendekatan ini menyoal pertumbuhan ekonomi dan pengembangan semua aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, pertahanan-keamanan, pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). Pendekatan agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis perdesaan) dengan sektor industri, dengan menghadirkan “kota di ladang” (Mahi, 2016, hlm. 21).

Dalam konsep ini, pusat pelayanan diberikan pada tingkat desa sehingga sangat dekat dengan permukiman petani/nelayan, baik pelayanan dalam hal sarana produksi, teknik budi daya pertanian/perikanan, kredit modal kerja, maupun informasi pasar. Dengan demikian, besarnya biaya produksi dan biaya pemasaran dapat ditekan dengan meningkatkan faktor-faktor kemudahan pada kegiatan produksi dan pemasaran. Faktor-faktor tersebut menjadi optimal dengan adanya kegiatan pusat agropolitan. Peran pusat agropolitan adalah untuk melayani kawasan sekitarnya, tempat berlangsungnya kegiatan agrobisnis oleh para petani/nelayan setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (seperti pupuk, bibit, dan obat-obatan), sarana penunjang produksi (misalnya listrik, lembaga kredit, dan koperasi), serta sarana pemasaran (antara lain pasar, terminal angkutan, dan sarana transportasi).

Kawasan agropolitan terdiri atas kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya. Pengembangan kawasan agropolitan ialah pembangunan ekonomi berbasis pertanian, yang dirancang dan dilaksanakan dengan membentuk sinergi di antara berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, dan berkelanjutan, yang digerakkan oleh rakyat dan difasilitasi oleh pemerintah (Mahi, 2016, hlm. 23).

Sebagaimana disebut di atas, selain pendekatan spasial, ada juga pengembangan wilayah menggunakan pendekatan sektoral, atau gabungan keduanya. Di bawah ini diuraikan pendekatan pengembangan kegiatan sektoral (ekonomi) dalam pengembangan suatu kawasan dengan unggulan produk/kegiatan ekonomi tertentu.

## 2.2 Konsep Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan

Para ahli berpendapat bahwa kelembagaan dapat diartikan sebagai organisasi, selain juga norma/kaidah aturan yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing, yang dapat dicapai dengan bekerja sama (Yustika, 2019).

Kelembagaan yang dimaksud adalah tradisi dan pranata baru yang sesuai dengan tuntutan pemberdayaan dan modernisasi, serta organisasi kelompok yang mampu menghasilkan beragam produk yang dapat mengembangkan keunggulan komparatis (*comparative advantage*) atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) (Rintuh, 2005, hlm. 58).

Penguatan kelembagaan merupakan penggerak pembangunan dan upaya pemberdayaan (ekonomi) rakyat perdesaan. Upaya pemberdayaan (ekonomi) rakyat di perdesaan perlu dikaitkan dengan penguatan kelembagaan, seperti kelembagaan ekonomi, pemasaran, dan pendanaan,

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

sebagai wadah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk menggerakkan upaya penyediaan dana modal usaha, perbaikan struktur pasar, pembangunan sarana pendukung, penyediaan sarana penunjuang, dan penerapan teknologi tepat guna.

Kelembagaan masyarakat di perdesaan umumnya terbentuk melalui dua tahap:

- a. Ikatan sosial (*social relation*) yang masih kuat di antara anggota masyarakat. Hubungan ini menciptakan kesepakatan, aturan, dan kewajiban sosial (*social obligation*) masyarakat di perdesaan yang mengikat semua anggota/warga. Di beberapa daerah, peran lembaga adat seperti banjar dan ninik-mamak masih cukup dominan. Sejalan dengan berkembangnya kegiatan sosial dan tingkat hubungan masyarakat, hubungan dan kewajiban sosial seperti itu mengalami pergeseran secara bertahap;
- b. Hubungan ekonomi (*economic relation*), yang menjelaskan bahwa setiap pertukaran barang dan pelayanan jasa selalu memperhitungkan untung-rugi. Hubungan ekonomi antar-golongan masyarakat kemudian berkembang menjadi kewajiban ekonomi (*economic obligation*) dengan berbagai aturan yang lebih baku dan mengikat semua anggota masyarakat di perdesaan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat di perdesaan secara bertahap dituntut bersikap lebih rasional.

Kelembagaan pembangunan lokal yang berkembang dibedakan ke dalam tiga sektor (Rintuh, 2005, hlm. 58):

- a. Sektor publik, yang dapat dibedakan lagi atas: (1) administrasi lokal, yaitu birokrasi (pemerintahan), yang merupakan aparat pemerintah di daerah dengan staf yang diangkat oleh kementerian (nasional) dan bertanggung jawab kepada atasan (birokratik); dan (2) pemerintah lokal, yaitu lembaga politik lokal, berupa badan yang anggotanya dipilih atau diangkat dan mempunyai wewenang dalam pembangunan lokal, membuat peraturan, dan bertanggung jawab (secara prinsip) pada rakyat pemilih setempat;
- b. Sektor swasta, sebagian berupa perusahaan swasta pencari keuntungan (*profit*), dan swasta yang menjual pelayanan sosial dan cenderung tidak mementingkan keuntungan (*non-profit*),
- c. Sektor lembaga swadaya merupakan sektor ketiga, yaitu organisasi yang dibentuk untuk suatu kepentingan bersama. Dapat dibedakan atas: (i) lembaga yang dibentuk atau berafiliasi dengan lembaga induknya (nasional), dan (ii) lembaga yang dibentuk oleh masyarakat lokal (warga) untuk kebutuhan lokal, yang disebut sebagai *community-based organisation* (CBO), atau organisasi yang berbasis komunitas.

Dalam penilaian kinerja kelembagaan, terutama yang terkait dengan pelayanan publik, umumnya dikenal dua kelompok indikator, yaitu: efisiensi dan efektivitas (Yustika, 2006, hlm 303). Efisiensi menjelaskan seberapa baik pengorganisasian pemanfaatan sumber daya dalam memproduksi pelayanan, yaitu hubungan antara kombinasi aktual dan optimal dari input yang digunakan untuk memproduksi sejumlah keluaran *output* yang sudah ditetapkan. Sementara itu, efektivitas adalah derajat kesanggupan sebuah sistem untuk mencapai tujuan program dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam praktik, efektivitas berkaitan dengan sejumlah aspek preferensi yang berbeda dari keterkaitan pelayanan dengan tujuan/hasil program. Tujuan program tersebut antara lain: (1) aksesibilitas, keterjangkauan, keterjangkauan fisik, termasuk aspek-aspek kesanggupan dan representasi di antara kelompok-kelompok sasaran program; (2) kesesuaian (*appropriateness*), (3) kualitas, dan (4) pencapaian (*outcomes*).

Penilaian kinerja kelembagaan juga dapat menggunakan prinsip tata kelola yang baik atau *good governance*, yang memiliki pengertian sebagai seperangkat proses yang baik (*good*) yang diberlakukan dalam organisasi. Dengan prinsip *good governance*, keputusan dan peran tidak semata-mata dimiliki dan menjadi urusan pemerintah, melainkan juga secara bersama-sama dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta.

Prinsip-prinsip *good governance* mengimplementasikan kebijakan sosial dan politik untuk kebaikan rakyat secara keseluruhan dan inklusif, termasuk bagi kelompok marginal, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan prinsip-prinsip ini akan bisa didapatkan tolok ukur kinerja pemerintahan dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian baik dan buruk kinerja pemerintah ini bisa dinilai jika telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

UN Development Programme (UNDP) pada 1997 mengungkapkan setidaknya ada delapan prinsip *good governance*, yaitu (UNDP, 2011):

1. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan,
2. Ketanggapan atas kebutuhan *stakeholder* atau pemegang kepentingan,
3. Kemampuan untuk bermediasi jika ada perbedaan di antara para *stakeholder* untuk bisa mencapai konsensus bersama,
4. Akuntabilitas kepada *stakeholder* yang dilayani,
5. Proses pengambilan kebijakan yang transparan,
6. Aturan atau kerangka hukum dijadikan dasar dari segala aktivitas yang dilakukan,
7. Adanya visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan,
8. Adanya jaminan atas hak semua orang untuk bisa meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif.

Di samping itu, terdapat nilai universal yang melengkapi prinsip-prinsip di atas, yaitu “kesetaraan gender dan inklusi sosial (*gender equality and social inclusion*)” (IntegrityAction.org, 2016). Sebagaimana didefinisikan oleh PBB, kesetaraan gender (*gender equality*) terkait dengan kesetaraan hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki, gadis dan pemuda. Kesetaraan gender (*gender equality*) dan inklusi sosial (*social inclusion*) bukan hanya merupakan aspek yang fundamental dari hak asasi manusia dan keadilan sosial, tetapi juga prasyarat untuk memperbaiki proses pembangunan, menempatkan kepedulian sosial di garis depan dari setiap kegiatan pembangunan (IntegrityAction.org, 2016).

Pembahasan mengenai konsepsi pengembangan wilayah dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kelembagaan pada bab ini dapatlah diringkas dalam gambar 2.3. di bawah ini. Untuk kajian ini, akan digunakan dua pendekatan, yaitu: Konsep Pengembangan Wilayah (kolom kiri), dan pendekatan Pengembangan Kelembagaan (kolom kanan). Selanjutnya, kedua pendekatan atau konsep tersebut akan digunakan secara paralel untuk kajian dan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

**Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan**

Gambar 2.3





# BAB III

## **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN**

Setelah bab-bab sebelumnya menguraikan dasar-dasar konsep pengembangan wilayah dan pengembangan/penguatan kelembagaan (organisasi, aturan main), bab ini akan membahas kebijakan/model pengembangan kawasan perbatasan yang diterapkan di Indonesia selama ini, dan mendiskusikan aspek kelembagaan yang terkait dengan pengembangan kawasan lokpri perbatasan.

### **3.1 Dasar Acuan Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan**

Dalam pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi (KISS). Semua hal tersebut terkait dengan beberapa dokumen peraturan/perundang-undangan nasional, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025,
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil,
- d. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara,
- e. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,
- f. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar,
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan,
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- j. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan,
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan,
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah,
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah,
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Rangkaian peraturan/perundang-undangan tersebut di atas memiliki kaitan erat dengan upaya percepatan penyelesaian batas wilayah negara, serta mendorong pergeseran paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, dari yang selama ini cenderung berorientasi “*inward looking*”, menjadi “*outward looking*”, dan mempertimbangkan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Selain itu, pendekatan pengelolaan perbatasan negara pun mengalami pergeseran dengan mengedepankan kombinasi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang dilaksanakan secara harmonis dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*).

Serangkaian peraturan tersebut juga mendorong koordinasi dan kolaborasi di antara kementerian/ lembaga mulai dari tingkat nasional sampai tingkat lokal, dalam pengelolaan dan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang telah difokuskan untuk Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan Negara, sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.1 di bawah, dengan arahan untuk didukung oleh program/kegiatan dari berbagai kementerian teknis, dan koordinasi dari Setap BNPP dan Kementerian Koordinator sebagai pengarah (Bappenas, 2016).

Gambar 3.1

### LOKPRI sebagai Salah Satu Program Prioritas Pembangunan Perbatasan Negara



Sumber: Bappenas, 2016

### 3.1.1. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

#### Konsep Dasar Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Sebagaimana diuraikan dalam Desain Besar Pengelolaan Perbatasan (BNPP), pengelolaan perbatasan di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian integral dari manajemen negara, dengan operasionalisasi yang membutuhkan arah yang jelas, berdimensi jangka panjang, dan komprehensif dalam sebuah *grand design* bagaimana mencapai visi dan misi pengelolaan perbatasan, sebagaimana telah diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP). Pengelolaan perbatasan dimaknai sebagai kegiatan manajemen penanganan (bagaimana menangani) perbatasan.

Dalam *grand design*, “perbatasan” diartikan sebagai batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sehingga terminologi “pengelolaan perbatasan” perlu senantiasa dibaca dalam pengertian pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan. Pemahaman operasionalnya dikaitkan dengan spirit dan amanah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Undang-undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sehingga pengelolaan perbatasan dimaknai sebagai *upaya menggerakkan orang-orang dan potensi kawasan perbatasan melalui penetapan kebijakan perencanaan program, penyusunan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan atas penanganan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan* untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pengembangan kawasan perbatasan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional dapat dijelaskan pada Gambar 3.2 di bawah ini.

Gambar 3.2  
Landasan Kebijakan Pembangunan Perbatasan Negara



(Sumber: Bappenas, 2016)

## Tujuan Utama Pengelolaan dan Pendekatan Pengembangan:

Rencana Besar Pengelolaan atas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan secara prinsip diarahkan untuk mencapai tujuan utama pengelolaan perbatasan, yakni;

1. Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi,
2. Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat;
3. Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global.

Guna mencapai tujuan utama ini, rencana besar disusun dengan berpedoman pada asas-asas dalam pengaturan wilayah negara, yaitu asas kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, kerja sama, kemanfaatan, dan pengayoman.

Di samping itu, rencana besar berpedoman pada asas-asas umum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Di samping memperhatikan berbagai hal yang telah dideskripsikan tersebut, konsep dasar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tersebut selanjutnya dikembangkan dengan mengacu pada pokok-pokok pikiran berikut ini:

1. Pengelolaan Perbatasan dilakukan dengan Pendekatan Komprehensif Tiga Dimensi (Kesejahteraan, Keamanan, dan Lingkungan)

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan, yang dilaksanakan serasi dengan dua pendekatan lain yang berorientasi pada keamanan dan lingkungan.

Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan diarahkan dengan berbasis pada komoditas unggulan setiap wilayah perbatasan dan sekitarnya, yang berbeda sesuai karakteristik dan potensi unggulannya.

Pendekatan kesejahteraan merupakan konsekuensi logis dari paradigma baru pengembangan kawasan perbatasan, yang mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi "*inward looking*" menjadi "*outward looking*" sehingga kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Pendekatan kesejahteraan secara spasial direfleksikan melalui pengembangan kota-kota utama di kawasan perbatasan atau PKSNI yang akan difungsikan sebagai motor pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara. Konsep pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan mengacu pada komitmen untuk menjadikan perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional.

Pengembangan pusat-pusat kegiatan strategis di kawasan perbatasan membutuhkan dukungan multisektor dan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi dunia usaha, termasuk insentif yang benar-benar dapat menjadi daya tarik bagi dunia usaha. Berbagai upaya lain juga

dibutuhkan, terutama: percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar pendukung pengembangan potensi ekonomi kawasan dan perdagangan, serta pelayanan publik yang memadai di kawasan perbatasan.

Pendekatan Keamanan: di kawasan perbatasan darat, konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan yang dikembangkan ialah membentuk “sabuk komando” perbatasan negara. Sabuk komando perbatasan negara ini berupa area penyangga (*buffer area*) atau *security zone* sejauh  $\pm 4$  km dari garis perbatasan, sebagai wilayah pengawasan.

Sedangkan di kawasan perbatasan laut, upaya pengamanan dilakukan terhadap daerah-daerah rawan, secara selektif di sekitar pulau-pulau kecil terluar, alur laut kepulauan Indonesia, hingga batas-batas terluar perairan yurisdiksi.

Pendekatan lingkungan memandang dan memperhatikan aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan. Hal ini merupakan perspektif penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai titik masuk (*entry point*) pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional, terdapat 26 PKSN yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan negara, yang terletak di wilayah administrasi pemerintahan daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota di 11 provinsi.

Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan, dan PKSN di dalamnya, tidak dapat dilepaskan dari berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Suatu kawasan perbatasan membutuhkan model pengelolaan yang mampu membangun sinergi antarkewenangan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang direfleksikan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria tertentu terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pembangunan suatu kawasan secara terpadu membutuhkan *entry point* untuk memulai keterpaduan tersebut.

Sementara itu, lokasi prioritas di Wilayah Konsentrasi Pengembangan dibutuhkan sebagai fokus tempat pengelolaan perbatasan secara terpadu hendak diwujudkan. Dalam satu kesatuan sistem pembangunan kawasan, ada hubungan antarsubsystem dari skala mikro sampai makro.

Dalam konteks ini, penetapan lokasi prioritas, yang notabene adalah kecamatan, tidak berarti pembangunan hanya dilihat dari lingkup kecamatan. Sebagai unit analisis, ia bisa diperluas dalam sistem pembangunan kawasan yang bertumpu pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan simpul-simpul pengembangannya.

## Manajemen Penanganan Perbatasan difokuskan pada “Problem dan Wilayah”

1. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah (*problem and area focus*), yang intinya adalah mengembangkan potensi kawasan dan memecahkan problem strategis perbatasan di wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan tertentu secara terpadu.

Penerapan manajemen berbasis wilayah (*problem and area fokus*) di kawasan perbatasan akan mempermudah kerja pengelola kawasan perbatasan, dengan penetapan lokasi prioritas sejak awal, tempat berbagai input pembangunan dari sektor terkait (K/L), daerah, dan swasta akan digiring masuk ke lokasi-lokasi prioritas secara terpadu sesuai kebutuhan kawasan.

Masukan-masukan sektoral yang dimaksudkan di sini mencakup program dan perangkat pendukungnya, antara lain: kegiatan, anggaran, tenaga, dan peralatan.

Secara garis besar, pengelolaan perbatasan memiliki ruang lingkup penanganan yang mencakup dua sasaran strategis yaitu : a) Pengelolaan batas wilayah antarnegara; dan b) Pengelolaan kawasan perbatasan (BNPP, 2011).

a. Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Pengelolaan batas wilayah pada dasarnya memuat berbagai langkah strategis untuk menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah negara serta batas-batas terluar perairan yurisdiksi dengan negara tetangga, pengamanan batas wilayah di darat dan di laut, serta reformasi manajemen pengelolaan lintas batas.

Sementara itu, pengelolaan kawasan perbatasan pada dasarnya terkait dengan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan wilayah secara berimbang dan berkelanjutan.

b. Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Sasaran wilayah pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan pada Wilayah-Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP), yaitu kabupaten/kota yang berada di dalam Cakupan Kawasan Perbatasan (CKP), baik yang berada di kawasan darat maupun laut. Penentuan prioritas WKP ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu strategis di setiap WKP dalam aspek pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi.

Fokus lokasi penanganan yang diprioritaskan di setiap WKP disebut dengan Lokasi Prioritas (Lokpri), yakni kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam WKP yang memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut: (BNPP, 2011).

- 1) Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah darat.
- 2) Kecamatan Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- 3) Kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
- 4) Kecamatan yang menjadi *exit-entry point* (Pos Lintas Batas).

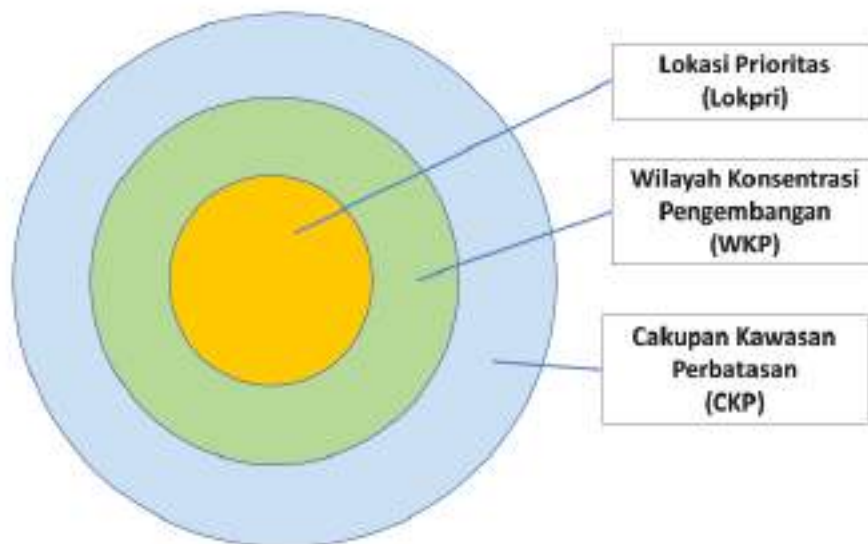
## 3.1.2 Pengembangan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan

Pengertian dan kriteria Lokasi Prioritas (Lokpri):

1. Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah sasaran utama. Input pembangunan digiring masuk ke lokasi ini sesuai kebutuhan. Mengingat sifat dan karakteristik kebutuhan, beberapa kegiatan program hanya akan digiring masuk hanya sampai ke Wilayah-Wilayah Konsentrasi.
2. Pengembangan WKP sebagai sasaran antara, namun diperhitungkan mempunyai efek secara sistemik dan signifikan mendukung aktivitas lain yang dibutuhkan di lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan.

3. Dalam konteks pengembangan wilayah perbatasan, Lokasi Prioritas (Lokpri), WKP, dan Cakupan Kawasan Perbatasan (CKP) merupakan sub-sub sistem yang saling terkait. Koordinasi berbasis wilayah melihat keterkaitan lokasi ini lebih pada hubungan langsung dan tak langsung dalam sebuah sistem pembangunan, yang sasaran utamanya adalah Lokasi Prioritas Pengembangan di WKP.

Gambar 3.3  
Sasaran Wilayah Pengelolaan Kawasan Perbatasan



(Sumber: BNPP, 2011)

### Kebijakan Pengembangan Lokpri dalam RPJMN 2015-2019

1. Strategi kebijakan peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan mengacu pada strategi RPJMN, yakni menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara (RPJMN 2015-2019, Strategi No. 12).
2. Strategi tersebut dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: "Kawasan perbatasan merupakan beranda depan negara yang memiliki peran strategis terhadap berbagai fungsi sebuah negara". Oleh karena itu, pengelolaan kawasan perbatasan tentunya perlu keseriusan dan manajemen yang berbeda dengan pengelolaan kawasan lainnya. Batas daerah administrasi sering kali menjadi kendala dalam pengelolaan kawasan perbatasan," (BNPP, 2015, hlm 242).
3. Strategi mengembangkan kebijakan penataan kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan merupakan solusi atas permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut.
4. "Dalam membangun kawasan perbatasan diperlukan sistem tata kelola yang berorientasikan pada kebutuhan Lokpri itu sendiri, bukan berdasarkan kebutuhan yang berada di pusat" (BNPP, 2015, hlm 242, 243).

**Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri**  
dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

Hubungan Kawasan Lokpri dengan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) dalam Pengembangan Wilayah Perbatasan

1. Kontribusi Lokpri dalam mendukung PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional) antara lain adalah sebagai pusat orde ke-2 setelah PKSN, yang berperan sebagai pusat kegiatan lokal bagi kawasan sekitarnya;
2. Lokpri diharapkan juga menjadi kawasan penunjang PKSN, sebagai kawasan produksi yang dapat memasok kebutuhan PKSN sebagai pusat pengembangan wilayah; dan
3. Lokpri yang mempunyai PLBN (Pos Lintas Batas Negara) diharapkan dapat menjadi beranda yang menunjukkan kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan lebih tangguh atas wilayah negara tetangga.

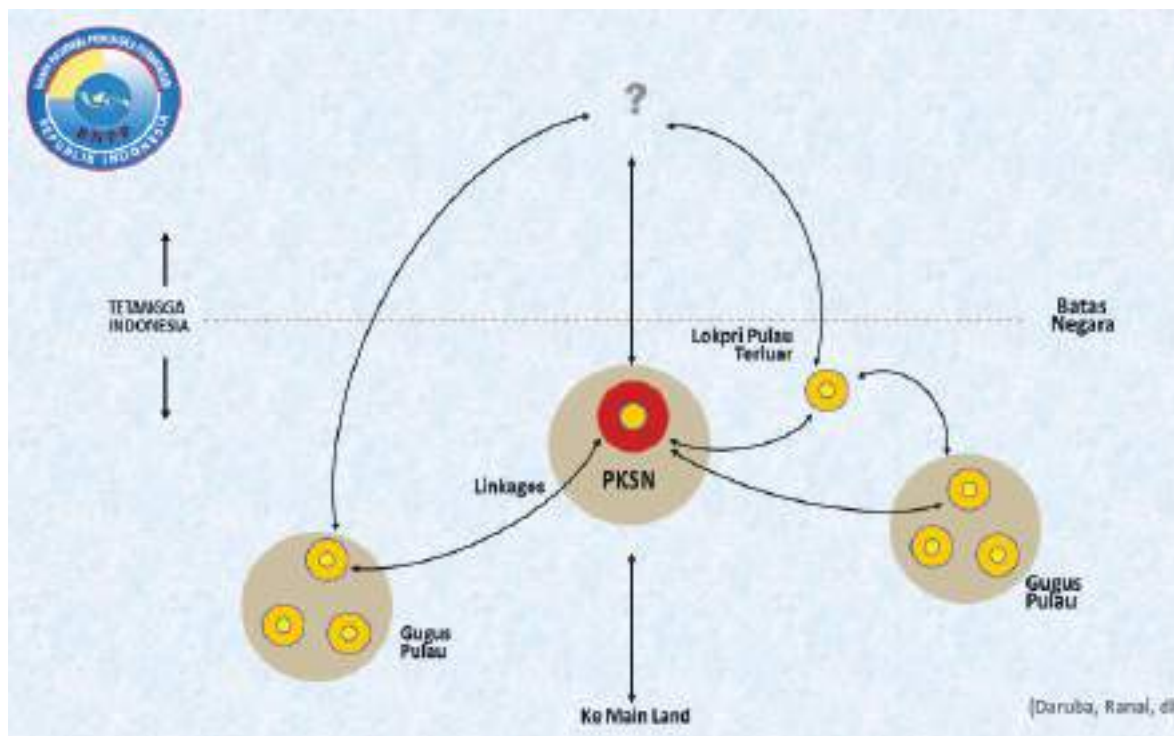
Berikut ini Gambar yang menunjukkan hubungan/peran Lokpri terhadap Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN).

Gambar 3.4.a  
Ilustrasi Hubungan Lokpri dengan PKSN Daratan





Gambar 3.4.b  
Ilustrasi Hubungan Lokpri dengan PKS (Kepulauan)



(Sumber: Simbolon. BNPP. 2014)

### 3.1.3 Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Lokpri

Dalam pengembangan kawasan perbatasan untuk menggali sumber daya pendukung, khususnya pemberdayaan kecamatan Lokpri, perlu juga dipertimbangkan potensi dukungan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Th 2014 tentang Desa, pembangunan Kawasan Perdesaan antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Pasal 83, ayat 1).
2. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Pasal 83 ayat 2).
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi (Pasal 83 ayat 3):
  - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

4. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa (Pasal 83 ayat 4).
5. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pasal 83 ayat 5).
6. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa (Pasal 84 ayat 1).
7. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa Pasal 84 ayat 2) .
8. Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 84 ayat 3).
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa (Pasal 85 ayat 1).
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat desa (Pasal 85 ayat 2).
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antardesa (Pasal 85 ayat 3).

Dari rangkaian Pasal (83, 84, dan 85) dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut jelas tergambar bahwa ada peluang dalam Pengembangan Kawasan Lokpri Perbatasan untuk menjalin kerjasama dengan desa-desa yang berada di dalam kawasan Lokpri Perbatasan. Dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk kawasan perdesaan tersebut, untuk memudahkan kerjasama OPD Kabupaten/Kota, OPD Provinsi, bahkan Kementerian/Lembaga tingkat nasional, dengan desa-desa di kawasan Lokpri Perbatasan. Kecamatan dapat berperan dalam menjembatani, memfasilitasi, dan melakukan koordinasi kegiatan kerjasama tersebut.

## 3.2 Pengembangan Kelembagaan

### 3.2.1 Peran Lembaga Kecamatan di Kawasan Perbatasan (sesuai UU No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan)

1. Sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di **kecamatan**.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan peran kecamatan terkait Pembangunan Kawasan Perbatasan a.l. sebagaimana di bawah ini:

- a. Secara umum, tugas camat mencakup: memimpin kecamatan dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum (PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 10.a).
- b. Kecamatan perbatasan negara mendapatkan peran khusus (Pasal 12), yaitu :
  - 1) Camat di kawasan perbatasan negara dengan wilayah di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada bupati/wali kota.
  - 2) Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari pemerintah pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam koordinasi perencanaan, peran kecamatan ialah (Pasal 17):
  - 1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
  - 2) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
  - 3) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam Koordinasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Pembangunan, peran kecamatan mencakup (Pasal 10):
  - 1) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
  - 2) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,
  - 3) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan,
  - 4) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
  - 5) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.2.2 Pembentukan, Kedudukan, dan Tipologi Badan Pengelola Perbatasan di Daerah

1. Salah satu lembaga yang penting dalam peningkatan koordinasi pembangunan pada kawasan Lokpri Perbatasan ialah BPPD, yaitu organ BNPP di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. BNPP berperan dalam melakukan koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan program, dan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program K/L di tingkat nasional, yang mencakup proses:
  - a. Penyampaian usulan kebutuhan oleh Lokpri via kabupaten/kota;
  - b. Penyampaian usulan melalui mekanisme Musrenbang berjenjang, dengan tembusan ke BNPP;

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

- c. BNPP mengawal usulan/rencana dari Lokpri tersebut dan memahasnya dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait.
3. BPPD berperan untuk mendorong koordinasi, mulai dari tingkat kabupaten/kota (BPPD kabupaten/kota) sampai di tingkat provinsi (BPPD provinsi).
4. BPPD dalam tugas pengelolaannya juga membantu BNPP dan pemerintah daerah dalam koordinasi pelaksanaan program/kegiatan K/L dan OPD Pemda di Lokpri Perbatasan dalam wilayahnya.
5. BPPD membantu BNPP dan pemerintah daerah dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan di Lokpri.
6. BPPD sempat mengalami “ketidakjelasan” keberadaannya saat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah baru diberlakukan, karena dalam UU tersebut fungsi pengelolaan perbatasan di daerah dilebur dalam struktur organisasi pemerintah daerah.
7. Dengan terbitnya Permendagri No. 140 Tahun 2018 tentang Pembentukan BPPD di Daerah, keberadaan BPPD menjadi jelas.
8. Beberapa arahan Permendagri No. 140 Tahun 2018 menyangkut BPPD antara lain menegaskan bahwa:
  - a. Di setiap daerah provinsi yang memiliki perbatasan antar-negara, dibentuk BPPD Provinsi. (2) Pembentukan BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. (Pasal 2 (1))
  - b. Setiap daerah kabupaten/kota yang memiliki perbatasan antarnegara membentuk BPPD kabupaten/kota. (2) Pembentukan BPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. (Pasal 3 (1))
  - c. Kedudukan BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah (Pasal 4).
  - d. BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah (Pasal 5).
9. Tipologi BPPD sesuai dengan jumlah Lokpri di daerah tersebut (Pasal 6 ayat 1 s.d. 4):
  - a. BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. BPPD Provinsi Tipe A; b. BPPD Provinsi Tipe B; dan c. BPPD Provinsi Tipe C.
  - b. BPPD Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki lebih dari 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
  - c. BPPD Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
  - d. BPPD Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

Tabel 3.1  
**TIPOLOGI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**

TIPE BPPD	JUMLAH KECAMATAN LOKPRI	KETERANGAN
PROVINSI:		Diatur dgn Perda Prov
A	5 kecamatan Lokpri	Pasal 6 (2)
B	2-5 kecamatan Lokpri	Pasal 6 (3)
C	Kurang dari 2 kecamatan Lokpri	Pasal 6 (4)
KABUPATEN:		Diatur dgn Perda Kab./Kota
A	Lebih dari 3 (tiga) kecamatan Lokpri	Pasal 7 (2)
B	2-3 Kecamatan Lokpri	Pasal 7 (3)
C	Kurang dari 2 kecamatan Lokpri	Pasal 7 (4)

Sumber: Diolah dari Permendagri No. 140 Tahun 2018

- e. BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: a) BPPD Kabupaten/Kota Tipe A; b) BPPD Kabupaten/Kota Tipe B; dan c) BPPD Kabupaten/Kota Tipe C. (Pasal 7 (1))
- f. BPPD Kabupaten/Kota **tipe A** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan. (Pasal 7 (2))
- g. BPPD Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah kabupaten/kota yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan. (Pasal 7 (3))
- h. BPPD Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah kabupaten/kota yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan. (Pasal 7 (4))
- i. BPPD Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang (Pasal 8):
  - 1) melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - 2) melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
  - 3) melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
  - 4) melakukan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- j. BPPD Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang (Pasal 9):
  - 1) melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - 2) Menjaga dan memelihara tanda batas;
  - 3) melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
  - 4) melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.



## BAB IV

# TEMUAN LAPANGAN

Bab-bab sebelumnya telah menguraikan tentang konsep pengembangan wilayah, prinsip penguatan kelembagaan, dan arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara yang berfokus pada pengembangan kawasan Lokpri (setingkat kecamatan) di garis perbatasan antarnegara. Dengan kerangka pendekatan tersebut, kajian lapangan bermaksud melihat kondisi kehidupan masyarakat kawasan perbatasan negara, dan menelaah potensi yang dimiliki dan keterbatasan yang dihadapi. Apa yang terjadi dalam pengelolaan dan pembangunan pada Lokpri kawasan? Kiat dan terobosan apa yang dilakukan oleh daerah dalam mendayagunakan potensi serta mengatasi kendala dan persoalan?

Informasi dari temuan lapangan dikompilasi dengan data sekunder capaian pembangunan Kawasan Perbatasan, dan selanjutnya dibagi ke dalam kelompok informasi yang menguatkan pernyataan pada permasalahan penelitian. Berkaitan dengan permasalahan belum fokusnya sasaran pengelolaan dan pembangunan di Kawasan Lokpri Perbatasan, penggalian informasi yang terkait dengan capaian pembangunan layanan sosial dasar (dimensi pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman); fasilitas ekonomi; serta aksesibilitas seperti transportasi, informasi dan komunikasi menjadi sumber informasi yang diharapkan dapat menjelaskan permasalahan dan menggambarkan usaha semua pihak yang terkait pada pembangunan di kawasan perbatasan.

Informasi lain yang digali pada temuan lapangan berkaitan dengan optimalisasi koordinasi dan keterpaduan kebijakan dan program di antara Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/L), khususnya untuk program-program perbatasan yang secara sektoral menjadi tanggung jawab K/L, pemerintah daerah, dan non-pemerintah. Penggalian informasi tentang kondisi optimalisasi ini lebih ditekankan pada aspek pengembangan wilayah dan kelembagaan yang mendukung pembangunan di Lokpri Kawasan Perbatasan. Informasi mengenai aspek pengembangan wilayah ditujukan untuk mengetahui sejauh mana koordinasi pembangunan yang dilakukan setiap K/L/D/I di Kawasan Perbatasan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bersifat saling mendukung di antara berbagai wilayah dan tingkatannya, seperti pembangunan yang dilaksanakan provinsi, kabupaten, dan kawasan sekitar, termasuk pembangunan di desa-desa Lokpri Perbatasan. Sementara itu, aspek kelembagaan ditelaah untuk mengetahui sejauh mana peran setiap lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam bab ini dibahas beberapa hal yang terkait dengan temuan lapangan, berupa hasil wawancara dan diskusi bersama beberapa narasumber terkait dan rapat koordinasi pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Untuk menyempurnakan hasil kajian lapangan, digunakan juga data tambahan yang bersumber dari potensi desa/kelurahan Lokpri Perbatasan sebagai informasi data dasar (*baseline*) untuk melihat capaian pembangunan pelayanan sosial dasar dan budaya, ekonomi, dan akses di Lokpri kawasan perbatasan.

## 4.1 Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara

Lokpri Perbatasan di Kabupaten Sergai terletak di Kecamatan Tanjung Beringin (lihat Gambar 4.1), yang mempunyai area pulau, yaitu Pulau Berhala. Seperti dinyatakan oleh Bupati Serdang Bedagai, Pulau Berhala mempunyai nilai strategis. Dengan adanya pulau yang terletak 22 mil dari pantai/daratan ini, batas kontinen 12 mil negara Indonesia dihitung dari Pulau Berhala. Seandainya tidak ada pulau ini, wilayah laut Indonesia akan berkurang banyak. Maka, pengelolaan Lokpri Tanjung Beringin dan Pulau Berhala memiliki peran strategis demi eksistensi wilayah nasional.

Gambar 4.1  
Peta Orientasi Lokasi Lokpri Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai  
Provinsi Sumatra Utara



Penggalan informasi tentang capaian pembangunan di Kawasan Perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan melalui beberapa metode pada kegiatan kunjungan lapangan seperti diskusi terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), pengamatan lapangan di Lokasi Lokpri Tanjung Beringin, Kantor Kecamatan Tanjung Beringin, Kantor Pemerintah Kabupaten, termasuk di beberapa desa di Lokpri Tanjung Beringin. Beberapa kegiatan penggalan informasi di Kabupaten Perbatasan Serdang Bedagai antara lain adalah:

1. FGD di Kantor Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra, bersama Bupati, Asisten II Sekretaris, Kepala Bappeda, Kepala Dinas KKP, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan staf lainnya, pada Rabu 4 September 2019;
2. FGD di Kantor Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara, bersama Kepala Bappeda, para kepala bidang dan staf bidang pembangunan, pada Rabu 4 September 2019;
3. FGD di Kantor Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, bersama camat, para kepala desa, dan jajaran staf kecamatan, pada Kamis 5 September 2019;
4. FGD di Kantor Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara, bersama Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, para kepala bidang, dan staf bidang pembangunan, pada Rabu 4 Maret 2020;
5. FGD di Kantor Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, bersama Sekretaris Kecamatan dan jajaran staf kecamatan, pada Kamis tanggal 5 Maret 2020.



## 4.1.1 Pengembangan Wilayah

### a. Rencana Pengembangan Kawasan Lokpri Perbatasan

Terkait pengembangan Lokpri Perbatasan Tanjung Beringin, berdasarkan hasil FGD dan observasi yang dilaksanakan pada 4 September 2019 dan 4 Maret 2020 diperoleh informasi bahwa:

1. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), kecamatan, dan desa-desa di kawasan Lokpri Perbatasan Kecamatan Tanjung Beringin serius mendukung upaya pengembangan Lokpri Tanjung Beringin;
2. Dalam upaya menghidupkan Kawasan Lokpri Perbatasan dari aspek kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan Lokpri Tanjung Beringin dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis.
3. Pemkab Sergai telah mempunyai rencana (tema dalam RPJMD) untuk mengembangkan kawasan strategis perbatasan bertema “Kawasan PATAYA” (Pangan, Pariwisata, dan Budaya);
4. Kawasan Pengembangan PATAYA ini mencakup kawasan Kecamatan Lokpri Tanjung Beringin dan sekitarnya.
5. Di dalam Kecamatan Tanjung Beringin tersebut, Desa Bagan Kuala hingga Pulau Berhala direncanakan menjadi sub-kawasan pariwisata *eco-marine*, atau kawasan wisata bahari yang berkelanjutan. Di Bagan Kuala dibangun pelabuhan/dermaga (Tangkahan), dan *resettlement* kampung nelayan. Pulau Berhala dikembangkan untuk wisata pantai dan pulau;
6. Desa Pekan Tanjung Beringin dikembangkan sebagai pusat wisata perkotaan, dengan rencana pengembangan klaster-klaster pariwisata kampung budaya (Kampung Melayu, Kampung Jawa, Kampung Banjar, Kampung Batak, dan lainnya) di beberapa desa sekitar;
7. Tak jauh dari Kecamatan Tanjung Beringin, di Perbaungan, juga dikembangkan sarana wisata arung jeram, yang telah digunakan sebagai arena lomba arung jeram tingkat ASEAN;
8. Terkait pertanian, telah dikembangkan klaster Wisata Tani Desa “Melati”, di Kecamatan Perbaungan;
9. Dalam pengembangan pariwisata bahari dan perikanan, direncanakan untuk menghidupkan kembali Sungai Sei Rampah dengan pelabuhan dan dermaga-dermaganya. Dengan demikian, nelayan lebih mudah memasarkan ikan hasil tangkapannya ke TPI (tempat pelelangan ikan), tanpa harus melalui pengepul/tengkulak. Selain itu, hal tersebut berfungsi pula sebagai sarana wisata berperahu dan bersampan dari sungai ke laut dan sebaliknya;
10. Konsep pembangunan kawasan kecamatan (Lokpri) Tanjung Beringin dan sekitarnya tetap difokuskan pada pengembangan pariwisata budaya (Melayu).
  - a. Di Kecamatan Tanjung Beringin, budaya Melayu hidup dengan aneka bentuk kesenian, baik tari maupun kuliner. Saat ini pengembangan seni tari sedang digalakkan kembali. Selain itu, dalam seminggu ada satu hari yang diwajibkan bagi karyawan untuk menggunakan busana adat Melayu.
  - b. Di Kecamatan Tanjung Beringin (Desa Pekan Tanjung Beringin) diadakan bazar kuliner masakan khas Melayu Sergai.
  - c. Wisata bersampan, sesuai tradisi.
  - d. Dengan kata lain, pengembangan kawasan Lokpri Kecamatan Tanjung Beringin telah dilakukan dan menjadi prioritas sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Sergai;

Gambar-4.2



b. Kendala Infrastruktur, Kewenangan, dan Upaya Mengatasi Masalah

1. Kendala utama, sebagaimana dialami kawasan Lokpri yang lain, ialah masalah kebutuhan pembangunan prasarana (infrastruktur) yang skala dan kewenangannya berada di atas kewenangan kabupaten.
2. Prasarana utama yang menjadi kebutuhan Lokpri Tanjung Beringin ini terutama: (1) pembangunan dermaga di Pulau Berhala dan dermaga/pelabuhan di Desa Bagan Kuala, untuk mendukung wisata bahari menuju Pulau Berhala; (2) pengerukan muara Sungai Sei Rampah agar perahu dapat masuk ke sungai (tempat pelelangan ikan); (3) bangunan, beronjong, dan penahan gelombang untuk mencegah erosi pantai;
3. Masalah kewenangan pengelolaan dan pembangunan dermaga/pelabuhan, jalan antardesa, *resettlement* permukiman nelayan, karena menyangkut kewenangan penguasaan lahan yang sebagian besar ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Meskipun demikian, Kabupaten Sergai tetap konsisten untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan yang ada di wilayah kabupatennya.
5. Dari Desa Bagan Kuala yang terletak tepat di pesisir, dapat dicatat beberapa "inovasi":
  - a. Inovasi yang digagas oleh Kepala Desa Bagan Kuala, yaitu pembuatan bangunan pemecah ombak dan penahan abrasi (erosi pesisir oleh gelombang pasang) dari bahan bambu, yang dikerjakan oleh warga dan terbukti tangguh menahan abrasi sehingga menyelamatkan pesisir/pantai. Ini adalah inovasi yang layak dicatat. Hanya saja, Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten berharap ada bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun konstruksi pemecah ombak (seperti di Pantai Ancol Jakarta).
  - b. Inovasi lain diprakarsai oleh warga, seorang ibu yang berinisiatif membuat taman obat tradisional, di pantai Desa Bagan Kuala. Tanaman obat keluarga (TOGA), begitulah ibu tersebut menamakan taman yang dikembangkannya.

6. Pesan yang dititipkan dan digarisbawahi oleh Bupati terkait kebutuhan bantuan untuk:
  - a. Bangunan pemecah ombak untuk pesisir Kabupaten Sergai yang mengalami derasnya abrasi (erosi pantai)
  - b. Pengerukan dasar muara yang mengalami pendangkalan, dan pembangunan dinding penahan sungai, agar Sungai Bedagai (Sei Rampah) dapat dilalui/dimasuki perahu-perahu nelayan dari laut hingga Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sepanjang 6 km.

## 4.1.2 Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal yang Inklusif

### a. Gambaran Umum

1. Pasar menjadi simpul bagi transaksi ekonomi desa-kelurahan Lokpri. Status Pasar dengan bangunan permanen hanya terdapat di Desa Pekan Tanjung Beringin. Pasar dengan bangunan semi permanen terdapat di Desa Pekan Tanjung Beringin dan Tebing Tinggi. Pasar tanpa bangunan ada di tiga desa, yaitu Desa Pekan Tanjung Beringin, Nagur, dan Mangga Dua. Ketiga jenis pasar tersebut saat ini menjadi salah satu penggerak perekonomian di Lokpri Tanjung Beringin. Sementara itu, desa-kelurahan yang belum memiliki pasar, yaitu Desa Pematang Terang, Pematang Cermai, Bagan Kuala, dan Sukajadi, masih memanfaatkan pasar di tiga desa yang telah memiliki pasar.
2. Fasilitas bank di Lokpri Tanjung Beringin hanya terdapat di satu desa, yaitu di Desa Pekan Tanjung Beringin, dengan kategori bank umum pemerintah. Sementara itu, agen bank sudah terdapat di empat desa Lokpri yaitu di Desa Pematang Terang, Pematang Cermai, Pekan Tanjung Beringin, dan Mangga Dua. Jarak tempuh warga desa Lokpri yang tak memiliki bank atau agen bank menuju ke bank terdekat adalah sekitar 1,9 km sampai dengan 15,40 km, dengan kondisi jalan yang mudah ditempuh.
3. Dukungan fasilitas kredit murah bagi masyarakat Lokpri Perbatasan untuk mendorong usaha ekonomi lokal tidak terlepas dari pantauan capaian pembangunan kesejahteraan di Lokpri. Salah satu fasilitas kredit yang saat ini telah banyak disalurkan sampai ke tingkat desa adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akses kredit KUR di desa-kelurahan Lokpri Perbatasan telah mencakup kedelapan desa-kelurahan Lokpri Tanjung Beringin.

### b. Ekonomi lokal yang inklusif:

1. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lokpri Tanjung Beringin ialah petani, peternak, dan nelayan. Secara umum, petani dan nelayan memiliki modal kecil, masih tradisional, serta mengandalkan kondisi alam dan musim. Pemasaran produknya masih bersifat lokal atau dijual melalui pengepul dan tengkulak, yang juga memberi pinjaman sarana produksi sehingga nasib mereka bergantung pada pengepul/tengkulak;
2. Sebagai pendukung pariwisata, dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk pembuatan kerajinan “purun” (bahan untuk tikar), dengan produk antara lain berupa tikar dan sandal kamar hotel;
3. Beberapa kecamatan (Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu) juga mendorong terbentuknya BUMDesMa, yaitu “BUMDes Bersama” atau kerjasama antara beberapa BUMDes, walau hal ini belum fungsional di dua kecamatan tersebut. BUMDesMa yang berhasil berada di Kecamatan Sei Rampah, yang menjadi percontohan pada tingkat kabupaten.

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

4. Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan (Lokpri) telah dilakukan pengembangan kelembagaan (ekonomi) pembangunan.
  - a. Pada desa, kecamatan, perbatasan, dan sekitarnya terdapat lembaga ekonomi masyarakat seperti unit pengelola kegiatan (UPK) dan badan kerja sama antardesa (BKAD) eks-PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), BUMDes, BUMDesa-Bersama (BUMDesMa), dan pemerintah desa dengan dana desanya.
  - b. Upaya pemberdayaan ekonomi warga dan penguatan UMKM dilakukan oleh pemerintah desa melalui BUMDes. Beberapa BUMDes memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan untuk belanja sarana produksi. Beberapa BUMDes berupaya mengadakan sarana produksi dan berbelanja secara kolektif untuk menekan harga;
  - c. BUMDes Bersama (BUMDesMa) Sei-Rampah merupakan salah satu contoh baik. Pengurus dan lembaga BUMDesMa ini sebetulnya bertransformasi dari UPK-PNPM.
  - d. Salah satu inovasi dari BUMDesMa ini adalah memisahkan antara unit usaha dan sistem pembukuan eks-PNPM, dengan unit usaha serta pembukuannya di bawah UU Desa (Dana Desa),
    - 1) Pada Unit Usaha eks UPK-PNPM Mandiri, pengelolaan dana eks-Dana Bergulir PNPM dikelola terpisah, menggunakan pendekatan sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM, yaitu: pinjaman kepada kelompok SPP, kriteria warga miskin, dan kriteria yang diterapkan pada PTO-PNPM aslinya, termasuk tingkat bunga dan alokasi manfaatnya bagi rumah tangga miskin (RTM);
    - 2) Unit Usaha Pengelolaan Dana yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan dengan pembukuan yang berbeda dan terpisah. Sesuai peraturan, pinjaman ini lebih bersifat ekonomis, bisa untuk usaha perseorangan, dengan besar bunga sesuai kesepakatan. Desa menempatkan modal pada BUMDesMa, dengan dua pola. Pertama, penyaluran ke BUMDesMa melalui BUMDes. Pola kedua, dari Bendahara Desa langsung disalurkan ke BUMDesMa. Secara periodik BUMDesMa menyampaikan laporan kinerja usaha dan keuangan kepada para kepala desa, BUMDes, BPD, Pemkab, melalui musyawarah/rapat;
    - 3) BKAD dengan forumnya tetap hidup, disesuaikan dengan era pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
    - 4) Pendekatan yang berhasil diterapkan oleh BUMDesMa Sei-Rampah ini mungkin akan diikuti oleh BUMDesMa lain yang sudah terbentuk di Kab Sergai ini. Ada rencana untuk mengembangkan *holding* BUMDesMa pada tingkat kabupaten.

### 4.1.3 Pelayanan Sosial Dasar

Kemajuan capaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kawasan Perbatasan selama kurun 2014-2018, saat ini sudah mulai dapat dilihat, terutama untuk sektor/bidang: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Permukiman, Sosial-Budaya, Ekonomi, dan Kebencanaan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Pelayanan Kesehatan:

1. Pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit belum ada di Lokpri Tanjung Beringin, namun warga Lokpri mudah mengakses rumah sakit di luar Lokpri.
2. Puskesmas di Lokpri Kawasan Tanjung Beringin merupakan pelayanan kesehatan yang maju dengan kualitas yang telah meningkat, hingga saat ini dilengkapi sarana pelayanan rawat inap (Puskesmas Rawat Inap). Puskesmas ini berinovasi dalam mengatasi masalah gangguan jiwa, dengan 38 pasien disabilitas psikososial. Mereka membentuk “Laskar Panji”, sebagai pelayanan media yang mendampingi pasien dengan gangguan kejiwaan. Dengan pendekatan yang tepat, para pasien terbebas dari perlakuan yang salah seperti pemasangan. Hasilnya, sebagian dari pasien dengan gangguan kejiwaan ini bahkan dapat datang sendiri untuk berobat di Puskesmas.
3. Pelayanan kesehatan lain, seperti Puskesmas Pembantu atau Pustu, berjalan normal.
4. Terdapat peningkatan pelayanan Posyandu melalui Program Posyandu Holistik Integratif, yaitu program upaya Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan keluarga memberdayakan diri dalam bidang fisik, sosial, dan ekonomi, sehingga diharapkan dalam kondisi ekonomi terpukul, masyarakat masih mampu bertahan menghidupi dirinya dan keluarganya.

b. Pelayanan Pendidikan:

1. Pendidikan umum berjalan normal. Jumlah Desa Lokpri yang memiliki fasilitas pendidikan formal berkurang berdasarkan kenaikan jenjang pendidikannya. Tidak semua desa Lokpri memiliki fasilitas pendidikan untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA, namun akses menuju ke SMP atau SMA ini mudah dan dalam jarak yang terjangkau, sehingga warga desa Lokpri bisa bersekolah di desa tetangga dengan mudah dan cepat.
2. Pendidikan kejuruan atau vokasi (*vocational*) diselenggarakan sesuai kebutuhan lingkungan, misalnya untuk tenaga pertanian atau pariwisata. Kegiatan pendidikan vokasi sudah ada di Desa Bagan Kuala, dengan kegiatan pelatihan jahit-menjahit untuk perempuan.

c. Infrastruktur Permukiman:

1. Dalam hal sumber air minum, sebagian besar warga desa-kelurahan Lokpri menggunakan air isi ulang atau sumur bor atau pompa. Untuk keperluan minum, digunakan air isi ulang karena tidak tersedianya sumber air minum terlindung, seperti di Desa Sukajadi, Mangga Dua, Pematang Cermai, dan Pematang Terang. Sumber air sebagian besar warga Lokpri adalah dari sumur dan digunakan untuk mandi atau mencuci.
2. Sekitar 41 keluarga yang tersebar di empat desa Lokpri, yaitu Desa Nagur, Pekan Tanjung Beringin, Pematang Cermai, dan Tebing Tinggi, memiliki penerangan utama tanpa listrik. Jumlah ini berkurang dibandingkan 2014, yang mencatat 54 keluarga tanpa listrik, tersebar di enam desa-kelurahan Lokpri.
3. Hampir semua desa-kelurahan Lokpri membuang sampah ke dalam lubang atau membakarnya. Satu desa, yaitu Bagan Kuala, menjadikan sungai atau laut sebagai tempat pembuangan sampah sebagian besar warganya. Membuang sampah dengan cara membakar memberikan efek negatif dengan meningkatkan polusi udara dan memudahkan kebakaran. Sampai 2018, belum ada desa yang memiliki tempat pembuangan sampah dengan menggunakan tempat sampah untuk pengangkutan ke TPS.

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

4. Sebagian besar keluarga di semua desa-kelurahan Lokpri telah menggunakan jamban sendiri sebagai fasilitas buang air. Sebagian besar keluarga juga sudah menggunakan tangki atau IPAL untuk sebagai tempat pembuangan akhir tinja.
5. Beberapa jenis kejadian bencana yang kerap terjadi di Lokpri Perbatasan Tanjung Beringin antara lain bencana banjir (Desa Tebing Tinggi, Pematang Cermai, Pekan Tanjung Beringin, dan Nagur), gelombang pasang laut (Desa Bagan Kuala), dan angin puyuh (Desa Bagan Kuala). Namun, tidak ada korban meninggal dunia dari kejadian bencana tersebut.
6. Dalam hal fasilitas antisipasi dan mitigasi bencana alam di Lokpri Perbatasan Tanjung Beringin, belum tersedia perlengkapan keselamatan bencana alam di desa-kelurahan Lokpri, termasuk rambu dan jalur evakuasi bencana. Kegiatan antisipasi bencana yang telah dilakukan berupa pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, dan pantai di Desa Nagur, Pematang Terang, Tebing Tinggi, Bagan Kuala, Pekan Tanjung Beringin, dan Tanjung Dua.

### d. Transportasi-Komunikasi dan Informasi

1. Wujud nyata hasil pembangunan transportasi di desa-kelurahan Lokpri Perbatasan Tanjung Beringin tecermin jalan antardesa di semua desa yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang tahun. Pelayanan angkutan umum sampai dengan 2018 mengalami penurunan dibandingkan kondisi 2014, dengan jumlah desa yang dilalui angkutan umum menurun. Sebelumnya, semua desa-kelurahan dilayani angkutan umum, kemudian berkurang menjadi hanya enam desa yang dilayani oleh angkutan umum. Dari enam desa-kelurahan Lokpri yang terlayani angkutan umum, tiga desa (Pematang Terang, Pematang Cermai, dan Pekan Tanjung Beringin) memiliki angkutan umum dengan trayek tetap, sementara tiga desa lainnya (Bagan Kuala, Tebing Tinggi, dan Nagur) memiliki angkutan umum tanpa trayek tetap. Dua desa yang tidak dilalui angkutan umum adalah Desa Mangga Dua dan Sukajadi.
2. Pada sektor informasi komunikasi, perkembangan capaian pembangunan sarana prasarana informasi digital di desa-kelurahan Lokpri Tanjung Beringin menunjukkan tren positif meskipun belum maksimal. Empat desa memiliki fasilitas internet di kantor desa-kelurahan.
3. Sementara itu, dukungan pembangunan komunikasi dipetakan dengan bertambahnya desa-kelurahan yang memiliki BTS atau menara telepon seluler. Tercatat pada 2018, Desa Nagur, Pekan Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, dan Mangga Dua memiliki BTS.

## 4.1.4 Aspek Sosial Budaya

### a. Gambaran Umum

1. Budaya gotong-royong tetap kental menjadi budaya kerja bersama untuk mencapai tujuan pembangunan. Kegiatan gotong-royong warga sangat dominan dilakukan oleh warga di semua desa-kelurahan Lokpri Perbatasan Tanjung Beringin. Kegiatan gotong-royong dilaksanakan untuk kepentingan umum seperti kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, ataupun dalam membantu warga yang mengalami musibah seperti kematian, kesakitan, dan kecelakaan.
2. Keberadaan Lembaga PKK, Lembaga Kepemudaan, dan Lembaga Adat menggambarkan kekuatan inklusif dalam pembangunan di Lokpri, serta menunjukkan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan. Peran perempuan dalam pembangunan tergambarkan melalui keberadaan kelompok yang sudah ada di setiap desa-kelurahan Lokpri, dengan

jumlah minimal satu kelompok. Sementara itu, keikutsertaan pemuda dalam pembangunan tergambar dari keberadaan Kelompok Karang Taruna yang sudah terbentuk di setiap desa-kelurahan di Lokpri Perbatasan Tanjung Beringin. Sayangnya, keberadaan dan aktivitas Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berupa Lembaga Adat tidak lagi terlihat secara formal.

#### b. Masalah Sosial

1. Salah satu masalah sosial di desa pesisir perbatasan, menurut beberapa sumber, ialah masalah penyalahgunaan narkoba. Dikhawatirkan, penggunaan narkoba menjalar di kalangan warga dan nelayan. Belanja narkoba sudah menjadi semacam kebutuhan harian. Di samping itu, mulai ada tanda-tanda pembeli dari luar datang ke desa tersebut untuk membeli narkoba.
2. Saat ini pihak BNN daerah, kepolisian, dan unsur pemerintahan setempat secara periodik melakukan patroli, pemeriksaan, dan penindakan di Desa Nagur dan sekitarnya.
3. Masalah sosial lainnya, menyangkut “sikap mental” (*mindset*) masyarakat yang belum sadar untuk menolong dirinya sendiri.
4. Masalah-masalah sosial ini, selain menyangkut pendidikan umum, juga menyangkut ekonomi.

Berkaitan dengan capaian pembangunan sosial budaya di Lokpri Tanjung Beringin, temuan lapangan menunjukkan bahwa pola hidup sebagian besar penduduk yang tidak memiliki budaya menabung, dan bertambahnya kasus penggunaan narkoba oleh masyarakat (yang menganggap narkoba sebagai kebutuhan hidup), menjadi tantangan bagi semua pihak pelaksana pembangunan kawasan perbatasan untuk lebih dominan mendorong pembangunan kesejahteraan selain pembangunan pertahanan keamanan. Kondisi ini menunjukkan belum maksimalnya fokus sasaran pengelolaan dan pembangunan kesejahteraan di Kawasan Lokpri Perbatasan, terkait keseimbangan antara pembangunan kesejahteraan dan pembangunan pertahanan keamanan.

### 4.1.6 Kelembagaan: Koordinasi

1. Sosialisasi/menginformasikan rencana dalam Musrenbang (Desa, Kecamatan, Kabupaten)
  - a. Rencana Pengembangan PATAYA tersebut di atas merupakan tema dalam RPJMD Kabupaten Sergai dan dengan demikian telah disosialisasikan serta dibahas dalam Musrenbang Desa serta Kecamatan, sehingga tidak memperoleh masalah dalam mendapatkan dukungan dan partisipasi dari bawah (desa, kecamatan);
  - b. Respons Pemdes Bagan Kuala menunjukkan bahwa desa-desa dalam Kecamatan Tanjung Beringin telah mendapat sosialisasi sejak awal, sehingga dapat berpartisipasi dengan membangun dermaga/pelabuhan kecil di Tangkahan (Desa Bagan Kuala), bersama masyarakat membangun jajaran bambu penahan erosi (abrasi) pantai, dan membina pelaku tanaman obat keluarga (TOGA), dengan menggunakan Dana Desa yang diputuskan dalam musyawarah (Musyawarah Desa);
2. Penguatan koordinasi dan kerjasama: Kecamatan Lokpri BPPD, Bappeda, dan Kecamatan Lokpri

Untuk mendukung percepatan pembangunan Lokpri Perbatasan, Pemkab Sergai telah menerbitkan SK Tim “Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan”, dengan membentuk Tim Percepatan yang terdiri atas Bappeda, Dinas KKP, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kecamatan terkait (khususnya Kecamatan Lokpri Tanjung Beringin).

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

3. Upaya dan terobosan dalam menangani masalah koordinasi
  - a. Tantangan dan kendala utama yang dihadapi ialah kebutuhan pembangunan infrastruktur, yang besaran biaya dan kewenangannya ada pada pemerintah atasan (provinsi, kementerian), dan kendala pembangunan lahan (pulau, pelabuhan, jalan) yang kewenangannya ada pemerintah pusat (Kementerian LHK, KKP, Perhubungan [Laut], Kementerian Pertahanan);
  - b. Pada saat ini, Pemkab Sergai menyiapkan penandatanganan dengan pihak Kementerian Pertahanan (Satuan Marinir) untuk pengelolaan Pulau Berhala, yang pengelolaannya dalam kewenangan Kementerian Pertahanan (sebagai pulau kecil terluar);
  - c. Untuk pengembangan dermaga dan pelabuhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai bekerja sama dengan UPT Perhubungan Laut. Lahan untuk pengembangan dermaga/pelabuhan di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Lokpri Tanjung Beringin, berada dalam penguasaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sehingga dalam kerjasama dengan Perhubungan Laut juga terdapat ajakan bersurat kepada Kementerian LHK agar pengembangan pelabuhan dapat dilaksanakan;
  - d. Menyangkut pengembangan/*resettlement* permukiman nelayan, Pemkab juga mengajukan permohonan dukungan dari Kementerian PUPR menyangkut pembangunan permukiman, dan dari Kementerian LHK menyangkut kawasan hutan yang perlu dikonversi menjadi hutan sosial/kerakyatan.
4. Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan.
  - a. Koordinasi untuk pembangunan kawasan perbatasan di Lokpri Tanjung Beringin, Kabupaten Sergai, sebetulnya berjalan dengan cukup baik, dengan perhatian memadai dari Pemkab, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait. Namun, beberapa hal perlu ditingkatkan, misalnya:
    - 1) Pengadaan yang diberikan dari tingkat nasional (misalnya perahu) ternyata tidak sesuai spesifikasinya dengan kebutuhan para nelayan setempat;
    - 2) Kewenangan pengelolaan pantai atau “pesisir dan pulau-pulau kecil” yang dialihkan. Urusan KKP dialihkan dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Pengelolaan Pulau Berhala, sebagai pulau kecil terluar, juga dialihkan ke Kementerian Hankam (pusat). Pengalihan kewenangan seperti ini tentu merepotkan perencanaan RKA dan pengelolaannya. Permasalahan dijumpai di tingkat kabupaten dan mengharuskan Pemkab turun tangan, tetapi kewenangan tidak pada pemerintah kabupaten.
  - b. Masalah koordinasi masih menjadi tantangan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Contohnya di Kawasan Lokpri Perbatasan Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara. Sebelum 2006, Pemkab Sergai telah mencoba membangun kawasan perbatasan “Tanjung Beringin - Pulau Berhala” dengan konsep “*ecomarine tourism*”. Beberapa upaya telah dilakukan untuk membenahi Pulau Berhala dengan sarana dermaga dan akomodasi sederhana. Namun, kemudian (2006) ada ketentuan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan terpusat di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan (Kemenko Polhukam). Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diangkat dari tingkat kabupaten



ke tingkat provinsi. Perubahan kebijakan dalam pengelolaan kawasan, termasuk kawasan perbatasan, menjadi kendala dan tantangan dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.

Koordinasi tingkat nasional antara BNPP, Kemenko PMK, Bappenas, dan K/L terkait perlu diimbangi dengan koordinasi pengelolaan dan pembangunan pada tingkat kabupaten hingga kecamatan (Lokpri). Kondisi yang dijumpai menunjukkan belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan kebijakan dan program di antara kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), khususnya untuk program-program perbatasan yang secara sektoral menjadi tanggung jawab K/L, pemerintah daerah, dan non-pemerintah.

### 4.1.7. Kelembagaan: Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas kelembagaan Kecamatan dan BPPD terbagi atas beberapa fokus yaitu koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Selain itu, terdapat juga penguatan melalui peningkatan efektivitas perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), pengusulan (dan *e-planning*).

1. Pengembangan kelembagaan dilaksanakan dengan penguatan kapasitas kecamatan untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga strategis yang menghubungkan kepentingan desa-kelurahan Lokpri perbatasan dengan pemerintah kabupaten.
2. Pembinaan kecamatan dalam koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Bappeda dan OPD lainnya. Dilakukan pelatihan-pelatihan, termasuk dalam penyusunan usulan program/kegiatan dan penggunaan *e-planning* (KRISNA).
3. Pelatihan dan pembinaan dilakukan dengan secara periodik mengundang camat atau stafnya ke Bappeda.
4. Kecamatan merupakan simpul bagi OPD untuk menyebarluaskan dan memantau program/kegiatannya ke desa-desa;
  - a. Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) ini tidak memiliki BPPD dengan pertimbangan bahwa hanya ada satu kecamatan perbatasan. Namun, khusus untuk Kecamatan Lokpri Perbatasan Tanjung Beringin, Pemkab telah menetapkan perubahan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK), dengan menambahkan Kepala Seksi Pengelola Pulau Berhala.
  - b. Sejauh ini, koordinasi pembangunan antar-OPD yang mendukung pembangunan dan pengelolaan Lokpri Tanjung Beringin, terutama dinas PU, KKP, Pariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berjalan cukup lancar. Di tingkat kecamatan, hubungan di antara komponen Muspika (camat, unsur kepolisian, TNI Kodim, Pengawal Pantai/AL) juga terjalin baik.

Peran Perempuan dalam Inovasi Desa

## **PENGEMBANGAN TAMAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA)**

Desa Bagan Kuala memiliki inovasi yang dimulai dari seorang ibu yang mengembangkan Taman Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Inovasi ini merupakan inisiatif Ibu Yusmiati, yang berupaya melestarikan sepetak lahan yang dia huni bersama keluarganya. Sebagian upaya ini merupakan kegiatan gotong-royong membangun pancang-pancang bambu untuk menahan ombak. Kegiatan ini ternyata berhasil menahan ombak, sehingga laju abrasi atau erosi pantai bisa dicegah. Setelah garis pantai dipertahankan dengan barisan bambu tersebut, sepanjang pantai tersebut juga ditanami tanaman bakau (mangrove), sehingga sistem bangunan penahan ombak untuk mencegah abrasi tersebut makin kokoh dan permanen.

Ibu Yusmiati memanfaatkan area lahan yang menjadi lebar tersebut untuk menanam tanaman-tanaman obat herbal, seperti kumis kucing, pacar air, serai, jahe merah, dan bawang dayak. Kegiatan ini sudah berlangsung beberapa tahun sehingga halaman yang ada sudah makin penuh.

Ibu Yusmiati juga mengajak para tetangga terdekatnya untuk melakukan hal yang sama, yaitu berkebun ToGa. Beberapa warga pun mengikuti jejaknya. Hanya saja, sampai saat ini kegiatan ini masih dilakukan masing-masing rumah tangga, dan belum terbentuk semacam kelompok usaha yang terorganisasi. Pengusahaan produk sejauh ini juga masih merupakan kegiatan rumahan, lebih untuk hobi dan kepedulian terhadap pelestarian tanaman obat tradisional (herbal).

Mengenai pemasaran produk, Ibu Yusmiati menjelaskan bahwa ada bidan kecamatan yang secara periodik membeli beberapa produk tanaman obat untuk direkomendasikan kepada relasinya, yang mungkin juga pasien sang bidan sendiri. Ini tentu bisa dianggap sebagai awal upaya untuk mengenali kebutuhan pasar dan peluang untuk meningkatkan kegiatan kebun Tanaman Obat Keluarga (TOGA) ini.

Belakangan, kebun TOGA milik Ibu Yusmiati dan para tetangganya mulai mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Desa Bagan Kuala. Sebagai bukti, jalan ke lokasi kebun TOGA cukup terpelihara. Gapura yang sebelumnya dibuat ala kadarnya oleh warga, sekarang sudah dibuat dengan papan nama yang lebih resmi dan permanen.

*Belum ada upaya pemasaran yang terorganisasi, tetapi ada beberapa pembeli yang secara periodik membeli untuk keperluan pemeliharaan kesehatan (a.l. dari bidan)*

**Saran:**

*Sebaiknya ada dukungan promosi dan pemasaran agar kebun TOGA ini punya pasar yang lebih luas dan dapat diharapkan sebagai sumber pendapatan warga. Jika satu kebun menghasilkan pemasukan, dapat diharapkan para tetangga lebih bersemangat untuk mengembangkan kegiatan yang sama.*

*(RM)*

### **4.1.8 Catatan Kesimpulan**

Dari kunjungan, diskusi, dan wawancara di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin dan dengan beberapa kepala desa, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

5. Keberadaan Lokpri Kecamatan Tanjung Beringin harus dipelihara dan dikembangkan, terutama dengan mempertahankan Pulau Berhala, pulau terluar perbatasan negara, yang menentukan eksistensi garis batas wilayah/teritori daratan dan perairan NKRI. Perlu kebijakan afirmatif untuk mengelola dan mempertahankannya;

6. Kecamatan Lokpri Perbatasan berperan dalam mengelola administrasi dan mengoordinasi program/kegiatan peningkatan kesejahteraan warga perbatasan. Namun, kecamatan tidak bisa berdiri sendiri. Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masih harus dilakukan dengan mempertimbangkan kabupaten secara keseluruhan. Sebagaimana kecamatan perbatasan pada umumnya, kecamatan di Lokpri Tanjung Beringin belum bisa mandiri tanpa dukungan kabupaten;
7. Pembangunan prasarana, sarana ekonomi, dan pelayanan publik (seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial) masih harus didukung oleh kantor-kantor dinas, organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten, provinsi, dan K/L tingkat nasional.
8. Sesuai diagram “Lokpri – Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) – Kawasan Cakupan Perbatasan (WCP)”, dapat diartikan bahwa peran utama ada pada kabupaten (WKP), dengan fokus pada afirmasi pembangunan/pengelolaan Lokpri Perbatasan dan dukungan dari provinsi (WCP);
9. Pada kenyataannya, dukungan K/L (DAK afirmasi), provinsi, dan kabupaten tetap berjalan. Di Kabupaten Sergai ini masalah perbatasan mendapatkan perhatian penuh, dengan kerja sama dengan pihak hankam (TNI, Polri). Namun, tetap ada kendala dan tantangan, antara lain dalam hal koordinasi dan kewenangan yang kadang berubah;
10. Bupati Sergai menitipkan dan menggarisbawahi pesan terkait kebutuhan bantuan untuk:
  - a) Bangunan Pemecah Ombak, untuk pesisir Kabupaten Sergai yang mengalami derasnya abrasi (erosi pantai);
  - b) Pengerukan dan pembangunan penahan dinding sungai, agar Sungai Bedagai (Sei Rampah) dapat dilalui/dimasuki perahu-perahu nelayan dari laut hingga ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sepanjang 6 km .
11. Inovasi Desa Bagan Kuala dalam menggunakan Dana Desa untuk mengatasi abrasi dengan bergotong-royong mendirikan bangunan penahan ombak dan pencegah abrasi dari bahan bambu, layak diapresiasi dan didukung dengan teknologi yang lebih permanen;
12. Inovasi atau solusi BUMDesMa Sei-Rampah yang mengelola “Penyertaan Modal dari Desa-Desa (BUMDes), dan Dana Bergulir eks PNPM” – dapat menjadi pelajaran dalam pengembangan kelembagaan ekonomi desa dan antardesa. Dengan demikian, program antardesa (kecamatan, desa) dari kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat dapat dipadukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat kecamatan Lokpri;
13. Inovasi lain ialah usaha warga Desa Bagan Kuala (desa dalam Lokpri yang terletak di pesisir/pantai), yang mengembangkan taman tanaman obat (TOGA/Taman Obat Keluarga). Pemasaran produk perlu didukung (oleh Desa, Pemkab), dan upaya ini perlu ditularkan kepada para tetangganya. Inovasi ini merupakan bagian dari daya tarik pariwisata pantai;
14. Dengan demikian, dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan, penguatan Lokpri juga harus didukung dan dipadukan dengan program/kegiatan pembangunan pada tingkat kabupaten, karena otonomi atau kewenangan dalam pembangunan serta keputusan anggaran ada pada tingkat pemerintah kabupaten.

## 4.2 Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur

Di Provinsi NTT terdapat dua belas kabupaten perbatasan darat dan laut. Empat kabupaten dengan perbatasan darat adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka. Delapan kabupaten dengan perbatasan laut adalah: Kabupaten Timor Tengah Selatan, Alor, Rote, Sabu Raijua, dan empat kabupaten di Pulau Sumba. Total jumlah seluruh Lokpri adalah 31 kecamatan Lokpri, yang tersebar di tujuh kabupaten perbatasan.

Terdapat tujuh kecamatan perbatasan lokpri (lokasi prioritas) di Kabupaten TTU, yaitu: Kecamatan Miomafo Barat, Mutis, Bikomi Tengah, Bikomi Niluliat, Bikomi Utara, Naibenu, dan Insana Utara. Yang menjadi fokus kajian ini ialah Lokpri Kecamatan Insana Utara, yang mempunyai PLBN (Pos Lintas Batas Negara /PLBN) Wini (lihat Gambar 4.3).

Gambar 4.3  
Peta Orientasi Lokasi Lokpri Kabupaten TTU – Provinsi Nusa Tenggara Timur



1. Kegiatan kunjungan lapangan dilaksanakan untuk menggali informasi tentang capaian pembangunan kesejahteraan di Kawasan Perbatasan Kabupaten TTU melalui:
2. FGD di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), di kantor Bappeda Kabupaten TTU, bersama Kepala Bidang Fisik Prasarana dan staf terkait, pada 6 November 2019.
3. FGD di kantor PLBN (Pos Lintas Batas) Wini, Kecamatan Insana Utara, Kab. TTU, pada 7 November 2019.
4. FGD di ruang pertemuan Hotel Livero, Kefamenanu, Kabupaten TTU, bersama pejabat BPPD Kab. TTU, Kepala Bidang Fisik Prasarana dan staf terkait, pada 8 November 2019.
5. FGD di kantor BPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bersama Sekretaris BPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan staf, pada 17 Februari 2020;
6. FGD di Kantor Kecamatan Insana Utara, bersama Sekretaris Kecamatan Insana Utara dan staf, serta staf dari kantor PLBN Wini, Kab. TTU, pada 19 Februari 2020.
7. FGD di Ruang Pertemuan Hotel Livero, Kefamenanu, Kabupaten TTU, bersama pejabat BPPD Kab. TTU, Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Kabid Potensi Daerah, pada 20 Februari 2020.

## 4.2.1 Pengembangan Wilayah

Di Lokpri Kecamatan Insana Utara Kawasan PLBN Wini yang terletak di Desa Hamusu Wini telah dilakukan kajian lapangan berupa FGD dan kunjungan pada 7 November 2019 dan 19 Februari 2020, dengan hasil antara lain di bawah ini:

1. Dari diskusi di Kecamatan Insana Utara diperoleh gambaran bahwa Kecamatan Insana Utara dan para pihak mempunyai gagasan untuk mengembangkan kawasan sekitar Wini ini sebagai “pusat pemasaran produk daerah, pelayanan wilayah, dan pariwisata”.
2. Potensi-potensi ekonomi kawasan pendukungnya termasuk:
  - a. Peternakan: dari ternak besar sampai dengan ternak kecil, seperti kerbau, sapi, kuda, kambing, dan domba;
  - b. Potensi kelautan dan pariwisata (alam, budaya); dengan potensi kelautan berupa garam, rumput laut, ikan;
  - c. Potensi pertanian: jagung, padi, palawija.
  - d. Potensi perkebunan: kopi, kakao, vanili, cengkeh, coklat, dan kelor;
  - e. Potensi industri mikro (rumahan): kerajinan tenun. Hasil dari beberapa industri rumahan ini telah dikelola melalui koperasi.
3. Sarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, terdiri atas:
  - a. Bangunan PLBN dan areanya diharapkan bisa dimanfaatkan untuk menjadi ruang pameran atau *showroom*, yang memamerkan produk-produk wilayah sekitar Wini, Kecamatan Insana Utara, bahkan seluruh Kabupaten TTU, baik bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara (Timor-Leste). Tantangannya adalah gedung pelayanan PLBN dan properti (sarana pasar) berada di bawah kewenangan BNPP;
  - b. Bangunan pasar yang telah dibangun oleh BNPP sebagai bagian dari PLBN, diharapkan bisa diisi dan dimanfaatkan sebagai pasar wilayah yang permamen, tidak hanya sebagai pasar lokal mingguan seperti saat ini, sehingga pelayanannya dapat mencakup seluruh Kabupaten TTU dan melayani pembeli hingga Atambua serta warga seberang. Ini mengingat bangunan sarana pasar berukuran besar dan terletak di mulut pelabuhan Wini;
4. Pelabuhan Wini merupakan pelabuhan regional, dengan trayek kapal menuju Surabaya, Dili, hingga Makasar. Pelabuhan ini merupakan pintu ekspor untuk produk-produk hasil hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari wilayah sekitar, serta pintu masuk barang kebutuhan, yang selanjutnya diangkut melalui jalan darat menuju ke Kefamenanu ataupun ke arah Atambua;
5. Untuk area pengembangan pariwisata bahari telah ditunjuk Tanjung Bestian, yang sering digunakan sebagai arena pacuan kuda, untuk arena pacuan kuda dan atraksi lainnya, serta untuk menikmati pemandangan laut;
6. Pasar Ikan, pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bekerjasama dengan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan.
7. Pembinaan ekonomi kreatif (tenun ikat) dengan wilayah pelayanan hingga Kefamenanu, Atambua, dan wilayah Timor-Leste (Oekusi dan lainnya),

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

8. Harapan yang disampaikan di Kecamatan Insana Utara, Lokpri Wini ini selanjutnya adalah untuk memiliki pendidikan tinggi (akademi) di bidang perikanan dan pariwisata, untuk meningkatkan kualitas SDM setempat dan mendukung misi pengembangan perikanan dan pariwisata kawasan sekitar PLBN Wini.
9. Bangunan PLBN (gedung) sampai saat ini masih murni untuk pos lalu-lintas orang menyeberang saja. Sarana dan pelataran luar PLBN sebetulnya dapat dimanfaatkan bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai sarana kegiatan produktif bagi masyarakat sekitar, dan diharapkan memberikan dampak optimal terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi setempat, tentunya dengan dukungan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di PLBN dan sekitarnya.
10. Catatan dari pihak BPPD Provinsi adalah agar PLBN Wini bisa diberi peran sebagai satu simpul pertumbuhan, lalu dibuat lagi simpul pertumbuhan di sekitarnya. Sementara itu, harga produk-produk yang diperjualbelikan di PLBN disubsidi agar murah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di PLBN dan sekitarnya, dan masyarakat tak perlu bertransaksi ke kota-kota sekitar.

### a. Rencana Pengembangan Lokpri Kawasan Perbatasan

Pola pengembangan pembangunan Lokpri di Kawasan Perbatasan Kabupaten TTU memiliki karakteristik berjenjang, karena di wilayah ini terdapat PLBN dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Beberapa rencana pengembangan wilayah dan tata ruang PLBN dan PKSN antara lain adalah:

1. Salah satu aspek dalam pengembangan wilayah, khususnya wilayah perbatasan, ialah membangun pusat-pusat kegiatan pelayanan. Untuk itu, kawasan perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) diharapkan memiliki PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) yang terletak di Kefamenanu Kabupaten TTU. Upaya ini sudah dilakukan dan saat ini proses pembuatan peraturan daerahnya tengah berjalan.
2. Potensi PKSN Kefamenanu saat ini: Dalam bidang pendidikan, telah ada perguruan tinggi Universitas Negeri Tinoir, Universitas Cendana Wangi, STIA (Pastoral), dan pendidikan menengah kejuruan pariwisata/perhotelan, di samping beberapa sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar, baik negeri dan swasta. Dalam bidang kesehatan, ada rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas, dan poliklinik. Untuk sarana ekonomi ada pasar besar, lama, dan baru, dan pertokoan sebagaimana layaknya kota pusat pelayanan.
3. Beberapa sarana-prasarana dan potensi yang akan ditingkatkan untuk penguatan peran PKSN Kefamenanu, antara lain: (i) melanjutkan pembangunan jalan lingkar (*ring road*) seputar kota; (ii) menata kembali rute lalu lintas dalam kota untuk mempromosikan lokasi pasar dan sarana kota; (iii) mendukung pengembangan ekonomi kreatif (tenun ikat), UMKM, dan pemberdayaan masyarakat.

### b. Kendala Infrastruktur, Kewenangan, dan Upaya Mengatasi Masalah

1. Kondisi infrastruktur kawasan perbatasan Kabupaten TTU ternyata masih tertinggal dibandingkan dengan negara Timor-Leste. Kuantitas dan kualitas infrastruktur di perbatasan negara Timor-Leste lebih lengkap dan bagus.

2. Masalah infrastruktur jalan wilayah (regional): yang menjadi kendala utama bagi Kabupaten TTU ialah belum utuhnya jalan regional perbatasan karena belum tersambungannya jalan regional “sabuk merah perbatasan” dari Miomafo Barat menuju Amfoang (Kabupaten Kupang). Jalur sambungan ini diperkirakan akan direalisasikan pada 2020 sampai 2021 oleh PUPR guna mewujudkan peningkatan akses di Kecamatan Mutis.
3. Dari tujuh kecamatan perbatasan di Kabupaten TTU, Kecamatan Mutis paling tertinggal dalam hal capaian pembangunan fisik pelayanan sosial dasar, ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Hal itu terkait dengan kondisi jalannya yang paling buruk dibandingkan dengan kecamatan perbatasan lainnya. Sebagian besar jalan di Kecamatan Mutis masih berupa jalan tanah yang tidak dapat dilalui kendaraan saat hujan. Sementara itu, berdasarkan kewenangan jalan, sebagian jalan yang rusak merupakan jalan berkategori kelas jalan nasional dan merupakan kewenangan kementerian pusat (Bina Marga, Kementerian PUPR). Pada 2013, 2014, dan 2015 Kecamatan Mutis baru mendapatkan bantuan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dari PLN untuk penerangan di desa-desa.
4. Infrastruktur air bersih di kawasan perbatasan Kabupaten TTU banyak mendapatkan dukungan dari program PNPM Mandiri sebelumnya. Kecamatan Mutis menjadi kecamatan perbatasan yang memiliki fasilitas air bersih paling baik di perbatasan.
5. Kendala lain ialah bencana longsor kerap terjadi di kawasan perbatasan Kabupaten TTU ini. Banyak jembatan yang rusak karena longsor pada jalan menuju ke PLBN Wini, ditambah dengan angin puyuh yang juga kerap terjadi.
6. Dari aspek pertahanan, sejauh ini tidak pernah ada permasalahan serius, karena penduduk perbatasan di dua negara adalah penduduk yang terikat dalam satu marga, satu keluarga besar, atau satu leluhur. Mereka tetap melaksanakan acara keluarga bersama-sama dengan saling berkunjung menyeberang negara. Sebagai ilustrasi, warga yang akan menyeberang antarnegara bisa melalui dua pintu perbatasan resmi yaitu pintu perbatasan (PLBN) Wini di Kecamatan Insana Utara dan Pintu Perbatasan Napan di Kecamatan Bikomi Utara. Sementara itu, di kecamatan perbatasan lain yang tidak memiliki pintu resmi, warga masih bisa menyeberangi perbatasan dengan cara melapor dengan menunjukkan surat keterangan saat melintasi pos jaga militer.

## 4.2.2 Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal yang Inklusif

### a. Gambaran Umum

1. Jenis pasar yang menjadi simpul kegiatan ekonomi di desa-kelurahan Lokpri didominasi oleh pasar semi-permanen, yaitu pasar dengan bangunan dengan atap dan lantai namun tanpa dinding. Jumlah desa-kelurahan yang memiliki pasar semi-permanen meningkat menjadi sebelas pada 2018. Pasar-pasar tersebut berada di Desa Humusu C, Humaeni Ana, Tasinifu, Fatumtasa, Naekake A, Manamas, Haulasi, Bakitolas, Sunsea, Sallu, dan Haumeni.
2. Baru dua desa-kelurahan lokpri yang memiliki fasilitas bank umum dan BPR, yaitu di Desa Humusu C dan Eban. Di kedua desa tersebut hanya terdapat bank umum pemerintah. Fasilitas perbankan di desa-kelurahan Lokpri Perbatasan juga didukung keberadaan agen bank yang tercatat telah ada di enam desa-kelurahan, yaitu di Desa Oenenu Utara, Nilulat, Inbate, Napan, Humusu A, dan Humusu C.

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

3. Terdapat dukungan fasilitas kredit murah bagi masyarakat Lokpri Perbatasan Kabupaten TTU untuk mendorong usaha ekonomi lokal, berupa fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini telah banyak disalurkan sampai ke tingkat desa. Meskipun demikian, belum banyak desa-kelurahan lokpri yang warganya mendapatkan fasilitas kredit KUR. Baru sekitar 24 desa/kelurahan yang telah memperoleh akses ke Program KUR pada 2018. Jumlah ini sesungguhnya naik secara signifikan apabila dibandingkan dengan kondisi pada 2014, saat hanya 12 desa-kelurahan yang memperoleh akses ke Program KUR. Berdasarkan wilayah Lokpri atau kecamatan perbatasan, hanya Lokpri Kecamatan Mutis dan Naibenu saja yang masih belum memperoleh akses ke Program KUR.
4. Sebagian besar warga di kawasan perbatasan Kab. TTU bekerja di sektor pertanian palawija.
5. Terdapat cukup banyak potensi ekonomi di Lokpri Kabupaten TTU, antara lain: (a) Ternak dari besar sampai dengan ternak kecil, antara lain kerbau, sapi, kuda, kambing, dan domba. Klaster-klaster potensial seperti sapi, kambing dan lain-lain biasanya dikelompokkan dan terdiri atas beberapa desa dengan potensi yang sama. (b) Potensi kelautan (garam, rumput laut, ikan) dan wisata (alam, budaya). (c) Potensi pertanian: jagung, padi, palawija. (d) Potensi perkebunan: kopi, kakao, vanili, cengkih, cokelat, kelor, kacang tanah, dan bawang putih. (e) Potensi industri mikro (rumahan): kerajinan tenun, anyaman, dan ikan. Selain itu terdapat pula industri makanan dan minuman khas berupa produk jagung. Beberapa potensi ekonomi ini telah dikelola melalui koperasi.
6. Hanya ada satu desa berbatasan dengan laut, yaitu Desa Humusu Wini, yang memiliki potensi ekonomi bagus berupa pantai dan kawasan mangrove.
7. Di kawasan perbatasan, terdapat dua program unggulan: SARI Tani, dan Anggur Merah. Setiap desa mendapat alokasi Rp300 juta dari Program Anggur Merah (provinsi) dan Rp300 juta dari Program Sari Tani (kabupaten).
8. Dana Desa membantu dalam pembangunan desa di kawasan perbatasan, dan digunakan untuk infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Semua desa di kawasan perbatasan sudah memiliki BUMDesa. Sudah ada Alokasi Dana Desa dari Kabupaten TTU ke desa perbatasan sebesar Rp300 juta per desa. Bupati TTU menyarankan pembangunan desa agar tidak semata-mata digunakan untuk infrastruktur, tetapi juga diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
9. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, lebih banyak penduduk perbatasan negara Timor-Leste (di Oekussi) yang berbelanja ke perbatasan Kabupaten TTU daripada sebaliknya. Transaksi belanja harian warga lebih banyak dalam bentuk pembelian barang-barang dari Indonesia dibandingkan pembelian dari Timor-Leste (gula saja). Kondisi ini menurun pada tahun 2015. Transaksi beli kebutuhan belanja harian dilaksanakan seminggu sekali di beberapa lokasi di perbatasan Kab. TTU. Kegiatan belanja sembako di Kab. TTU oleh warga Timor-Leste terjadi setiap Rabu dan Kamis malam. Warga Timor-Leste (Oekussi) membeli barang di Kab. TTU, bukan menjual.

### b. Ekonomi Lokal yang Inklusif

1. Potensi perekonomian lokal masyarakat di Lokpri Perbatasan Kabupaten TTU dalam bentuk Usaha Kecil dan Mikro menunjukkan karakteristik ekonomi lokal yang berbeda. Terdapat beberapa jenis industri seperti industri barang kayu, industri barang dari kain atau tenun, dan industri makanan dan minuman. Setidaknya di sembilan desa-kelurahan terdapat industri makanan dan minuman, yaitu di Desa Oesoko, Humusu C, Humusu A, Humusu B, Fatumtasa, Haumeni, Tes, Napan, dan Sainoni.



2. Aneka program pemberdayaan turun sampai ke masyarakat di perbatasan, seperti PNPM Mandiri dan Dana Desa. Program pemberdayaan ini dapat mengurai persoalan yang dihadapi masyarakat di area perbatasan. Bupati TTU sudah memberi arahan pembangunan desa agar tidak melulu difokuskan pada infrastruktur tetapi juga ke arah pemberdayaan masyarakat miskin.

### 4.2.3 Pelayanan Sosial Dasar

#### a. Pelayanan Kesehatan

1. Lokasi Puskesmas dan Pustu di Lokpri Perbatasan TTU tersebar di beberapa desa. Secara keseluruhan, terdapat tujuh puskesmas rawat inap dan puskesmas tanpa rawat inap. Peningkatan kelas puskesmas terjadi di beberapa Lokpri. Pada 2018, enam Puskesmas rawat inap terdapat di Desa Manamas, Tasinifu, Napan, Eban, Inbate, dan Humusu C. Sementara itu, Puskesmas tanpa rawat inap terdapat di Desa Oenenu Utara, Kecamatan Bikomi Tengah.
2. Puskesmas Pembantu (Pustu), merupakan unit pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Pada 2018, jumlah pustu tersebar di 15 desa-kelurahan Lokpri Perbatasan.
3. Dalam hal kemudahan warga desa-kelurahan untuk mencapai Puskesmas dan Pustu, masih sulit bagi warga Desa Naekake A, Naekake B, Noelelo dan Haumeni' Ana untuk mencapai fasilitas kesehatan ini. Rumah sakit belum ada di Lokpri Perbatasan Kabupaten TTU, dan warga dari desa Lokpri di Kecamatan Mutis sulit mencapai rumah sakit.
4. Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi salah satu ukuran kelengkapan pelayanan kesehatan di desa-kelurahan. Sampai dengan 2018, semua desa-kelurahan di Lokpri Perbatasan Kabupaten TTU telah memiliki Posyandu. Beberapa desa-kelurahan memiliki Posyandu di lebih dari satu lokasi.
5. Dalam hal sebaran polindesa (Pondok Bersalin Desa) di desa/kelurahan Lokpri Perbatasan Kabupaten TTU, terpetakan bahwa dari 50 desa-kelurahan, terdapat 30 desa yang telah memiliki polindesa dan 20 desa-kelurahan yang belum memiliki Polindesa. Selain itu, ada program Provinsi NTT dengan nama "Revolusi KIA" atau Kesehatan Ibu Anak, yang bertujuan menekan tingkat kematian ibu anak dan terpusat di puskesmas atau pustu, bila akses ke puskesmas sulit. Pasien tidak boleh ditolak dan harus dilayani. Saat ini, pelayanan dari polindesa terpusat ke puskesmas, sementara pustu hanya berfungsi apabila puskesmas tidak bisa diakses.
6. Ditemukan beragam tingkat kemudahan akses ke Polindesa bagi warga desa/kelurahan Lokpri yang belum memiliki Polindesa. Rata-rata, warga desa-kelurahan yang sulit mengakses Polindesa di desa tetangga harus menempuh jarak lebih dari 5 kilometer.
7. Penduduk perbatasan dari Oekusi, Timor-Leste, kadang memanfaatkan fasilitas kesehatan pustu untuk pengobatan dan kebutuhan kesehatan mereka. Pemanfaatan fasilitas kesehatan tersebut dilakukan bersamaan dengan kedatangan mereka untuk berbelanja. Sementara di sektor pendidikan, tidak ada warga perbatasan dari Timor-Leste yang bersekolah di kawasan perbatasan TTU.

## b. Pelayanan Pendidikan

1. Untuk sektor pendidikan, pelayanan pendidikan dasar sekolah dari PAUD sampai dengan SMP sudah terdapat di setiap kecamatan Lokpri perbatasan, meskipun beberapa desa masih sulit mengakses SMP atau SMA. Semua desa sudah memiliki PAUD.
2. Dalam hal perbandingan capaian pembangunan perbatasan di Kab. TTU dengan negara tetangga, disampaikan bahwa tingkat kesejahteraan warga perbatasan TTU lebih baik dibandingkan warga Oekusi, Timor-Leste.
3. Dalam pemetaan penyediaan fasilitas Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) di Lokpri Perbatasan, ditemukan bahwa dari lima puluh desa di Lokpri Perbatasan, sekitar dua desa-kelurahan belum memiliki Pos PAUD yang beroperasi. Kedua desa tersebut adalah Desa Eban dan Fatuneno di Kecamatan Miomafo Barat.
4. Hampir semua desa-kelurahan di Lokpri telah memiliki SD/MI, baik berstatus negeri maupun swasta. Hanya ada tiga desa-kelurahan Lokpri yang tidak memiliki fasilitas Sekolah SD/MI dan sederajat, yaitu Desa Banain, Banain C, dan Baas. Belum tersedianya Sekolah Dasar/MI di tiga desa ini tidak menyulitkan warganya mendapatkan pelayanan sekolah. Sekolah Dasar/MI di desa-kelurahan sekitar dapat dimanfaatkan oleh warga usia sekolah dasar di tiga desa ini karena akses menuju sekolah SD/MI terdekat hanya sekitar 1 km. Keterjangkauan tersebut dimudahkan dengan kualitas jalan yang baik dan dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.
5. Dalam pemetaan pelayanan pendidikan dasar tingkat SMP/MTs di Lokpri Perbatasan TTU, diperoleh informasi bahwa masih terdapat 27 desa-kelurahan yang tidak memiliki SMP/MTs, Rata-rata jarak tempuh terdekat penduduk ke sekolah ke SMP/MTs di luar desa-kelurahan adalah sekitar 1 km sampai dengan 5 km, dengan akses dan kualitas jalan yang baik. Sementara itu, warga Desa Tubu harus menempuh jarak sekitar 9 km untuk menuju sekolah SMP/MTs di luar desa mereka. Warga di Desa Naekake B di Kecamatan Mutis masih sulit mendapatkan akses ke sekolah SMP/MTs di desa tetangga.
6. Ada enam desa yang memiliki fasilitas SMA/MA, yaitu Desa Eban (Kecamatan Miomaffo Barat), Naekake A (Kecamatan Mutis), Oenenu Utara (Kecamatan Bikomi Tengah), Sunkaen (Kecamatan Bikomi Nilulat), Benus (Kecamatan Naebenu), dan Humusu B (Kecamatan Insana Utara). Warga desa lain yang tidak memiliki SMA/MA dapat bersekolah ke tujuh lokasi tersebut karena akses yang mudah. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku untuk beberapa desa di Kecamatan Mutis, yaitu Desa Noelelo, Naekake B, dan Tasinifu, yang masih mengalami kesulitan mengakses SMA/MA terdekat.

## c. Infrastruktur Permukiman

1. Terdapat beragam sumber air warga Lokpri Perbatasan di Kabupaten TTU untuk keperluan minum, mandi, dan mencuci. Sebagian besar warga di beberapa desa masih menggunakan sumber air yang belum terlindung (sumber mata air, ledeng dengan meteran, dan sumur). Hingga saat ini, telah dilakukan peningkatan pelayanan air bersih, sebagaimana terlihat dari makin banyaknya desa yang sebagian besar warganya menggunakan air bersih untuk minum dari sumber ledeng dengan meteran (sumber terlindung). Sumber air minum yang digunakan warga Lokpri yang terbanyak adalah sumber mata air, dengan 28 dari 50 desa-kelurahan menggunakan sumber minum dari mata air. Sebagian besar warga desa Lokpri masih

memanfaatkan air minum dari sumber tak terlindung. Tentunya, peningkatan pelayanan air minum dengan menggunakan sumber air terlindung perlu dilakukan pada periode ke depannya.

2. Sementara 11 desa-kelurahan memanfaatkan air yang bersumber dari ledeng dengan meteran untuk minum, mandi, dan mencuci, sembilan desa-kelurahan menggunakan sumber air dari sumur.
3. Hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan jenis penerangan keluarga di desa-kelurahan Lokpri adalah masih adanya jumlah keluarga yang belum menggunakan listrik untuk penerangan. Jumlah desa-kelurahan dengan warga yang menggunakan penerangan bukan listrik tersebar di seluruh lokpri kawasan perbatasan. Jumlah paling sedikit keluarga dengan penerangan tanpa listrik adalah satu sampai dengan lima keluarga, sedangkan jumlah terbanyak keluarga di desa-kelurahan dengan penerangan tanpa listrik adalah 418.
4. Dalam hal pembuangan sampah, sebagian besar keluarga di hampir semua desa/kelurahan Lokpri Kabupaten TTU menggunakan lubang atau pembakaran untuk membuang sampah. Membuang sampah ke dalam tempat sampah untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir belum menjadi pilihan bagi masyarakat Lokpri Perbatasan.
5. Dalam hal penggunaan fasilitas buang air besar (BAB), sebagian besar keluarga di semua desa-kelurahan Lokpri menggunakan jamban sendiri sebagai fasilitas BAB. Namun, sebagian besar keluarga masih menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja, dan tidak menggunakan tangki atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Terdapat delapan desa-kelurahan yang sebagian besar warganya menggunakan IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja, yaitu Desa Noepesu, Suanae, Fatunisian, Noeltoko, Fatutasu, Manusasi, Saenam, Satab, dan Nimasi.
6. Bencana yang kerap terjadi di Lokpri Perbatasan Kabupaten TTU antara lain adalah tanah longsor (Kecamatan Mutis, Miomafo Barat, dan Naibenu), banjir (Kecamatan Insana Utara, Mutis, Bikomi Tengah, dan Naibenu), dan angin puyuh/puting beliung (Miomafo Barat, Insana Utara, Mutis, Naibenu). Banyak desa-kelurahan tertimpa bencana tanah longsor dan kekeringan. Namun, tidak ada korban meninggal dunia sebagai dampak dari kejadian bencana tersebut.
7. Dalam hal fasilitas untuk antisipasi dan mitigasi bencana alam di Lokpri Perbatasan, digambarkan bahwa sistem peringatan dini bencana alam baru ada di desa-kelurahan di Kecamatan Miomafo Barat, sementara perlengkapan keselamatan, termasuk jalur evakuasi, belum tersedia di Lokpri Perbatasan.

#### d. Transportasi-Komunikasi dan Informasi

1. Bentuk-bentuk capaian pembangunan transportasi di desa-kelurahan Lokpri Perbatasan tecermin dari bertambahnya desa-kelurahan Lokpri yang memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat selama sepanjang tahun, yaitu sebanyak 44 desa-kelurahan tahun 2018. Jalan di dua desa, Nainaban dan Oenenu Selatan, sebelumnya hanya dapat dilalui selama musim kemarau, dan saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.
2. Sementara itu, pelayanan angkutan umum di desa/kelurahan Lokpri membaik dibandingkan kondisi pada 2014, dan jumlah desa-kelurahan yang dilalui angkutan umum dengan trayek tetap menjadi 42 desa-kelurahan. Sementara itu, sampai 2018, Desa Satab dan Fatutasu belum dilayani angkutan umum.

3. Pada sektor informasi komunikasi, desa-kelurahan lokpri yang memiliki fasilitas internet di kantor desa-kelurahan bertambah, dari hanya satu desa (Saenam di Kecamatan Miomafo Barat) pada 2014, menjadi empat desa (Naekake A, Nilulat, Napan, dan Oesoko) pada 2018.
4. Sementara itu, dukungan pembangunan komunikasi terpetakan dengan bertambahnya desa/kelurahan yang memiliki BTS (*base transceiver station*) atau menara telepon seluler. Tercatat pada 2018, BTS telah tersebar cukup merata di tiga belas desa Lokpri Perbatasan.

#### 4.2.4 Sosial-Budaya

Kemajuan capaian pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kawasan Perbatasan Kabupaten TTU selama kurun 2014-2018 sudah dapat dilihat, terutama untuk sektor/bidang: pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi.

##### a. Gambaran Umum

1. Kegiatan gotong-royong dilakukan oleh sebagian besar warga di semua desa-kelurahan Lokpri Perbatasan. Kegiatan gotong-royong dilaksanakan bagi kepentingan umum seperti kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, ataupun untuk membantu warga yang mengalami musibah seperti kematian, sakit, ataupun kecelakaan.
2. Lembaga kemasyarakatan desa menjadi indikator lain yang mempengaruhi aspek sosial budaya di Lokpri Perbatasan. Keberadaan lembaga PKK, lembaga kepemudaan, dan lembaga adat menggambarkan kekuatan inklusif dalam pembangunan di Lokpri, seperti peran perempuan dan pemuda yang terlibat di kelompok kerja.
3. Peran perempuan dalam pembangunan di Lokpri Perbatasan tergambarkan melalui keberadaan kelompok PKK di desa-kelurahan. Di setiap desa-kelurahan Lokpri Perbatasan, telah terbentuk minimal satu kelompok PKK.
4. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan di Lokpri Perbatasan tergambarkan dari adanya kelompok kepemudaan seperti Kelompok Karang Taruna, yang sudah terbentuk di setiap desa-kelurahan di Lokpri Perbatasan. Selain keberadaan kelompok-kelompok tersebut, kuatnya budaya asli di Lokpri Perbatasan Kabupaten TTU dapat dikenali dengan keberadaan lembaga adat di setiap desa-kelurahan Lokpri.
5. Banyak warga Kecamatan Insana Utara merupakan eks pengungsi pasca-pemisahan Timor-Leste (1999). Mereka sebelumnya merupakan pendatang yang sebagian berasal dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, dan umumnya bekerja sebagai pedagang (di pasar) atau membuka rumah makan. Kerukunan antarkelompok masyarakat yang majemuk (plural) sangat baik,
6. Di samping itu, karena warga TTU dan Timor-Leste masih satu keluarga atau satu marga, kegiatan lintas batas tidak harus menggunakan aturan yang rumit. Perlintasan bisa dilakukan dengan menggunakan PLB (Pas Lintas Batas) tanpa paspor.
7. Tidak ada kasus narkoba dan *trafficking* di perbatasan Kab. TTU, karena pengaruh kuatnya kekeluargaan antarwarga di perbatasan dua negara. Penyelundupan ilegal pernah terjadi dalam jumlah kecil dan tidak mengarah ke narkoba. Jenis penyelundupan atau pencurian antara lain berupa pencurian kendaraan bermotor dari Indonesia.
8. Ancaman yang muncul di kawasan perbatasan adalah *stunting*, kemiskinan, dan IPM rendah. Intervensi *Stunting* harus dimulai dari pasangan-pasangan muda yang akan menikah, seperti surat layak nikah, pembekalan hidup untuk calon pasangan rumah tangga.

## b. Masalah sosial

1. Masih rendahnya layanan fasilitas pendidikan tingkat menengah di Lokpri Perbatasan Kabupaten TTU, menyebabkan kualitas pendidikan warga berada pada tingkat yang rendah. Berdasarkan hasil interview yang dilakukan, masih banyak warga desa-kelurahan Lokpri yang hanya mengenyam pendidikan sampai pada tingkat SMP saja. Sementara sebagian warga lainnya melanjutkan sekolahnya ke tingkat pendidikan menengah di luar kawasan perbatasan, namun setelah lulus mereka jarang kembali ke kampung halamannya.
2. Terisolasinya beberapa Lokpri Perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan, menyebabkan penyebaran informasi dan teknologi menjadi tertinggal sehingga berdampak kepada keterisolasian kawasan dalam hal informasi dan komunikasi dengan wilayah luar perbatasan.

Temuan lapangan terkait dengan capaian pembangunan sosial dasar di Lokpri Perbatasan Kab. TTU menunjukkan bahwa sebagian besar desa Lokpri Perbatasan masih belum maksimal dalam memanfaatkan atau mengakses fasilitas-fasilitas sosial dasar pada dimensi pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman, ekonomi, dan akses transportasi-informasi-komunikasi. Kondisi ini menunjukkan belum maksimalnya fokus sasaran pengelolaan dan pembangunan kesejahteraan di Kawasan Lokpri Perbatasan Kabupaten TTU, terkait dengan keseimbangan antara pembangunan kesejahteraan dengan pembangunan pertahanan keamanan.

## 4.2.6 Kelembagaan: Koordinasi

Dalam hal koordinasi perencanaan dan penganggaran bagi pembangunan di Lokpri Kawasan Perbatasan Kabupaten TTU, Provinsi NTT, dapat dikumpulkan informasi berikut ini:

1. Terkait kegiatan penyusunan rencana pengelolaan dan pembangunan di Kawasan Perbatasan di Kabupaten TTU, proses penyampaian usulan dari bawah mengikuti sistem perencanaan nasional. Pada tahap awal, usulan disampaikan di Musrenbang Desa. Usulan atau rencana kegiatan dengan skala yang tidak dapat dibiayai Dana Desa, dinaikkan ke Musrenbang Kecamatan atau dapat naik sampai ke tingkat kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Sejalan dengan itu, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) akan membawa aspirasi warga kawasan perbatasan dari kecamatan dan daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada BNPP, yaitu melalui proses penyusunan Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi). Beberapa usulan yang disampaikan melalui BNPP sudah diimplementasikan oleh K/L bersama BNPP di perbatasan Kabupaten TTU.
2. Untuk mendukung rencana dan usulan-usulan tersebut, BPPD setiap tahun menyiapkan dan memperbarui Profil Kawasan Perbatasan, yang merupakan kumpulan data pendukung perencanaan, baik dalam bentuk data infrastruktur fisik maupun potensi pendukung ekonomi kawasan perbatasan.
3. BPPD berperan sebagai semacam *clearing house* atau pengatur dan bukan implementator pembangunan perbatasan. Usulan-usulan yang diteruskan oleh BPPD mencakup usulan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Usulan yang dibiayai APBD kabupaten disampaikan ke Bappeda dan OPD teknis terkait.
4. Pada tingkat provinsi, usulan-usulan dari Lokpri Perbatasan masuk ke forum Musrenbang. Namun, di samping itu ada pula forum/rapat koordinasi antara provinsi dan kabupaten perbatasan, untuk mengusulkan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan, yang mencakup usulan kegiatan pembangunan bidang pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

5. Sebagai tambahan, saat ini DPD meminta agar semua usulan pembangunan diketahui pula oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga DPD dapat mendukung dan memperjuangkan usulan tersebut ke instansi di tingkat nasional, termasuk Bappenas.
6. Seperti umumnya di daerah lain, proses perencanaan pembangunan di NTT sudah berbasis digital dan menggunakan *e-planning* KRISNA.
7. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat di kawasan Lokpri Perbatasan, setiap kegiatan atau usulan dari kecamatan memperoleh dukungan koordinasi dan dikawal oleh BPPD. Biasanya, pada saat kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan, BPPD dan OPD memberi pandangan tentang rencana kabupaten yang terkait kawasan perbatasan sebagai bahan pertimbangan dalam pemanfaatan dana desa, agar mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat Lokpri Perbatasan. Semua dilakukan dengan mengikuti regulasi dan memanfaatkan peluang tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Sementara itu, dalam hal koordinasi di tingkat provinsi (Nusa Tenggara Timur), diperoleh informasi sebagai berikut terkait dengan pengelolaan perbatasan (di Kabupaten TTU):

1. Sebagaimana disampaikan oleh pejabat di BPPD Provinsi, panjang jalan di NTT adalah 2.650 km, dengan sekitar 1.000 km rusak yang 583,46 km nya merupakan jalan di 12 kabupaten perbatasan. Keterbatasan infrastruktur jalan tersebut menyebabkan kawasan perbatasan relatif terisolasi.
2. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah provinsi, dengan dukungan BPPD, dalam rencana pembangunan dan perbaikan jalan regional ini, antara lain:
  - a. Menggunakan pinjaman daerah, sejauh yang diizinkan oleh Kemendagri;
  - b. Mengajukan permohonan diskresi kepada presiden, agar dengan “surat diskresi” itu, Kementerian PUPR dapat melaksanakan perbaikan dan pembangunan jalan di kawasan perbatasan.
3. Proses permohonan Diskresi diawali dari surat permohonan gubernur kepada presiden yang meminta Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Provinsi NTT. Selanjutnya, diharapkan Presiden dapat menugaskan Menteri PUPR untuk menindaklanjuti dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan NTT. Surat Diskresi menjadi salah satu harapan untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
4. Dalam kasus strategis seperti Lokpri Perbatasan, afirmasi melalui pembuatan “surat diskresi” bisa menjadi salah satu cara mempercepat pembangunan di perbatasan. Oleh karena itu, BPPD Provinsi memohon dukungan BNPP untuk membantu mempercepat proses realisasi surat diskresi dari NTT kepada Presiden untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur (jalan) di kawasan perbatasan.
5. Pada rapat koordinasi (Rakor) Perbatasan tingkat provinsi yang membahas perbatasan, semua kabupaten perbatasan dan lokpri turut diundang dan hadir. Rakor dilaksanakan untuk memantau perkembangan pembangunan (fisik) di kawasan lokpri termasuk sumber-sumber pendanaan yang masuk ke setiap lokpri tersebut.
6. Pada rakor perbatasan itu, capaian pelaksanaan pembangunan di setiap Lokpri akan dievaluasi. Apabila ada rencana kerja yang belum direalisasikan, lokpri akan diminta untuk mengusulkan kembali ke dalam Renaksi BNPP. Khusus untuk Kabupaten TTU, hingga saat ini sudah ada beberapa hasil usulan yang disampaikan BPPD ke BNPP yang diimplementasikan oleh K/L melalui BNPP di Perbatasan Kabupaten TTU.

7. Untuk mendukung rencana/usulan, data usulan dan laporan yang digunakan di pembangunan kawasan perbatasan NTT adalah data yang bersumber dari kecamatan yang kemudian diverifikasi ulang oleh BPPD provinsi untuk ketepatan informasinya. Data ini pula yang digunakan dalam *monitoring* dan evaluasi.
8. Selain itu, untuk memahami kebutuhan warga perbatasan, setahun sekali Provinsi NTT mengadakan dialog gubernur dengan masyarakat kawasan perbatasan. Untuk 2020, acara dialog gubernur dengan masyarakat perbatasan di Kabupaten Malaka direncanakan dihadiri oleh ribuan orang anggota masyarakat kawasan Lokpri Perbatasan.
9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan Lokpri Perbatasan masih dapat diperkuat karena (BPPD) Pemerintah Kabupaten TTU siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan dukungan informasi akurat melalui pembaruan periodic Profil Kawasan Perbatasan TTU. Dengan demikian, rencana dan implementasi pembangunan kesejahteraan di Lokpri Perbatasan Kab. TTU dapat lebih tepat sasaran.
10. Kondisi tersebut juga menyingkap permasalahan belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan kebijakan dan program di antara kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), khususnya untuk program-program perbatasan yang secara sektoral menjadi tanggung jawab K/L, pemerintah daerah, dan non-pemerintah.
11. Persoalan koordinasi implementasi pembangunan di tingkat nasional antara BNPP, Kemenko PMK, Bappenas, dan K/L terkait perlu disinergikan dengan dengan koordinasi pengelolaan dan pembangunan pada tingkat kabupaten hingga kecamatan (Lokpri).

## 4.2.7 Kelembagaan: Penguatan Kapasitas

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) berperan penting dalam pengelolaan Lokpri Perbatasan di Kabupaten TTU. BPPD Kabupaten TTU menyampaikan bahwa:

1. Pengelolaan perbatasan di NTT dilaksanakan oleh BPPD Provinsi NTT dan BPPD kabupaten, yang menjadi lebih kuat posisinya sejalan dengan amanat Permendagri 140 tahun 2017 tentang Pembentukan BPP Daerah.
2. Peran BPPD adalah dalam hal koordinasi, seperti dalam perencanaan dan pengusulan kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk penyediaan data teknis. Sementara itu, anggaran kegiatan dialokasikan oleh OPD terkait. Perencanaan dan usulan ke pusat dilakukan BPPD dan disampaikan ke BNPP untuk dikoordinasikan dengan K/L terkait. Dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, BPPD terlibat dalam melakukan koordinasi kegiatan dan memantau pembangunannya.
3. Pelaksanaan kegiatan BPPD sempat terganggu karena setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BPPD sempat mengalami perubahan status dari Badan menjadi Bagian di Setda. BPPD kembali menjadi Badan berdasarkan Permendagri 140/2017 tentang BPPD, sementara posisi BPPD Kabupaten TTU saat ini telah diperkuat dengan Perda BPPD Kabupaten TTU tahun 2019.
4. Hubungan dan koordinasi kerja antara BPPD dan Bappeda serta kecamatan berjalan baik. BPPD punya anggaran untuk kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
5. Kabupaten Sabu Rajua memiliki jumlah Lokpri paling sedikit, yaitu dua Lokpri, sehingga sampai saat ini koordinasi masih di bawah Dinas Infokom. Diharapkan dapat dibentuk BPPD tipe C untuk memudahkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan.

## 4.2.9 Catatan Simpulan

Kesimpulan dari diskusi, wawancara, dan kunjungan lapangan di Kabupaten (Perbatasan) Timor Tengah Utara antara lain:

1. Tujuh Kecamatan Lokpri di Kabupaten TTU berperan dalam mengelola administrasi dan melakukan koordinasi program/kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan kelompok perempuan;
2. Kemandirian Lokpri (kecamatan perbatasan) dalam pembangunan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masih belum dapat diwujudkan, dan masih harus dilakukan dengan mempertimbangkan peran kabupaten. Semua Lokpri, sebagaimana kecamatan perbatasan pada umumnya, masih belum bisa mandiri tanpa dukungan kabupaten (dengan OPD teknisnya);
3. Pembangunan prasarana, sarana ekonomi, dan pelayanan publik (seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial) masih harus didukung oleh dinas, organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten, provinsi, dan K/L tingkat nasional. Dukungan pelayanan pendidikan tingkat menengah masih perlu ditingkatkan di Lokpri-Lokpri Kabupaten TTU guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat,
4. Pada kenyataannya, dukungan K/L (DAK afirmasi), provinsi, dan kabupaten tetap berjalan. Lokpri di Kabupaten TTU juga memberikan perhatian penuh pada masalah perbatasan (infrastruktur dan ekonomi), termasuk dengan bekerja sama dengan pihak hankam (TNI, Polri). Namun, perlu diantisipasi kendala/tantangan seperti masalah koordinasi dan kewenangan yang kadang berubah;
5. Pesan yang dititipkan dan digaribawahi oleh pihak BPPD adalah tentang bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan TTU dapat segera direalisasikan melalui dukungan afirmasi pembangunan perbatasan di NTT, yang telah diupayakan melalui penyampaian "Surat Diskresi" permohonan percepatan pembangunan perbatasan di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten TTU.
6. Inovasi Desa melalui pemanfaatan Dana Desa telah dilakukan bagi beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan layanan Posyandu. Inovasi lain terlihat pada usaha warga desa dalam Lokpri, yang didorong untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lokal seperti produksi hasil-hasil kerajinan tenun dan anyaman.
7. Pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan, selain melalui penguatan Lokpri, juga perlu didukung dan dipadukan dengan program/kegiatan pembangunan pada tingkat kabupaten, karena otonomi, kewenangan pembangunan, serta keputusan anggaran ada pada tingkat pemerintah kabupaten.



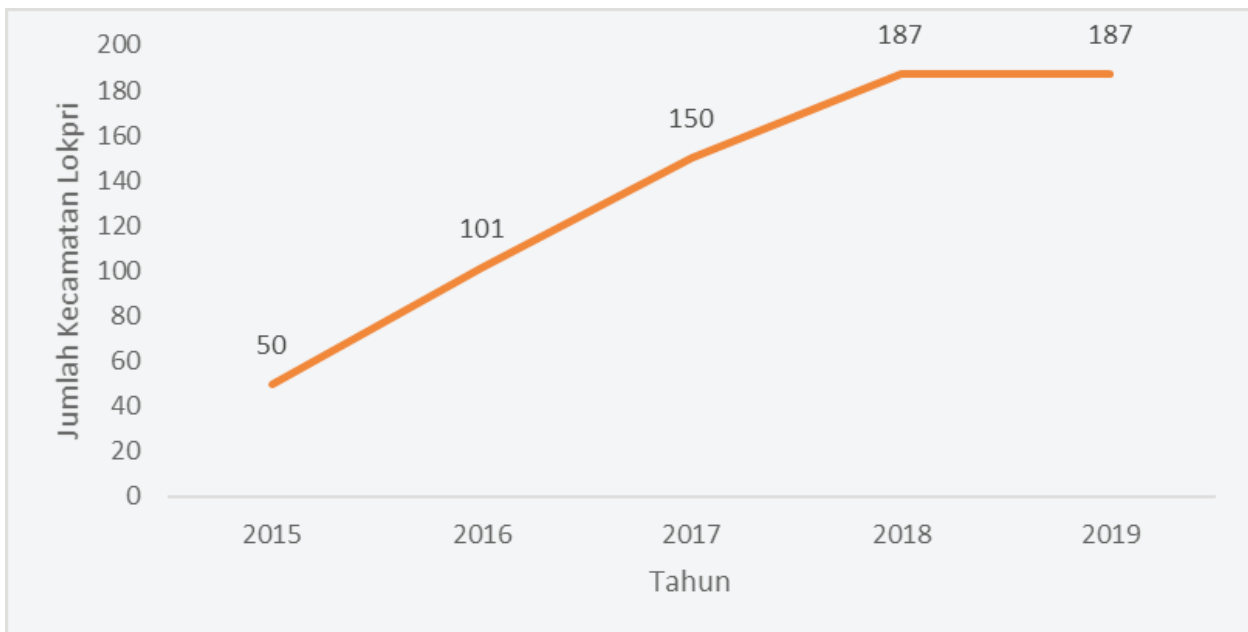
8. Koordinasi tingkat nasional antara BNPP, Kemenko PMK, Bappenas, dan K/L terkait perlu diimbangi dengan koordinasi pengelolaan dan pembangunan pada tingkat kabupaten hingga kecamatan (Lokpri). Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan kebijakan dan program di antara kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian (L/K), khususnya untuk program-program perbatasan yang secara sektoral menjadi tanggung jawab K/L, pemerintah daerah, dan non-pemerintah.

### 4.3 Analisis Tambahan: Kondisi Umum Lokasi Prioritas di Indonesia

#### Jumlah Kecamatan Lokpri di Indonesia

Jumlah kecamatan Lokpri di Indonesia di setiap provinsi sangat beragam. Secara umum, dalam jangka waktu empat tahun terjadi penambahan kecamatan Lokpri seperti digambarkan pada Grafik 4.1 berikut ini. Pada 2015, terdapat 50 kecamatan Lokpri. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan konsisten: pada 2016, terdapat 101 kecamatan Lokpri; 2017, 150 kecamatan; dan 2018, 187 kecamatan. Peningkatan kecamatan Lokpri di Indonesia dapat menggambarkan betapa pemerintah memberikan fokus pada daerah Lokpri, khususnya kecamatan

Grafik 4.1  
Jumlah Kecamatan Lokpri



(sumber: Kemenko PMK, 2019. diolah)

Namun, seperti telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan tersebut tidak merata di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Tabel berikut ini menunjukkan angka spesifik mengenai peningkatan jumlah kecamatan Lokpri pada tingkat provinsi dan kabupaten. Dari Tabel 4.1 dapat dilihat ketidakmerataan jumlah kecamatan Lokpri di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Papua Barat, yang hanya memiliki 1persen dari total kecamatan Lokpri di Indonesia. Terlebih lagi, ketiga provinsi tersebut juga tidak menunjukkan perubahan signifikan terkait jumlah kecamatan Lokpri di kawasanya. Ketidakmerataan jumlah kecamatan Lokpri ini juga dipengaruhi oleh banyaknya kawasan perbatasan di Provinsi.

**Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri**  
dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

Tabel 4.1 Jumlah kecamatan Lokpri berdasarkan provinsi

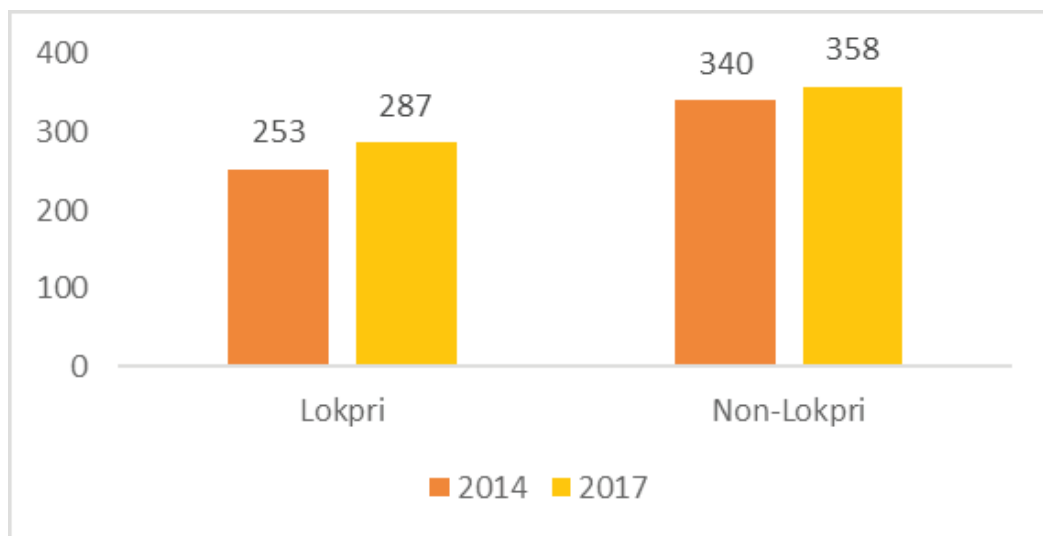
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	Lokpri per Provinsi (persen[%])
Aceh	0	0	0	1	1	1
Kalimantan Barat	5	8	10	11	11	6
Kalimantan Timur	2	3	3	3	3	2
Kalimantan Utara	9	10	15	15	15	8
Kep. Riau	2	15	26	41	41	22
Maluku	3	10	16	19	19	10
Maluku Utara	2	3	4	5	5	3
Nusa Tenggara Timur	13	18	28	31	31	17
Papua	6	14	21	29	29	16
Papua Barat	0	1	2	2	2	1
Riau	4	13	18	22	22	12
Sulawesi Utara	3	5	6	7	7	4
Sumatra Utara	1	1	1	1	1	1
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>101</b>	<b>150</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	

(sumber: Kemenko PMK, 2019. diolah)

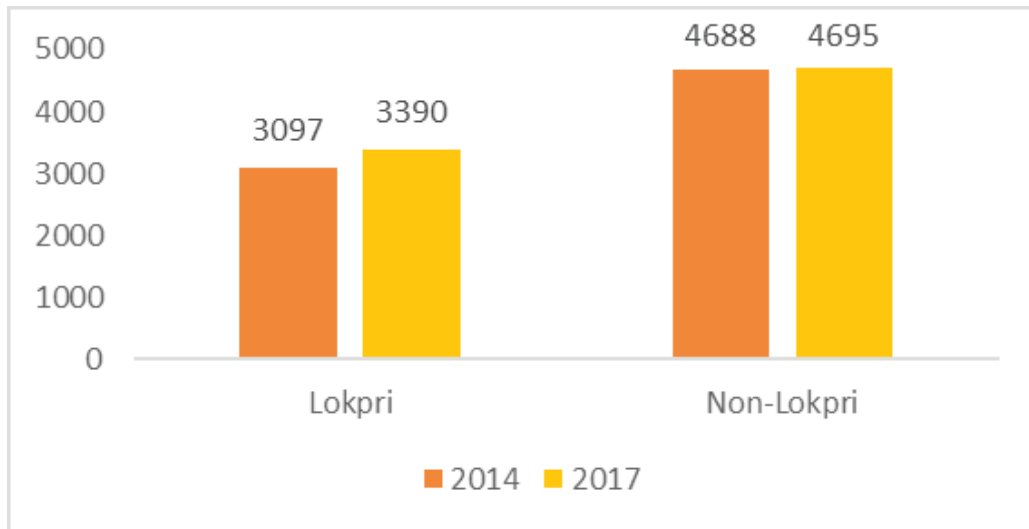
**Jumlah Rumah Tangga dan Desa di Kecamatan Lokpri**

Analisis deskriptif menunjukkan latar belakang daerah berdasarkan jumlah rumah tangga dan desa di kecamatan. Grafik 4.2 dan 4.3 menunjukkan rata-rata jumlah rumah tangga di desa dan kecamatan dalam wilayah perbatasan, dibandingkan berdasarkan Kecamatan Lokpri dan non-Lokpri. Rata-rata jumlah rumah tangga di desa dan kecamatan mengalami kenaikan para kurun waktu 2014 - 2017. Hal tersebut konsisten pada tingkat desa dan kecamatan. Data tersebut juga menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga yang masuk ke dalam Lokpri, yaitu dari 253 menjadi 340 rumah tangga pada tingkat desa, dan dari 3097 menjadi 3390 rumah tangga pada tingkat kecamatan.

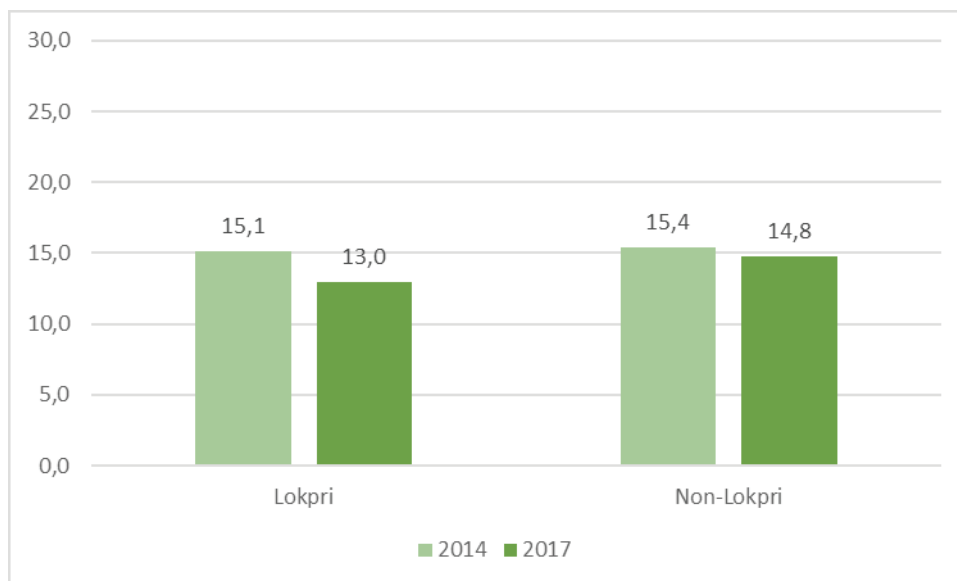
Grafik 4.2  
Rata-rata jumlah rumah tangga di desa



Grafik 4.3  
Rata-rata jumlah rumah tangga di kecamatan



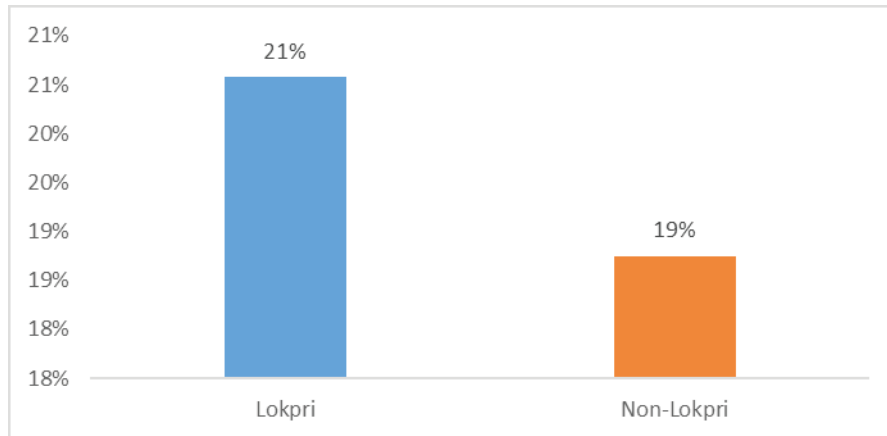
Grafik 4.4  
Rata-rata jumlah desa di satu kecamatan



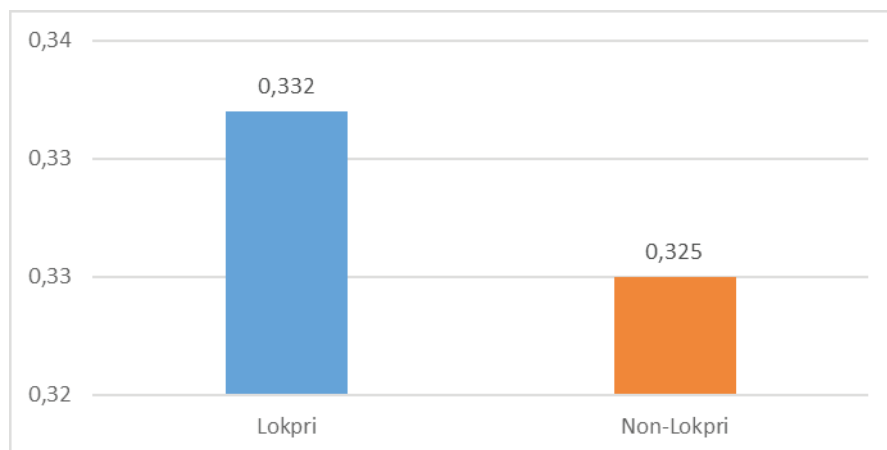
Grafik 4.4 menunjukkan rata-rata jumlah desa di satu kecamatan dari 2014 ke 2017. Ditemukan bahwa terdapat penurunan jumlah desa di Kecamatan Lokpri dan non-Lokpri pada 2017. Pada 2014, rata-rata jumlah desa Lokpri di satu kecamatan adalah sebanyak 15 desa, dan menurun menjadi 12 desa pada 2017. Hal yang sama juga terjadi pada desa Non-Lokpri, dengan 15 desa pada 2014, dan menurun menjadi 14 desa pada 2017. Penurunan jumlah desa berdasarkan jenis kecamatan ini diindikasikan terjadi akibat penambahan jumlah kecamatan hingga 2017.

## Tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Kecamatan Lokpri

Grafik 4.5  
**Persentase masyarakat miskin**



Grafik 4.6  
**Indeks Gini**



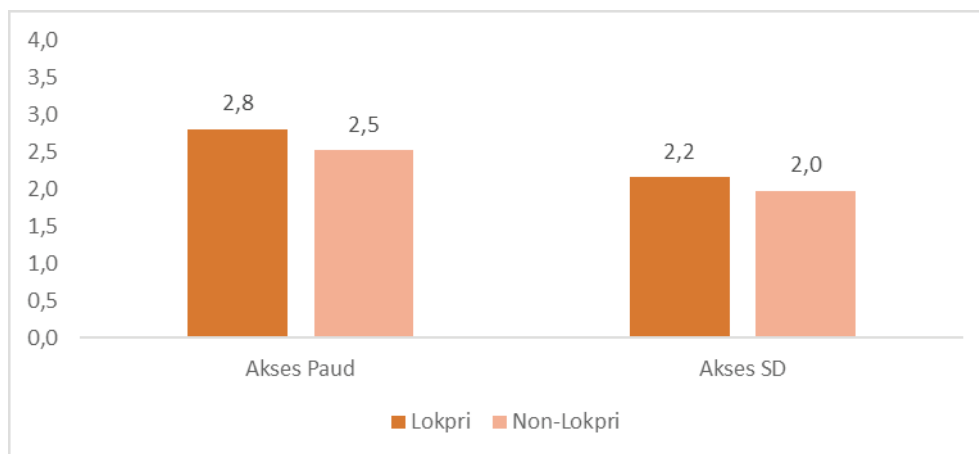
Penentuan kecamatan prioritas bertujuan agar wilayah tersebut dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan potensinya. Salah satu indikator perbandingan lain dalam hal latar belakang wilayah berdasarkan jenis kecamatan adalah persentase masyarakat miskin dan ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini. Berdasarkan data 2015 dari Peta Kemiskinan Smeru, persentase masyarakat miskin dan Indeks Gini pada kecamatan terkait ditunjukkan pada dua grafik di atas, yaitu Grafik 4.5 dan Grafik 4.6. Terlihat bahwa kecamatan Lokpri memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa Non-Lokpri. Persentase kemiskinan di Lokpri mencapai 21 persen dan dengan skor indeks gini mencapai 0,332; lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan Non-Lokpri, dengan skor berturut-turut 19 persen dan 0,325. Hal ini menunjukkan secara singkat bahwa Kecamatan Lokpri memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Non-Lokpri.

## Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Lembaga Keuangan di Kecamatan Lokpri

Terakhir, analisis terhadap kondisi akses pendidikan, kesehatan, dan lembaga keuangan juga dibutuhkan untuk melihat latar belakang daerah berdasarkan jenis kecamatannya. Untuk indikator akses pendidikan, terdapat dua variabel, yaitu: (1) Sulitnya masyarakat mencapai sarana PAUD terdekat; dan (2) Sulitnya masyarakat mencapai sarana Sekolah Dasar terdekat. Terkait indikator akses kesehatan, juga terdapat tiga variabel: (1) Sulitnya masyarakat mencapai sarana Rumah Sakit terdekat; (2) Sulitnya masyarakat mencapai sarana Puskesmas rawat inap terdekat; dan (3) Sulitnya masyarakat mencapai sarana Puskesmas Pembantu terdekat. Sedangkan untuk akses lembaga keuangan, terdapat tiga variabel yang mampu menjelaskan kondisi tersebut: (1) Sulitnya masyarakat mencapai sarana bank pemerintah terdekat; (2) Sulitnya masyarakat mencapai sarana bank swasta terdekat; dan (3) Sulitnya masyarakat mencapai sarana BPR terdekat.

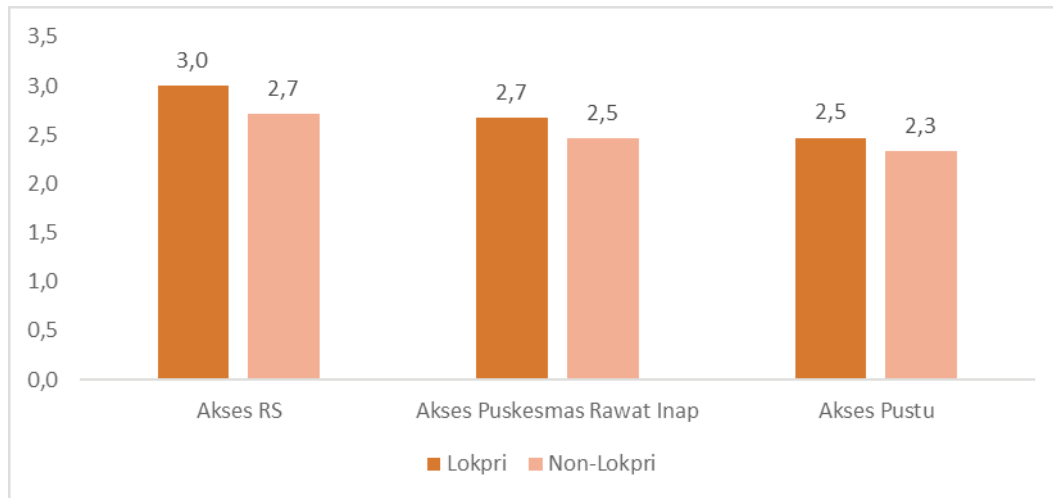
Grafik 4.7

**Tingkat kesulitan akses pendidikan (skala 1-4; 4 tersulit) tahun 2017**



Berdasarkan gambaran dari Grafik 4.7, secara umum akses pendidikan pada Lokpri memiliki skala kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Non-Lokpri. Kesulitan akses terjadi baik dalam hal PAUD maupun sekolah dasar. Kesulitan akses terhadap PAUD lebih tinggi di Lokpri dengan skor sebesar 2,8, dibandingkan dengan kecamatan non-Lokpri dengan skor hanya 2,5. Terkait akses terhadap sekolah dasar, kecamatan Lokpri juga memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan non-Lokpri, dengan skor sebesar 2,2 untuk kecamatan Lokpri dan 2,0 untuk kecamatan non-Lokpri. Hasil tersebut menggambarkan bahwa masyarakat di kecamatan Lokpri lebih sulit mendapatkan akses terhadap pendidikan dibandingkan masyarakat di wilayah kecamatan Non-Lokpri

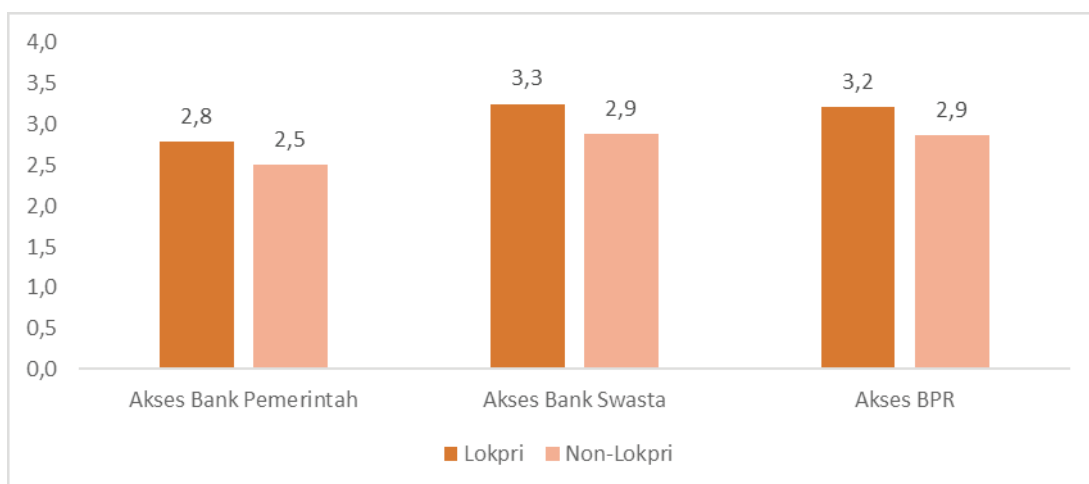
Grafik 4.8  
**Tingkat kesulitan akses kesehatan (skala 1-4, 4 tersulit) tahun 2014**



Dari segi akses kesehatan, Grafik 4.8 menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan akses pendidikan. Kecamatan Lokpri juga memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan non-Lokpri dalam hal semua jenis akses terhadap pelayanan kesehatan seperti RS, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Skor tingkat kesulitan akses Kecamatan Lokpri untuk ketiga indikator adalah, berturut-turut, 3,0; 2,7; dan 2,5; lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Non-Lokpri yang masing-masing sebesar 2,7; 2,5; dan 2,3. Hasil di atas juga menjelaskan bahwa masyarakat di Kecamatan Lokpri relatif lebih sulit mendapatkan akses terhadap kesehatan dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Non-Lokpri.

Grafik 9 menjelaskan tingkat kesulitan masyarakat untuk mendapatkan akses ke beberapa jenis lembaga keuangan.

Grafik 4.9  
**Tingkat kesulitan akses lembaga keuangan (Skala 1-4, 4 tersulit) tahun 2017**



Berdasarkan grafik tersebut, daerah-daerah di kecamatan Lokpri secara konsisten memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk mengakses semua jenis lembaga keuangan. Dalam hal akses ke bank pemerintah, skor kesulitan di Lokpri lebih tinggi sebesar 0,29 poin; ke bank swasta, lebih tinggi 0,37 poin; dan ke BPR, lebih tinggi sebesar 0,35 poin. Kesimpulannya, masyarakat di daerah Lokpri cenderung lebih sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan.

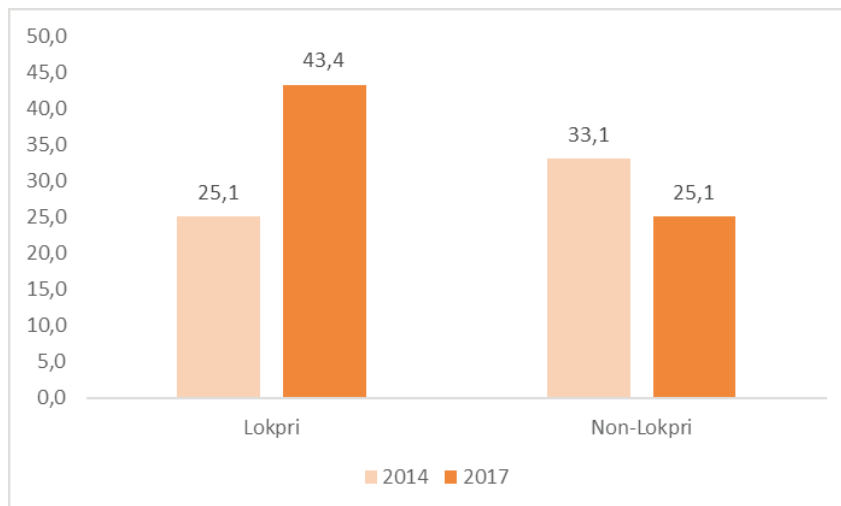
Berbagai macam perbedaan kondisi wilayah yang ada dari kecamatan Lokpri dan non-Lokpri berkontribusi mempersulit pembangunan dan perkembangan kecamatan Lokpri secara keseluruhan. Padahal, kecamatan Lokpri menjadi wilayah fokus pengembangan dibandingkan dengan kecamatan non-Lokpri. Kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya berkontribusi menghambat pembangunan kecamatan Lokpri, seperti sulitnya akses masyarakat di kecamatan Lokpri ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lembaga keuangan. Hal ini menjadi lebih kompleks dengan tingginya persentase masyarakat miskin dan ketimpangan pendapatan di wilayah kecamatan Lokpri.

Setelah penambahan wilayah kecamatan Lokpri dari 2015 serta pemusatan perhatian pemerintah untuk pengembangan kawasan perbatasan terutama Lokpri,<sup>1</sup> diharapkan pengelolaan di wilayah tersebut memberikan dampak lebih tinggi dan masif dibandingkan dengan kecamatan non-Lokpri. Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan kondisi kecamatan Lokpri dan non-Lokpri menurut berbagai indikator yang diindikasikan berkontribusi terhadap capaian pembangunan dan pengembangan kecamatan Lokpri yang ditargetkan pemerintah. Kontribusi tersebut dapat menghambat ataupun mempercepat pembangunan yang ada. Untuk melihat capaian dari indikator tersebut, pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai analisis kuantitatif secara deskriptif dan menggunakan model empiris.

### 4.3.1 Analisis Deskriptif Perubahan Kondisi Sosio-ekonomi

#### Peluang Pekerjaan

Grafik 4.10  
Rata-rata jumlah TKI dari desa



Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dapat menjadi proksi peluang pekerjaan pada indikator pembangunan. Berdasarkan Grafik 4.10, pada 2014 jumlah TKI di kecamatan Lokpri lebih kecil dibandingkan dengan kecamatan Non-Lokpri. Meski begitu, pada 2017 terjadi peningkatan yang cukup besar pada jumlah TKI di kecamatan Lokpri, menjadi rata-rata 43 orang per desa, lebih besar dibandingkan dengan jumlah TKI di kecamatan non-Lokpri yang mengalami

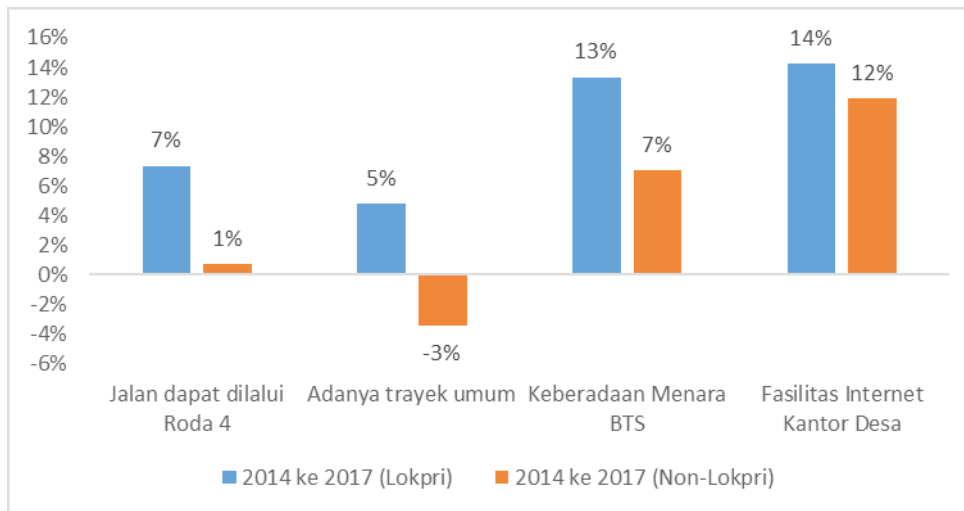
<sup>1</sup> Pemusatan perhatian yang dimaksud adalah dengan membuat Pusat Kegiatan Strategis Nasional di beberapa kabupaten yang memiliki perbatasan darat dan laut. (<https://setkab.go.id/bnpp-fokus-tangani-187-kecamatan-perbatasan-di-13-provinsi/>)

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

penurunan sebesar 33 orang per desa pada 2014, menjadi 25 orang per desa pada 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa kecamatan Lokpri belum mampu meningkatkan peluang pekerjaan bagi warganya.

### Transportasi dan Informasi

Grafik 4.11  
Selisih perubahan indikator transportasi dan informasi



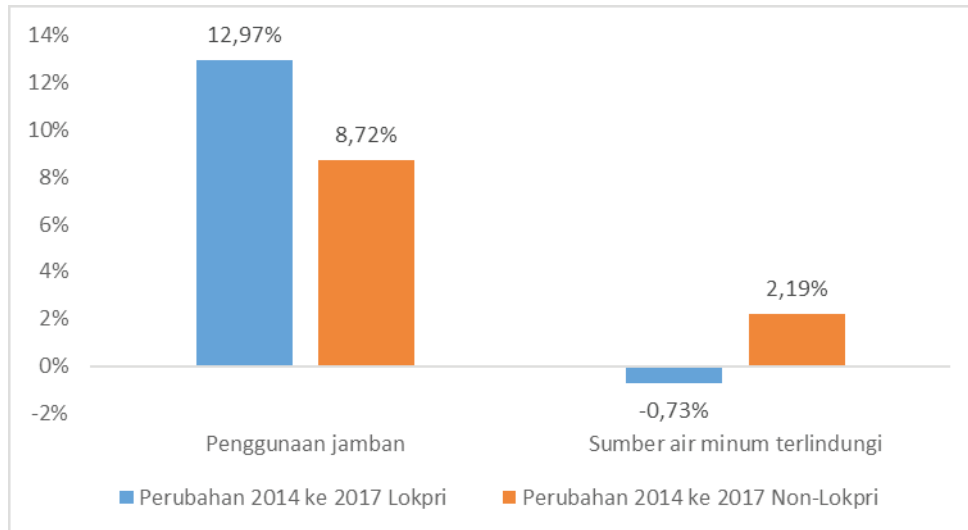
Transportasi dan informasi juga menjadi salah satu indikator pembangunan dan pengembangan di Kecamatan Lokpri. Indikator transportasi dan informasi dibagi atas beberapa komponen, yaitu jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4, adanya trayek angkutan umum, keberadaan menara BTS, dan fasilitas internet di kantor desa. Grafik 4.11 menunjukkan bahwa Kecamatan Lokpri memiliki peningkatan pada semua komponen yang menjadi proksi transportasi dan informasi. Peningkatan tertinggi, sebesar 14 persen, terjadi pada komponen fasilitas internet di kantor desa, diikuti oleh peningkatan persentase desa di Kecamatan Lokpri yang memiliki menara BTS, jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4, dan keberadaan trayek angkutan umum. Peningkatan tersebut lebih besar daripada perubahan indikator transportasi dan informasi di kecamatan non-Lokpri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, dibandingkan dengan kecamatan non-Lokpri, wilayah kecamatan Lokpri mengalami peningkatan yang lebih tinggi pada indikator transportasi dan informasi.



## Infrastruktur

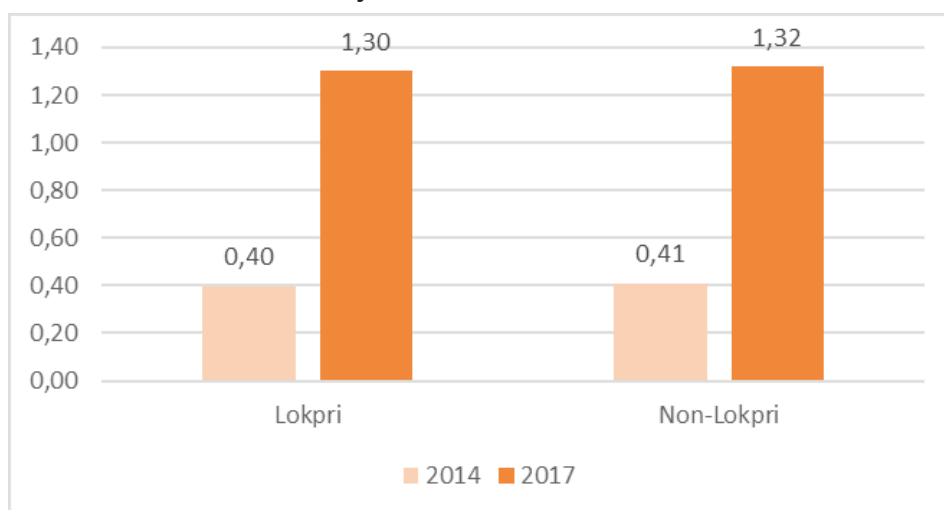
Grafik 4.12  
Selisih perubahan indikator infrastruktur



Indikator keberhasilan infrastruktur dinilai dari dua hal, yaitu desa yang sebagian besar rumah tangganya menggunakan (1) fasilitas jamban dan (2) air minum dari sumber terlindungi. Terkait Indikator ini, daerah kecamatan Lokpri memiliki tingkat kenaikan yang lebih tinggi dalam hal penggunaan jamban dibandingkan dengan non-Lokpri. Sedangkan mengenai sumber air minum, kecamatan Lokpri justru mengalami penurunan dari 2014 ke 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa kecamatan Lokpri belum mampu meningkatkan penggunaan sumber air minum yang berasal dari sumber terlindungi agar kesehatan masyarakat dapat terjamin.

## Pendidikan

Grafik 4.13  
Rata-rata jumlah sekolah dasar di desa



Terdapat tiga ukuran dalam indikator pendidikan, yaitu sulitnya akses ke PAUD, ke SD, serta rata-rata jumlah SD di desa. Pada 2017, kecamatan Lokpri lebih sulit memperoleh akses ke pelayanan Pendidikan dibandingkan dengan kecamatan non-Lokpri. Namun, ketiadaan data

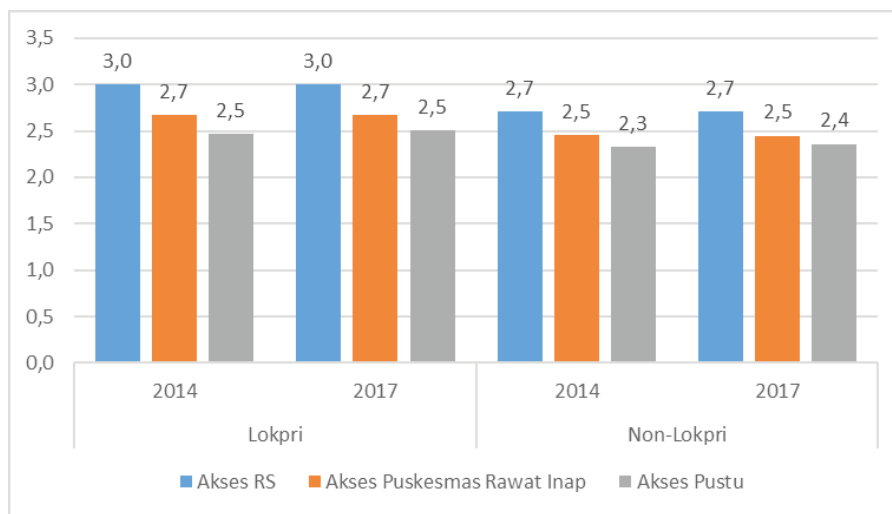
## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

mengenai kondisi kemudahan akses ke Sekolah Dasar dan PAUD pada 2014 membuat analisis terhadap indikator tersebut tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, analisis hanya dilakukan pada rata-rata jumlah SD di desa, yang juga mampu menjelaskan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan.

Desa di kecamatan Lokpri mengalami kenaikan yang cukup besar dalam hal rata-rata jumlah SD per desa, yaitu dari 0,4 menjadi 1,3. Namun, angka tersebut masih relatif sama dengan rata-rata jumlah SD di kecamatan non-Lokpri, sehingga dapat dikatakan bahwa kecamatan Lokpri belum memiliki performa pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan non-Lokpri.

## Kesehatan

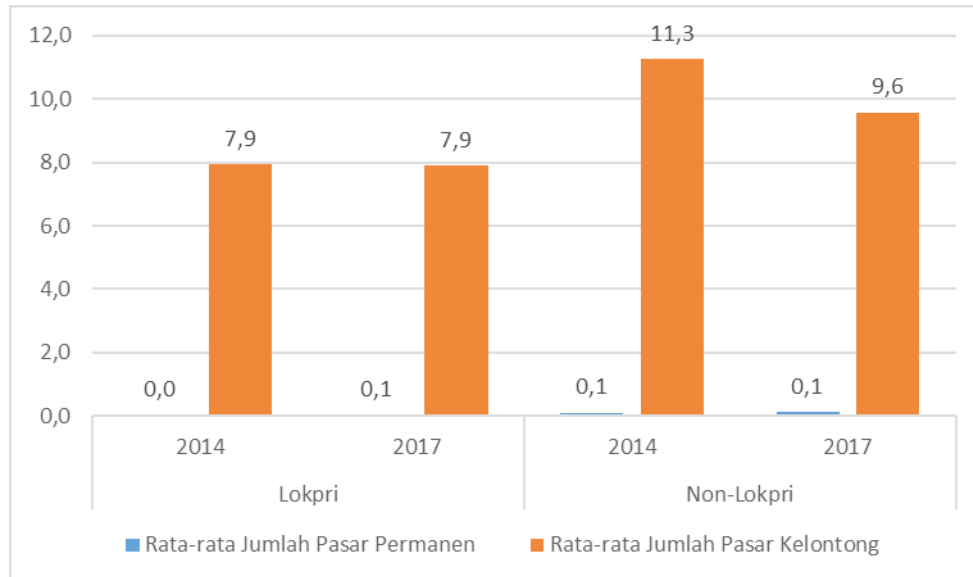
Grafik 4.14  
Tingkat kesulitan akses kesehatan (Skala 1-4, 4 tersulit)



Ada tiga hal yang dijadikan ukuran keberhasilan dalam indikator kesehatan, yaitu tingkat kesulitan untuk mengakses (1) rumah sakit, (2) puskesmas rawat inap, dan (3) pustu. Grafik 4.14 menggambarkan perbandingan kondisi akses kesehatan pada 2014 dan 2017. Dibandingkan dengan kecamatan non-Lokpri, akses ke fasilitas kesehatan lebih sulit diperoleh di kecamatan Lokpri, diukur dari tingginya skor rata-rata kesulitan akses ke pelayanan kesehatan. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa dari 2014 ke 2017 tidak ada perubahan dalam hal kesulitan memperoleh akses ke pelayanan kesehatan, baik di kecamatan Lokpri maupun non-Lokpri, kecuali dalam hal Pustu, yang justru makin sulit diakses pada 2017. Dengan kata lain, kecamatan Lokpri masih belum mengalami perbaikan dalam hal akses kesehatan bagi warganya.

## Aktivitas Ekonomi

Grafik 4.15  
Indikator aktivitas ekonomi



Jumlah pasar permanen dan pasar kelontong di satu desa menjadi tolok ukur untuk keaktifan kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan Grafik 4.15, kecamatan Lokpri memiliki jumlah pasar permanen yang masih rendah, dengan rata-rata jumlah pasar permanen per desa tidak mencapai 1. Namun, angka tersebut relatif serupa dengan angka di kecamatan non-Lokpri. Sementara itu, jumlah toko kelontong di kecamatan Lokpri (rata-rata 8 toko per desa) lebih sedikit daripada di kecamatan non-Lokpri (rata-rata 11 toko per desa). Dari 2014 ke 2017, terdapat kenaikan yang tidak signifikan pada angka rata-rata jumlah pasar permanen di kecamatan Lokpri (0,03) dan di kecamatan non-Lokpri (0,01). Sedangkan dalam hal jumlah rata-rata pasar kelontong, tidak terjadi perubahan pada Kecamatan Lokpri, namun terjadi penurunan yang cukup besar (2 poin) pada kecamatan non-Lokpri. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Lokpri belum meningkatkan aktivitas perekonomiannya secara signifikan.

Berdasarkan hasil deskriptif semua indikator capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 2017, kecamatan Lokpri masih belum memiliki kondisi atau pembangunan yang lebih baik dibandingkan kecamatan non-Lokpri pada tahun yang sama, meski beberapa indikator telah mengalami perbaikan dibandingkan dengan kondisi pada 2014, seperti jumlah sekolah dasar, sarana transportasi dan informasi, dan infrastruktur. Diperlukan analisis mendalam dalam bentuk analisis empiris untuk menelaah pengaruh penentuan kecamatan Lokpri sebagai fokus peningkatan pembangunan pemerintah terhadap pengembangan pengelolaan di wilayah tersebut.

## 4.3.2 Analisis Empiris Perubahan Kondisi Sosio-ekonomi

### *Double differences: Performa Pembangunan Kecamatan Lokpri pada 2017*

Untuk menelaah perbedaan kondisi beberapa indikator capaian di daerah kecamatan Lokpri dan non-Lokpri, dibutuhkan analisis metode kuantitatif dengan menggunakan model empiris untuk mengetahui apakah penentuan kecamatan Lokpri dan pengelolaan yang lebih dibandingkan kecamatan non-Lokpri dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan kondisi di daerah tersebut. Metode ekonometrika yang digunakan untuk menghitung pengaruh penerapan Lokpri terhadap perubahan kondisi daerah tersebut menggunakan metode *Difference in Differences* atau DID.

Metode DID merupakan metode ekonometrika yang membandingkan perubahan hasil (*outcome*) antara sampel yang mendapatkan perlakuan/menerima program, dalam rentang waktu selama satu tahun atau lebih. Selain itu, metode DID juga memperhatikan kondisi *outcome* sebelum dan sesudah mendapatkan program. Dengan demikian, metode DID dapat memperhitungkan seberapa besar perubahan *outcomes* yang dihasilkan dari suatu program.

Pada analisis ini, variabel DID yang digunakan adalah daerah yang menjadi kecamatan Lokpri pada 2017, untuk melihat bagaimana daerah yang ditentukan sebagai kecamatan Lokpri pada 2017 dapat berkembang lebih baik dan pesat dibandingkan dengan daerah lainnya. Dibentuk dua persamaan yang dianalisis menggunakan model DID. Perbedaan kedua persamaan tersebut hanya pada variabel independen yang menjadi proksi hubungan masyarakat di suatu daerah dan kondisi kesehatan daerah.

Persamaan model (1) dan (2) yang digunakan adalah sebagai berikut:

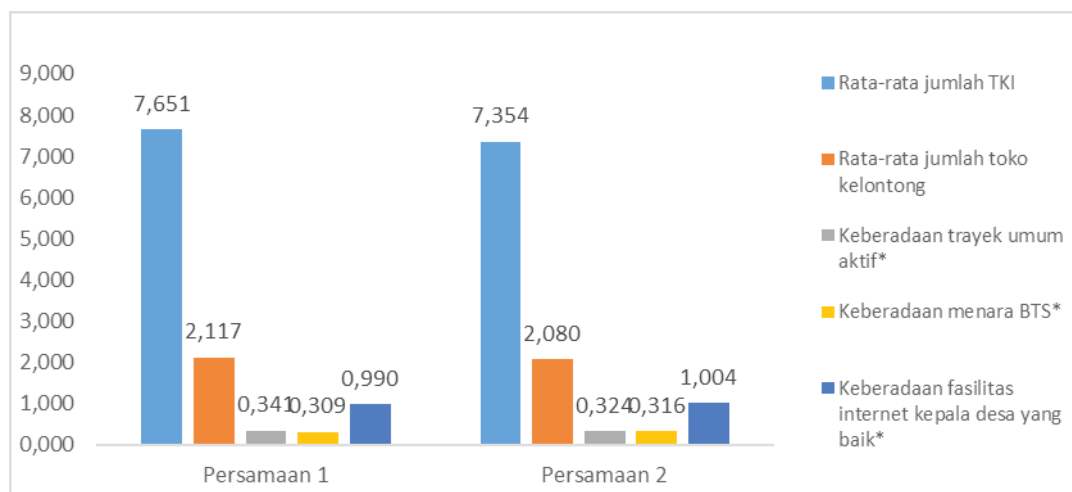
$$Y_i = \beta_0 + lokpri\_period_i + kec\_lokpri_i + period_i + gdrp_i + penghasilan\_utama_i + permukaan\_terluas_i + DID_i + X'_i + Error$$

Penjelasan model:

Y:	Variabel <i>Outcome</i> yang terbagi ke dalam beberapa variabel;
TKI:	Variabel yang menggambarkan jumlah TKI di luar negeri
jumlah_SD:	Variabel yang menjelaskan jumlah sekolah dasar di satu desa
pasar_permanen:	Variabel yang menjelaskan jumlah pasar permanen di satu desa
kelontong:	Variabel yang menggambarkan jumlah toko kelontong di satu desa
jamban:	Variabel yang menggambarkan desa yang sebagian besar rumah tangganya menggunakan fasilitas jamban
minum_terlindung:	Variabel yang menggambarkan desa yang sebagian besar rumah tangganya menggunakan air minum dari sumber terlindungi
jalan_dilalui4:	Variabel yang menggambarkan desa yang sebagian besar jalannya dapat dilalui kendaraan beroda empat sepanjang tahun
D_ada_trayek:	Variabel <i>dummy</i> dengan deskripsi 1 adalah desa yang memiliki trayek angkutan umum aktif, dan 0 jika desa tidak memiliki trayek angkutan umum aktif

D_menara_bts:	Variabel <i>dummy</i> dengan deskripsi 1 adalah desa yang memiliki menara BTS, dan 0 jika desa tidak memiliki menara BTS
D_internet_kades:	Variabel <i>dummy</i> dengan deskripsi 1 adalah desa yang memiliki internet baik di kantor kepala desa, dan 0 jika desa tidak memiliki internet baik di kantor kepala desa
akses_RS:	Variabel yang menjelaskan kesulitan akses masyarakat ke rumah sakit (RS) terdekat
akses_puskesmas:	Variabel yang menjelaskan kesulitan akses masyarakat ke puskesmas dengan rawat inap terdekat
akses_pustu:	Variabel yang menjelaskan kesulitan akses masyarakat ke pustu terdekat
poverty_perc:	Variabel yang menggambarkan persentase masyarakat miskin di kecamatan
gini:	Variabel yang menggambarkan indeks gini kecamatan
lokpri_period:	Variabel <i>dummy</i> dengan deskripsi 1 adalah kecamatan merupakan Lokpri dan tahun 2017, dan 0 jika kecamatan bukan merupakan Lokpri dan tahun 2017
kec_lokpri:	Variabel <i>dummy</i> dengan deskripsi 1 adalah kecamatan Lokpri, dan 0 jika kecamatan bukan Lokpri
period:	Variabel <i>dummy</i> dengan deskripsi 1 adalah tahun 2017, dan 0 jika bukan tahun 2017
X':	Variabel kontrol untuk melengkapi kebutuhan variabel dalam suatu model;
Gdrp:	Variabel yang menggambarkan GDP konstan di tingkat Kabupaten
penghasilan_utama:	Variabel yang menggambarkan pekerjaan utama sebagian besar masyarakat
permukaan_terluas:	Variabel yang menggambarkan permukaan jalan terluas di desa
gizi_buruk:	Jumlah gizi buruk sebagai variabel yang menjadi proksi kondisi kesehatan pada model (1)
gotong_royong:	Desa memiliki kegiatan gotong royong sebagai variabel yang menjadi proksi kondisi sosial pada model (1)
penderita_wabah:	Jumlah penderita wabah penyakit sebagai variabel yang menjadi proksi kondisi kesehatan pada model (2)
konflik_comm:	Jumlah konflik antarmasyarakat sebagai variabel yang menjadi proksi kondisi sosial pada model (2)
Error:	Variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model

Grafik 4.16  
**Koefisien variabel kecamatan Lokpri pada 2017**



Grafik 4.16<sup>2</sup> menjelaskan nilai koefisien dari variabel kecamatan Lokpri pada 2017 yang berpengaruh secara signifikan terhadap indikator yang dianalisis. Dari hasil estimasi dapat dilihat bahwa dari lima belas variabel yang menggambarkan pengaruh penentuan Lokpri, hanya lima variabel (jumlah TKI di luar negeri, jumlah toko kelontong di satu desa, keberadaan trayek angkutan umum aktif di desa, keberadaan menara BTS di desa, dan keberadaan internet yang baik di kantor kepala desa) yang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Lokpri tahun 2017. Namun, lima belas variabel pada tabel regresi tidak menunjukkan pengaruh negatif penentuan Lokpri untuk kecamatan Lokpri pada 2017.

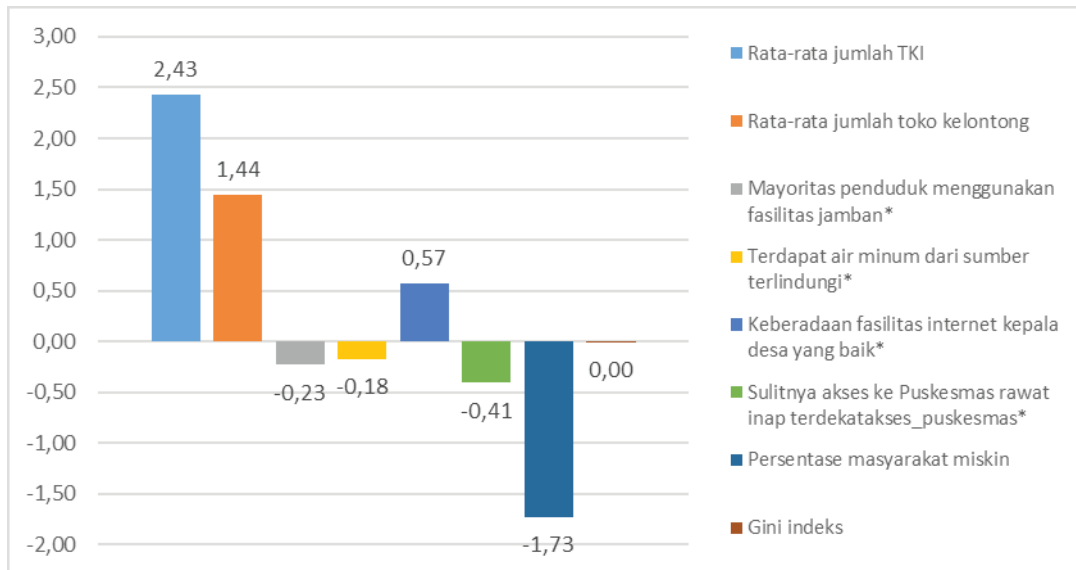
Dapat disimpulkan bahwa variabel Lokpri dan variabel kontrol pada kedua model memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap lima indikator capaian pengembangan Kawasan perbatasan pada 2017. Namun, model persamaan pertama menunjukkan dampak yang lebih besar daripada model persamaan kedua pada variabel rata-rata jumlah TKI di luar negeri, rata-rata jumlah toko kelontong, dan keberadaan trayek angkutan umum aktif. Sedangkan model persamaan kedua memiliki dampak yang lebih besar daripada model persamaan pertama pada variabel keberadaan Menara BTS dan fasilitas internet yang baik di kantor kepala desa.

**Analisis mendalam (*in-depth analysis*):** Semakin panjang usia suatu daerah Lokpri, akankah semakin besar peningkatan pembangunannya?

Setelah melihat hasil dari model (1) dan (2), analisis selanjutnya akan melihat bagaimana performa pembangunan kecamatan Lokpri jika penentuan kecamatan Lokpri tersebut telah berlangsung lebih lama dari daerah lainnya. Pada model (3), perbedaan yang terjadi hanya pada variabel DID *lokpri\_23*, yang menunjukkan pengaruh penentuan Lokpri jika kecamatan tersebut telah mendapatkan mandat Lokpri selama lebih dari satu tahun.

<sup>2</sup> Variabel yang tersedia hanya variabel dengan p.value <0.01/0.05/0.10

Grafik 4.17  
Koefisien variabel kecamatan Lokpri yang lebih dari setahun pada 2017



Dapat dilihat pada Grafik 4.17<sup>3</sup> bahwa dari lima belas variabel yang menggambarkan pengaruh penentuan Lokpri selama lebih dari setahun pada 2017, delapan variabel menunjukkan hasil signifikan. Variabel jumlah TKI di luar negeri, jumlah toko kelontong di satu desa, dan keberadaan internet yang baik di kantor kepala desa dipengaruhi secara positif; sedangkan lima variabel lainnya (desa yang sebagian besar rumah tangganya menggunakan fasilitas jamban, desa yang sebagian besar rumah tangganya menggunakan air minum dari sumber terlindungi, kesulitan akses masyarakat ke puskesmas dengan rawat inap terdekat, persentase masyarakat miskin di kecamatan, dan indeks gini kecamatan) dipengaruhi secara negatif oleh variabel Lokpri yang sudah berjalan lebih dari satu tahun.

Jika dianalisis lebih mendalam, terdapat perubahan pengaruh variabel usia kecamatan Lokpri lebih dari satu tahun terhadap dua indikator (keberadaan trayek angkutan umum aktif dan Menara BTS). Kedua variabel tersebut awalnya dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kecamatan Lokpri di tahun 2017, namun jika variabel tersebut diubah menjadi model (3), pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan. Analisis mendalam ini terutama bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh lebih besar bagi suatu daerah jika daerah tersebut telah menjadi kecamatan Lokpri selama lebih dari satu tahun. Namun, hasil koefisien menunjukkan bahwa selain terdapat beberapa indikator tambahan yang berpengaruh, ternyata terdapat beberapa indikator lain yang menjadi tidak signifikan. Lebih parah lagi, terdapat indikator yang berpengaruh secara negatif akibat keberadaan Lokpri di kecamatan tersebut selama lebih dari satu tahun.

Secara umum, penerapan kecamatan Lokpri selama lebih dari satu tahun ini tidak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan model (1) dan (2). Hal ini mengindikasikan bahwa dibutuhkan monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan Lokpri oleh pemerintah atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait agar pengelolaan kecamatan yang menjadi Lokpri lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya.

<sup>3</sup> Variabel yang tersedia hanya variabel dengan  $p.value < 0.01/0.05/0.10$

## 4.4 Aspek Gender

### 4.4.1 Kabupaten Serdang Bedagai

1. Dari narasumber (perempuan), diperoleh gambaran bahwa pemberdayaan dan penguatan peran perempuan berjalan terus di Kecamatan Lokpri Tanjung Beringin dan Kabupaten Serdang Bedagai
2. Program PNPM Mandiri berperan besar dalam mengawali pemberdayaan dan partisipasi perempuan. Upaya ini sulit dilaksanakan pada awalnya, karena masyarakat belum terbiasa dengan kehadiran perempuan dalam forum pembangunan di desa, kecamatan, dan kabupaten. Program PNPM (2004) mensyaratkan partisipasi perempuan dalam musyawarah dan pembentukan SPP (Simpan Pinjam bagi Perempuan), dengan 30persen alokasi penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk persenkegiatan usulan perempuan. Hal ini memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di desa dan masyarakat;
3. Kelembagaan perempuan yang berkembang saat ini:
  - a. Beberapa kelompok SPP (Simpan Pinjam bagi Perempuan) yang masih berjalan dan merupakan eks-program PNPM Mandiri;
  - b. Kowane (Kelompok Wanita Nelayan) dan SPPN (Serikat Perempuan Petani dan Nelayan) yang beranggotakan sekitar 20 perempuan di tiap desa. Di setiap kecamatan di Kabupaten Sergai, ada dua sampai lima desa yang mempunyai SPPN;
  - c. Pemberian pelayanan antara lain dalam bentuk pelayanan terpadu untuk kekerasan perempuan dan anak, dengan bentuk kekerasan yang sering terjadi seperti mudah cerai, kawin muda, dan dampak narkoba;
  - d. Pemberian pelayanan lainnya adalah pembinaan PAUD, kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta pengentasan kemiskinan.
4. Beberapa OPD pemerintah kabupaten dipimpin oleh perempuan.

Temuan	
a)	Peran perempuan sudah cukup besar di Lokpri Tanjung Beringin dan di Kabupaten Serdang Bedagai pada umumnya, namun secara kuantitatif masih belum merata, dan secara kualitatif masih terbatas pada bidang-bidang kewanitaan. Hal ini masih bisa ditingkatkan, misalnya untuk bidang ekonomi, seperti untuk penguatan ekonomi rumah-tangga dan terkait juga dengan gagasan pemerintah kabupaten dalam pengembangan PATAYA (pangan, pariwisata, dan budaya), yang sebetulnya masih terkait dengan peran perempuan;
b)	Dalam kaitannya dengan etos kerja warga, perempuan dapat berperan besar dalam rumah tangga untuk mengubah karakter agar masyarakat tidak bergantung pada cuaca/alam, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjauhi narkoba.

### 4.4.2. Kabupaten TTU

1. Peranan perempuan di Kabupaten TTU, khususnya di Lokpri kecamatan perbatasan, sudah berjalan. Perempuan dilibatkan dalam proses perencanaan. Lembaga seperti PKK cukup aktif. Banyak pekerja perempuan di semua bidang, seperti di bidang pertanian, perdagangan, dan ekonomi kreatif seperti di usaha tenun (ikat). Tenun ikat khas Timor banyak diproduksi oleh perempuan Kabupaten TTU. Hasil produksi rumah tangga tersebut dikumpulkan (oleh pengepul) untuk dijual ke pasar-pasar di kota (a.l. Kefamenanu),



2. Di Kefamenanu, ibukota kabupaten dan PKS, terdapat Yayasan Tafean Pah, yang memfasilitasi kelompok perajin dan usaha tenun ikat khas TTU, dan telah mempunyai ruang pameran, "Biboki Art Shop". Kelompok ini sudah dikenal secara nasional, bahkan internasional. Yayasan yang dikelola kaum perempuan ini memfasilitasi 24 kelompok penenun, masing-masing beranggotakan lima sampai delapan penenun.
3. Yayasan perempuan penenun ini sejak 1990 telah berpameran dan menerima permintaan dari Eropa, Amerika Serikat, Australia, negara-negara ASEAN, juga dari Jakarta dan toko-toko (*artshops*) di Kupang. Salah satu kendala yang dihadapi ialah bahan baku benang masih berasal dari luar daerah (Surabaya), dan apabila tenunan akan dikombinasikan dengan bahan kulit, materi kulit berasal dari Yogyakarta. Yayasan perempuan penenun ini pernah menerima dukungan dari berbagai lembaga seperti *Heritage Society* dan *Meet the Maker*.

Temuan	
a)	Pada tingkat kawasan Lokpri, peran perempuan secara formal telah ada menurut struktur kelembagaan formal seperti kegiatan PKK dan partisipasi dalam acara Musdes, Musrenbangdes, dan Musrenbang Kecamatan. Selain itu, pada kegiatan produksi kerajinan tenun, kegiatan perdagangan di pasar mingguan (keliling antarkecamatan) turut melibatkan perempuan;
b)	Pada tingkat kabupaten (TTU), kegiatan perempuan menonjol dalam pengembangan kerajinan berbasis tenun ikat khas TTU di bawah binaan Yayasan Tafean Pah, kelompok perajin dan usaha tenun ikat khas TTU, yang telah mempunyai showroom "Biboki Art Shop", dan sejak 1990 telah berpameran dan menerima permintaan pasar dari Eropa, Amerika Serikat, Australia, negara-negara ASEAN, dan dari toko-toko di Jakarta dan Kupang. Yayasan yang dikelola kaum perempuan ini membina 24 kelompok penenun, yang masing-masing beranggotakan lima sampai delapan penenun.
c)	Di tingkat kabupaten, perempuan berperan di dunia pendidikan dan kesehatan. Banyak guru dan siswa perempuan di bidang pendidikan kejuruan pariwisata. Dalam bidang kesehatan, banyak tenaga medis dan perawat perempuan.



# BAB V

## PEMBAHASAN

Dengan pemahaman konsep pengembangan wilayah, pendekatan pengembangan kawasan perbatasan yang diperluas dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), serta kondisi potensi dan permasalahan yang dibahas sebelumnya, pada bab ini akan dilakukan pembahasan yang bersifat sintesis atas konsep dan apa yang terjadi di lapangan. Pembahasan terhadap kondisi yang berjalan dikaitkan dengan tujuan serta konsep pengembangan yang telah diuraikan sebelumnya.

Sebagaimana telah diungkapkan, salah satu harapan dari pengembangan Lokpri ialah bagaimana agar program/kegiatan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat digiring ke Lokpri (dan Wilayah Konsentrasi Pengembangannya), sesuai harapan dalam *Desain Besar Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara*. Selain itu, analisis terhadap persoalan daerah diharapkan dapat memberikan saran peningkatan kinerja koordinasi sesuai prinsip HITS (*holistic, integrated, thematic, spatial*).

Untuk itu, pembahasan pada bab ini menggunakan kerangka yang digunakan untuk membahas aspek-aspek pengembangan wilayah dan kelembagaan seperti pada bab-bab sebelumnya, yaitu mencakup beberapa aspek:

1. Pengembangan Wilayah
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal yang Inklusif
3. Pelayanan Sosial Dasar
4. Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)
5. Kelembagaan: Koordinasi
6. Kelembagaan: Penguatan Kapasitas

Secara umum, dengan perluasan pendekatan pengembangan kawasan perbatasan menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), dan meninjau keadaan di tingkat lapangan (Lokpri), pembahasan akan menelaah beberapa hal, antara lain:

1. Perlu adanya “(Gagasan) Rencana Pengembangan” Kawasan Lokpri Perbatasan. Upaya koordinasi usulan dalam proses perencanaan, serta koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Lokpri Perbatasan, tidak dapat hanya dilakukan dengan mengumpulkan usulan kegiatan secara sepotong-sepotong. Kawasan Lokpri Perbatasan perlu mempunyai gagasan tentang arah dan gambaran tujuan pengembangan, dengan identifikasi kegiatan unggulan. Gambaran gagasan akan membantu semua pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan di kawasan Lokpri Perbatasan. Gagasan pengembangan tersebut dituangkan dalam kerangka konsep pengembangan wilayah. Pada dua kasus kajian ini, dibahas apa yang telah disiapkan;
2. Kedua, selain menelaah kerangka konsep pengembangan wilayah, kajian ini juga membahas kesiapan pengembangan ekonomi lokal yang lebih melibatkan ekonomi skala mikro dan kecil, yang dilaksanakan rakyat di kawasan Lokpri dan sekitarnya, agar pengembangan ekonomi lebih inklusif dan tidak hanya melihat kegiatan produksi unggulan dari kepentingan pertumbuhan,

3. Ketiga, melihat kondisi pelayanan sosial dasar, juga pemerataan dan keterjangkauannya bagi desa-desa kawasan Lokpri perbatasan yang umumnya terpencil;
4. Keempat, meninjau aspek kesetaraan gender, peran perempuan, dan bagaimana proses pembangunan memberi ruang bagi aspek ini;
5. Berikutnya, ialah aspek kelembagaan (organisasi, aturan main) dalam koordinasi pembangunan kawasan Lokpri perbatasan ini. Bagaimana penguatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dilakukan, seperti di antara Bappeda, BPPD, Desa/Pemdes, dan BUMDes;
6. Bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan, terutama untuk lembaga koordinasi, baik kecamatan dan BPPD, menyangkut kemampuan perencanaan, penganggaran, pengusulan (dan *e-planning*), pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya sesuai kebutuhan.

Berikut ini akan ditelaah dua Lokasi Kajian: Lokpri di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Provinsi Sumatra Utara; dan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **5.1 Lokasi Kajian-1: Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai)**

### **5.1.1 Pengembangan Wilayah**

Untuk dapat “menggiring” program/kegiatan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) ke LokPri dan mengelola serta membangun sesuai prinsip HITS (*holistic, integrated, thematic, spatial*) di atas, diterapkan pendekatan pengembangan wilayah.

Dapat dicatat bahwa Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) telah melakukan upaya pendekatan pengembangan wilayah dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Lokpri Perbatasan (Kecamatan Tanjung Beringin), antara lain dengan:

1. Menyusun gagasan pengembangan kawasan “PATAYA” (Pangan, Pariwisata, Budaya), untuk Kawasan Lokpri Perbatasan, Kecamatan Tanjung Beringin. Rencana Pengembangan Kawasan PATAYA tersebut akan disusun secara terpadu;
2. Aspek pengembangan wilayah pertama berupa pembagian sub-kawasan, meliputi: sub-kawasan wisata bahari (*eco-marine tourism*) dari pesisir Desa Bagan Kuala sampai Pulau Berhala; sub-kawasan wisata perkotaan di Desa Pekan Tanjung Beringin dan sekitarnya; sub-kawasan budaya, yaitu kampung-kampung budaya (seperti Melayu, Batak, Jawa, dan Banjar); sub-kawasan wisata alam arung jeram; serta sub-kawasan agro-wisata;
3. Aspek pengembangan wilayah kedua berupa pengembangan sistem pusat-pusat. Namun, belum jelas arah yang akan diambil terkait upaya ini. Pekan Tanjung Beringin dan sekitarnya memang akan dikembangkan sebagai pusat kegiatan pelayanan perkotaan, namun belum eksplisit tertuang dalam konteks pengembangan pusat kegiatan (PKL) yang menunjang fungsi pusat orde di atasnya (PKW Sei Rampah);
4. Aspek pengembangan wilayah ketiga berupa pembangunan infrastruktur wilayah. Untuk kawasan Lokpri Tanjung Beringin dan sekitarnya, infrastruktur yang paling dibutuhkan ialah: bangunan/konstruksi penahan ombak yang menggerus pantai (abrasi); pengerukan sedimen di muara Sungai Sei Rampah dan bangunan penahan tepian sungai (bronjong); serta pelabuhan kecil/dermaga dan permukiman ulang (*resettlement*) nelayan di Desa Bagan Kuala. Di samping itu, peningkatan kualitas jalan antarkawasan juga diperlukan.

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN:
a) Untuk memantapkan gagasan/rencana pengembangan kawasan Lokpri dalam konsep "PATAYA", diperlukan perencanaan program yang simultan dan terpadu. Sejauh ini, pilihan kegiatan unggulan dan program pengembangan belum jelas. Selain itu, belum ada program pembangunan sarana penguatan sistem pusat-kegiatan. Pembangunan infrastruktur terkait turisme ekowisata kelautan ( <i>eco-marine tourism</i> ) masih terbatas karena masih ada kendala koordinasi kewenangan.	a) Pengembangan wilayah perlu dilaksanakan secara simultan dan saling mengisi, antara aspek struktur ruang yang menetapkan fungsi sub-kawasan dan fungsi kota sebagai pusat kegiatan; antara infrastruktur wilayah dan infrastruktur lokal; serta antara prasarana lingkungan dan sarana permukiman; b) Untuk itu, perlu penguatan sosialisasi dan penyusunan kesepakatan dalam hal rencana, program, dan penganggaran dari semua pihak (OPD, pemerintah desa, dan mitra lainnya).

## 5.1.2 Pemberdayaan Ekonomi Lokal yang Inklusif

- Berkaitan dengan pendekatan pengembangan wilayah sebagaimana disebutkan di atas, khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat di Lokpri Tanjung Beringin umumnya masih bertumpu pada pengolahan sumber daya alam secara tradisional, baik sebagai nelayan maupun petani kecil, dan belum menggunakan teknologi yang memadai.
- Kegiatan nelayan masih mengandalkan kondisi alam dan cuaca, serta belum mengenal pengolahan ikan dan pengolahan pascapanen. Peternak kecil pun belum mengenal pengolahan produksi. Mereka sangat bergantung pada pemberi pinjaman serta pemasok bahan baku dan sarana produksi. Pemasaran dan penentuan harga jual juga masih bergantung pada pengepul (tengkulak);
- Kelembagaan ekonomi lokal masyarakat melekat pada kelembagaan administratif desa, seperti BUMDes. Kelompok tani dan nelayan masih terbatas sebagai kumpulan tetangga, belum membentuk koperasi.
- Sudah dibentuk BUMDesMa (BUMDes Bersama) antardesa. Di kecamatan sebelah (Kecamatan Sei Rampah), sudah ada BUMDesMa yang berjalan baik. Di Lokpri Kecamatan Tanjung Beringin sendiri, BUMDesMa sudah terbentuk tetapi belum berfungsi. BUMDesMa ini sebetulnya diharapkan menjadi lembaga pemasok sarana produksi pertanian atau saprodi, perkreditan, dan pengepul/pembeli produk petani dan nelayan, sehingga ketergantungan kepada tengkulak dapat dikurangi;

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
a) Perhatian pada pengembangan usaha mikro masih terbatas, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat yang didominasi petani dan nelayan kecil masih tradisional, sangat bergantung pada kondisi alam; kegiatan pengolahan hasil panen belum berkembang; ada ketergantungan hidup pada pemasok, kreditur (rentenir), dan pengepul yang menentukan harga.	a) Sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pendekatan pengembangan wilayah perlu diimbangi dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal warga. Hal ini menyangkut pemberian prioritas dalam perencanaan untuk menguatkan UMKM setempat, baik dalam hal teknologi dan pengetahuan produksi maupun keterampilan manajerial, serta bantuan pengadaan sarana produksi, modal kerja (kredit mikro), dan dukungan serta bimbingan pemasaran; b) Menguatkan lembaga desa seperti BUMDes dan BUMDesMa untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal warga.

### 5.1.3 Pelayanan Sosial Dasar

1. Kondisi pelayanan sosial dasar di Lokpri Perbatasan Kecamatan Tanjung Beringin memadai dalam memenuhi kebutuhan. Jarak antardesa dan ke lokasi pelayanan relatif terjangkau, akan tetapi kualitas pelayanannya perlu ditingkatkan. Ini penting karena sarana sekolah terutama SMP tidak tersedia secara merata di semua desa, sehingga akses ke sana bergantung pada kondisi jalan.
2. Dalam hal pelayanan pendidikan, pendidikan kejuruan masih terbatas dan kursus keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia setempat belum ada. Padahal, untuk mendukung gagasan pengembangan “PATAYA” tentu diperlukan peningkatan keterampilan pertanian, perikanan, dan pengolahan hasilnya, serta pendidikan pariwisata. Dalam hal kesenian (tari), ada beberapa sanggar tari yang dapat dikembangkan;
3. Untuk pelayanan kesehatan, yang menonjol ialah sarana Puskesmas Kecamatan Tanjung Beringin yang telah melayani rawat inap dan mempunyai pelayanan untuk penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan, dengan inovasi mengembangkan “Lasykar Panji” yang melayani pasien dengan gangguan kejiwaan.

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p>a) Untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, tidak ada keluhan yang menonjol, kecuali masih terbatasnya pendidikan formal kejuruan atau kursus-kursus keterampilan untuk menyiapkan generasi muda dalam mendukung visi pengembangan Kawasan PATAYA dan meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka;</p> <p>b) Kondisi jalan desa dan penerangan jalan juga mempengaruhi jangkauan pelayanan dasar, baik pendidikan maupun kesehatan;</p> <p>c) Persoalan khusus yang menyangkut aspek sosial juga adalah masalah penyalahgunaan narkoba di salah satu perkampungan nelayan, yang dikhawatirkan menjadi kebiasaan warga terutama sebagian nelayan, di samping ada pula kemungkinan mereka menjadi penjual bagi pembeli dari luar daerah.</p>	<p>a) Perlu perhatian dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan SDM, menyambut gagasan pengembangan Kawasan Lokpri sesuai fokus peningkatan PATAYA. Pendidikan kejuruan dan kursus-kursus keterampilan yang sesuai kebutuhan perlu disediakan;</p> <p>b) Keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan memerlukan dukungan peningkatan kualitas infrastruktur, agar setiap desa dan setiap keluarga dapat menjangkau pelayanan yang mereka butuhkan.</p>

### 5.1.4 Kelembagaan: Koordinasi

1. Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, masalah koordinasi masih menjadi tantangan/kendala dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk dalam pengelolaan dan upaya pengembangan Kawasan Lokpri Perbatasan Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara.
2. Dalam upaya melakukan terobosan dan mempercepat pengembangan Lokpri Perbatasan, Pemkab Sergai telah menerbitkan SK Tim “Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan”, untuk dapat memacu koordinasi dan kerjasama antara berbagai OPD, kecamatan, desa, dan pihak pendukung lainnya;
3. Diseminasi informasi dan penyampaian pada kesempatan Musrenbang juga telah dilakukan untuk mempromosikan Rencana Pengembangan Kawasan PATAYA, yang juga merupakan Tema dalam RPJMD Kabupaten Sergai. Rencana ini telah disosialisasikan dan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan, sehingga tidak mendapatkan masalah dalam mendapatkan dukungan partisipasi dari bawah (desa, kecamatan);

4. Desa diajak berpartisipasi sejak awal, sehingga Pemdes Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin dan desa lainnya, termasuk warga dan kaum perempuannya berpartisipasi aktif. Beberapa kegiatannya termasuk mengamankan pantai dari abrasi, menanam kembali mangrove, mendukung partisipasi perempuan mengembangkan tanaman obat keluarga (TOGA), dengan menggunakan Dana Desa;

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p><i>Upaya dan terobosan dalam menangani masalah koordinasi</i></p> <p>a) Terdapat kendala dalam hal kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besaran biaya dan kewenangannya ada pada pemerintah atasan (provinsi, kementerian), serta kendala pembangunan lahan (pulau, pelabuhan, jalan) yang kewenangannya ada pada pemerintah pusat (Kemen LHK, KKP, Perhubungan/Laut, KemHan);</p> <p>b) Terobosan yang saat ini ditempuh adalah Pemkab Sergai bekerjasama dengan pihak yang memiliki kewenangan, antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) KemHan (untuk pengelolaan P. Berhala, yang pengelolaannya dalam kewenangan KemHan (sebagai pulau kecil terluar);</li> <li>(2) UPT Perhubungan Laut dalam pengembangan dermaga dan pelabuhan, dan bersama-sama mengirim surat ke Kementerian LHK yang berwenang atas lahannya;</li> <li>(3) pengajuan permohonan dukungan dari Kementerian PUPR untuk pengembangan permukiman, dan dari Kementerian LHK untuk penggunaan lahan mereka (untuk perhutanan sosial).</li> </ol> <p>c) Upaya-upaya untuk koordinasi telah dilakukan pada tingkat kabupaten, tetapi dari wawancara dan kunjungan lapangan ada beberapa cacatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pada tingkat pemerintah kabupaten, masih perlu didorong peran berapa bidang dalam mendukung tema pengembangan PATAYA, termasuk untuk penguatan kerajinan, pengolahan pascapanen, kerajinan (ekonomi kreatif), penguatan kelompok masyarakat; serta pendidikan kejuruan luar sekolah;</li> <li>(2) Dalam hal koordinasi dengan pemerintahan atasan (provinsi, nasional), dengan ketiadaan BPPD, perlu ditunjuk unit koordinasi sebagai penanggung jawab komunikasi ke OPD di provinsi dan K/L di tingkat nasional, untuk memudahkan penyampaian usulan rencana “ke atas”, dan memantaunya, serta sebaliknya memberikan laporan kemajuan atau proses koordinasi “di bawah”.</li> </ol>	<p>a) Belajar dari Lokpri Tanjung Beringin, Kabupaten Sergai, sebetulnya koordinasi untuk pembangunan Kawasan Perbatasan itu berjalan cukup baik, perhatian Pemkab pada Kecamatan Lokpri (Tanjung Beringin) cukup memadai, termasuk dalam hal koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian yang terkait.</p>

## 5.1.5 Kelembagaan: Penguatan Kapasitas

1. Agar pengembangan kawasan Lokpri Perbatasan Tanjung Beringin dapat berjalan lancar, efisien, dan efektif, penguatan atau *capacity building* pelatihan lembaga-lembaga yang mendukung dan terkait perlu dilakukan. Lembaga inti di luar Pemkab yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan terutama BPPD dan administrasi kecamatan; sementara yang mendukung di tingkat desa dan antardesa termasuk BUMDesa dan lembaga swadaya masyarakat setempat seperti kelompok perempuan;
2. Di Kabupaten Sergai saat ini tidak ada BPPD, dan mungkin belum akan terbentuk dalam waktu dekat mengingat hanya ada satu kecamatan Lokpri di kabupaten ini. Namun, dalam melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, Pemkab Sergai menguatkan kelembagaan dengan membentuk Tim (Koordinasi) Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan.
3. Selain itu juga menguatkan kecamatan dengan kegiatan-kegiatan:
  - a. Pembinaan kecamatan dalam koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Bappeda dan OPD lainnya. Dilakukan berbagai pelatihan, termasuk penyusunan usulan program/kegiatan dan penggunaan *e-planning* (KRISNA);
  - b. Pelatihan dan pembinaan dilakukan dengan secara periodik mengundang camat atau stafnya ke Bappeda;
  - c. Mendayagunakan kecamatan dalam mendiseminasi program/kegiatan OPD ke desa dan memantau pelaksanaannya;
  - d. Khusus untuk Kecamatan Lokpri Perbatasan Tanjung Beringin, Pemkab telah menetapkan perubahan SOTK dengan menambahkan Kepala Seksi Pengelola P. Berhala untuk memperkuat kecamatan.

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p>a) Untuk tingkat Kecamatan, penyesuaian SOTK dengan menambah seksi khusus yang menangani P. Berhala merupakan langkah tepat dalam peningkatan kemampuan pengelolaan pulau strategis perbatasan tersebut dan memudahkan kerjasama dengan unit pertahanan (Muspika);</p> <p>b) Hal yang penting juga adalah peningkatan kemampuan personel secara berkelanjutan, mengingat permasalahan yang berkembang dan rencana pengembangan kawasan perbatasan. Perubahan sikap mental masyarakat perlu dimulai dari aparatnya (kecamatan, desa);</p> <p>c) Selain itu, masih perlu pemantapan visi bersama dalam pengembangan kawasan perbatasan dalam mendukung rencana pengembangan kawasan perbatasan yang bertema "PATAYA" tersebut. Tampaknya, setiap lembaga masih bekerja dengan kepedulian hanya pada program masing-masing, belum dalam visi terpadu.</p>	<p>a) Penguatan lembaga terkait pengembangan kawasan Lokpri Perbatasan perlu dilakukan secara berkelanjutan, sesuai dinamika perubahan kondisi dan persoalan. Aspek kelembagaan yang perlu ditingkatkan menyangkut: personel (kapasitas dan kapabilitas SDM), perbaikan prosedur, organisasi (SOTK), atau perubahan kebijakan yang memayunginya.</p>



## 5.2 Lokpri Insana Utara (Wini), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

### 5.2.1 Pengembangan Wilayah

#### Gagasan Pengembangan Lokpri Kecamatan Insana Utara (Kawasan PLBN Wini)

1. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, Kecamatan Insana Utara, Pemkab TTU, dan para pihak juga mempunyai gagasan untuk mengembangkan kawasan sekitar Wini ini sebagai pusat pemasaran produk daerah, pelayanan wilayah, dan pariwisata, untuk mendayagunakan potensi ekonomi kawasan pendukungnya, di samping memanfaatkan sarana-prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, yang terdiri atas bangunan PLBN dan areanya dan bangunan pasar yang telah dibangun. Selain itu, hal ini juga dilakukan dengan memanfaatkan Pelabuhan Wini yang merupakan pelabuhan regional. Untuk area pengembangan pariwisata bahari, telah ditunjuk Tanjung Bestian, dan adanya dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tantangan sejauh ini antara lain adalah properti dan Gedung PLBN berada dalam kewenangan BNPP.

ANALISIS	SARAN/PELAJARAN
<p>a) Dalam kenyataannya, sampai saat ini Gedung PLBN masih murni untuk pos lalu lintas batas orang menyeberang saja, belum dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan kawasan Lokpri Insana Utara. Sementara itu, melihat aktivitas bongkar-muatnya, Pelabuhan Wini strategis karena melayani bongkar-muat barang dengan jangkauan luas, sampai ke Atambua dan Kefamenanu, dengan trayek kapal menuju Surabaya, Dili, sampai Makassar;</p> <p>b) Hadirnya PLBN dan sarana pendukungnya, termasuk bangunan pasar, serta Pelabuhan Regional Wini, sangat potensial untuk menjadi sarana-prasarana yang memicu pertumbuhan kawasan Lokpri Wini/Insana Utara ini;</p> <p>c) Saat ini sarana-prasarana tersebut masih dilihat dari aspek fisik, belum diimbangi dengan pengembangan aspek ekonomi lokal sebagai sarana penggerak ekonomi lokal; juga belum dipikirkan aspek kelembagaan pengelolaannya sebagai sarana pelayanan kegiatan sosial-ekonomi-budaya penduduk sekitarnya;</p> <p>d) Gagasan yang ada cukup bagus, tetapi perlu dikonkretkan menjadi rencana pengembangan kawasan Lokpri Perbatasan, yang akan menjadi bagian dari RPJMD serta tercantum dalam RTRW Kabupaten TTU.</p>	<p>a) Sebaiknya, kawasan Lokpri Perbatasan mempunyai gagasan tentang pengembangan kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan wilayahnya (RPJM, RTRW), sehingga jelas arahnya dalam menjadi kawasan strategis dan pusat kegiatan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Lokpri dan sekitarnya;</p> <p>b) Konsep pembangunannya perlu diperluas dari fokus pada pembangunan sarana-prasarana fisik, kepada fokus pengembangan kegiatan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan dasar, dan pengembangan kelembagaan pendukung.</p>

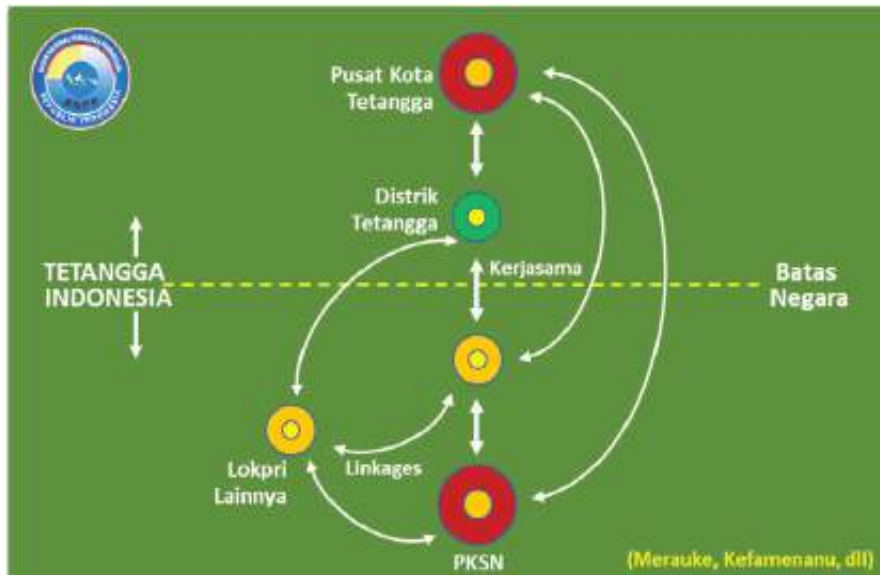
#### Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Lokpri, PLBN, dan PKSN

1. Sesuai konsep pengembangan wilayah perbatasan di Kabupaten TTU, akan dibangun pusat-pusat kegiatan pelayanan. Telah direncanakan **PKSN** (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) di Kefamenanu Kabupaten TTU, yang saat ini perdanya sedang diproses. Saat ini, PKSN

**Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri**  
dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

Kefamenanu telah mempunyai sarana pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dalam bidang kesehatan, ada rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas dan poliklinik. Terdapat pula dua pasar (lama dan baru), dan banyak pertokoan sebagaimana layaknya kota pusat pelayanan.

Gambar 5.1



(Sumber: Simbolon. BNPP. 2014)

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p>a) Salah satu aspek pengembangan wilayah ialah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan pelayanan wilayah sekitarnya. Dalam konsep pengembangan kawasan perbatasan, dikenal PKSN yang menjadi pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan pelayanan wilayah lebih luas (kabupaten); dan di PLBN dikembangkan fungsi pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan yang lebih kecil. Di Kabupaten TTU saat ini pengembangan PKSN dan PLBN belum tampak nyata. PLBN masih berfungsi seperti kantor pelayanan imigrasi saja, belum menjadi sarana pusat pelayanan bagi kawasan perbatasan, apalagi sebagai pusat pertumbuhan;</p> <p>b) Pada kawasan Lokpri, belum ditumbuhkan pusat kegiatan pelayanan yang dilengkapi sarana dan prasarana kota yang memadai;</p> <p>c) Infrastruktur yang menghubungkan PKSN dengan Lokpri atau PLBN juga masih mengalami kendala dalam hal kondisi jalan raya yang masih terbatas dan belum dilengkapi dengan sarana angkutan umum yang memadai;</p>	<p>a) Rencana pengembangan pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan pelayanan kawasan perbatasan ini sebaiknya disinkronkan dengan rencana pembangunan dan tata ruang daerah (RPJMD dan RTRW) atau menjadi bagian darinya. Dengan demikian, penggalangan dukungan dari daerah maupun pihak lain akan lebih mudah;</p> <p>b) Saat ini pemerintah Kabupaten TTU sudah mulai menaruh perhatian dan harapan besar dalam hal pengembangan kawasan perbatasan. Sebaiknya BNPP juga menyambut hal tersebut dengan merencanakan bersama pengembangan wilayah dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan perbatasan ini, baik dalam hal PKSN maupun pusat pertumbuhan Lokpri perbatasan.</p>

### Kendala Infrastruktur:

1. Bagi Kabupaten TTU, kendala utama dalam hal infrastruktur jalan wilayah (regional) ialah belum utuhnya jalan regional perbatasan karena belum tersambungny jalan regional “sabuk merah perbatasan”, khususnya ruas dari Miomafo Barat menuju Amfoang (Kab Kupang). Ruas sambungan ini diperkirakan baru direalisasikan oleh PUPR pada 2020 sampai 2021. Dengan demikian, peningkatan akses dapat terwujudkan di Kecamatan Mutis.
2. Kendala lain ialah bencana longsor dan angin puyuh kerap terjadi di kawasan perbatasan Kabupaten TTU ini. Banyak jembatan yang rusak karena longsor pada jalan menuju ke PLBN Wini.

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p>a) Kendala utama pengembangan wilayah perbatasan secara umum adalah infrastruktur jalan, antara pusat pertumbuhan (atau ibukota provinsi, ibukota kabupaten) dengan Lokpri atau pusat kegiatan lokal kawasan Lokpri. Masalahnya, pembangunan jalan regional tersebut sering di luar kemampuan anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, sehingga bergantung pada dukungan pemerintah nasional, khususnya Kementerian PUPR. Sementara itu, dari sisi Kementerian PUPR, status jalan tersebut sebagian merupakan jalan provinsi atau jalan kabupaten, sehingga dari aspek kewenangan dianggap sebagai tanggung jawab daerah.</p> <p>b) BPPD Provinsi, sebagaimana disampaikan, mengambil langkah menulis Surat Diskresi kepada Presiden RI untuk memberi tugas kepada Kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan jalan, walaupun dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah.</p>	<p>a) Karena permasalahan infrastruktur jalan merupakan kendala utama bagi terbukanya isolasi kawasan perbatasan, perlu dilakukan upaya ekstra dari tiap pihak yang terkait. Apa yang dilakukan oleh BPPD Provinsi NTT dengan mendukung gubernur untuk bersurat ke Presiden RI dan memohon Surat Diskresi dapat dicatat sebagai upaya positif.</p>

### Aspek Pertahanan dan Keamanan

1. Sejauh ini tidak pernah ada permasalahan serius dalam hal pertahanan dan keamanan wilayah, karena penduduk perbatasan di dua negara terikat dalam satu marga, satu keluarga besar, atau satu leluhur. Mereka tetap melaksanakan acara keluarga bersama-sama dengan saling mengunjungi menyeberang negara. Dalam hal penetapan tapal batas, ada pendapat bahwa menurut tetua adat, perlu ada beberapa titik perbatasan yang perlu disepakati lagi di Kabupaten TTU berdasarkan aspek sejarah.

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p>a) Tidak ada masalah serius terkait hubungan sosial-ekonomi antara kedua negara tetangga, mengingat pada dasarnya para warga masih bersaudara. Sebagian warga juga bermigrasi dari Timor-Leste, setelah pemilihan kewarganegaraan pada 1999. Untungnya, pada wilayah Republik Indonesia, kondisi pelayanan ekonomi (pasar) dan kesehatannya relatif lebih baik.</p>	<p>a) Keakraban dan kekeluargaan masyarakat kedua negara yang merupakan potensi sosial-budaya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan dan keamanan, di samping untuk mengembangkan pasar bagi produk masyarakat kawasan Lokpri. Namun, dari aspek pertahanan dan pengendalian lalu-lintas barang dan manusia, aspek kehati-hatian perlu tetap dijaga.</p>

## 5.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Lokal Kawasan Lokpri

1. Mata pencaharian sebagian besar warga di kawasan perbatasan Kab. TTU adalah sektor pertanian palawija. Cukup banyak potensi ekonomi di Lokpri Wini, antara lain: (a) Ternak besar sampai dengan ternak kecil seperti kerbau, sapi, kuda, kambing, dan domba; (b) Potensi kelautan (garam, rumput laut, dan ikan) dan wisata (alam, budaya); (c) Potensi pertanian: jagung, padi, palawija; (d) Potensi perkebunan: kopi, kakao, vanili, cengkih, coklat, kelor, kacang tanah, dan bawang putih; (e) Potensi industri kecil dan kerajinan: kerajinan tenun dan anyaman. Terdapat pula industri makanan dan minuman yang khas berupa produk jagung. Beberapa potensi telah dikelola melalui bentuk koperasi.
2. Dari segi dukungan pembiayaan untuk pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, di kawasan perbatasan terdapat dua program unggulan, yaitu Sari Tani dan Anggur Merah. Setiap desa mendapat alokasi Rp300 juta dari program Anggur Merah (provinsi) dan Rp300 Juta dari program Sari Tani (kabupaten).
3. Di samping itu, Dana Desa membantu pembangunan desa di kawasan perbatasan. Bupati telah menyampaikan imbauan agar selain ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perlu pula ada alokasi dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terdapat pula ADD dari Kab. TTU ke desa perbatasan sebesar Rp300 juta per desa. Semua desa di kawasan perbatasan sudah memiliki BUMDesa.

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p>a) Perhatian pada pengembangan usaha mikro masih terbatas, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat masih didominasi petani kecil, dan masih sangat bergantung pada kondisi alam (kering). Kegiatan pengolahan hasil panen juga belum berkembang, dan ada ketergantungan terhadap pemasok, kreditur (rentenir), dan pengepul yang menentukan harga.</p> <p>b) Kegiatan kerajinan seperti tenun sudah ada, tetapi masih sangat terbatas sebagai bagian dari tradisi-budaya dan belum merupakan kegiatan ekonomi produksi.</p>	<p>a) Memanfaatkan sarana PLBN untuk ruang pameran atau <i>showroom</i>, dan sarana pasar yang telah dibangun untuk lebih sering membuka pasar, tidak hanya seminggu sekali. Pelabuhan dapat dimanfaatkan untuk ekspor ke luar daerah, seperti ke Surabaya, Dili, dan Makassar, misalnya dalam hal hasil peternakan dan sumber daya alam lainnya. Ekspor yang sudah berjalan ditingkatkan dengan melibatkan produk warga secara lebih bervariasi, produk olahan, maupun produk industri kecil/rumahan khas daerah;</p> <p>b) Perlu mulai mendorong kegiatan pertanian, perikanan, pengolahan hasil, dan kerajinan secara lebih intensif. Perlu pula dilakukan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui kelompok dan gabungan kelompok (tani, nelayan, kerajinan), dan mengaktifkan BUMDes yang ada;</p> <p>c) Melibatkan Dinas PMD, Dinas KUKM, dan lainnya dalam pengembangan kawasan perbatasan, khususnya dalam pengembangan kawasan Lokpri Perbatasan;</p> <p>d) Mendayagunakan dan menguatkan lembaga ekonomi desa seperti BUMDes dan lembaga masyarakat di desa.</p>

### 5.2.3 Pelayanan Sosial Dasar

1. Secara umum, dalam hal kondisi pelayanan kesehatan di kecamatan Lokpri perbatasan, rata-rata di setiap kecamatan lokpri perbatasan sudah terdapat puskesmas. Semua desa perbatasan sudah memiliki Polindesa (Pos Bersalin Desa) untuk memberikan pelayanan maksimal bidang kesehatan. Hanya beberapa desa, seperti di Kecamatan Mutis, yang masih sulit mengakses Puskesmas. Namun, keberadaan Pustu (Puskesmas Pembantu) di Kecamatan Mutis sangat membantu warga desa yang sulit mengakses puskesmas. Tenaga kesehatan di Pustu sudah dipersiapkan juga.
2. Sementara itu untuk sektor pendidikan, pelayanan pendidikan dasar dari PAUD sampai dengan SMP sudah terdapat di setiap kecamatan Lokpri perbatasan, meskipun beberapa desa masih mengalami kesulitan untuk mengakses SMP atau SMA. Semua desa sudah memiliki PAUD.
3. Dalam hal perbandingan capaian pembangunan perbatasan di Kab. TTU dengan negara tetangga, disampaikan bahwa tingkat kesejahteraan warga perbatasan TTU lebih baik dibandingkan warga Oekusi Timor-Leste. Tantangan sosial yang ada di kawasan perbatasan Kabupaten TTU antara lain masalah *stunting*, kemiskinan, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p>a) Tidak ada masalah serius yang dikeluhkan tentang pelayanan pendidikan dan kesehatan, namun tampak bahwa keterpencilan membuat pendidikan dan pengetahuan umum masyarakat Lokpri masih terbatas, belum terbuka untuk mampu mengembangkan kreativitas dalam kegiatan ekonomi (produksi, perdagangan), sosial (berorganisasi), ataupun kesenian/kebudayaan;</p> <p>b) Selain itu, belum tersedia pelayanan pendidikan formal kejuruan di Lokpri. Kursus keterampilan di kawasan Lokpri juga belum ada;</p> <p>c) Seperti umumnya kawasan perbatasan yang terpencil, kondisi jalan desa dan penerangan jalan juga mempengaruhi akses ke pelayanan dasar. Tingkat pelayanan antardesa pun belum merata.</p>	<p>a) Perlu perhatian dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan warga, menyambut gagasan pengembangan Kawasan Lokpri sesuai fokus pengembangan dan sumber daya alam serta budaya di kawasan Lokpri;</p> <p>b) Intervensi <i>stunting</i> harus dimulai dari pasangan-pasangan muda yang akan menikah, seperti surat layak nikah dan pembekalan hidup untuk calon pasangan rumah tangga.</p> <p>c) Keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan memerlukan dukungan peningkatan kualitas infrastruktur, agar setiap desa dan setiap keluarga dapat menjangkau pelayanan yang dibutuhkan.</p>

### 5.2.5. Kelembagaan: Koordinasi

#### Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran

1. Dalam proses perencanaan, sebagaimana umumnya, proses penyampaian usulan dari bawah mengikuti sistem perencanaan nasional. Dari Musrenbang Desa ke Musrenbang Kecamatan, sampai ke kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Sejalan dengan itu, BPPD akan membawa aspirasi daerah kawasan perbatasan dari kecamatan dan kabupaten untuk selanjutnya disampaikan kepada BNPP melalui proses penyusunan Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi).
2. Dalam mendukung rencana dan usulan-usulan tersebut, BPPD setiap tahun menyiapkan dan memperbarui profil kawasan perbatasan.

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

3. BPPD berperan sebagai semacam *clearing house* atau pengatur dan bukan implementator pembangunan kawasan perbatasan. Usulan-usulan yang diteruskan oleh BPPD mencakup usulan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Usulan yang dibiayai APBD kabupaten disampaikan ke Bappeda dan OPD teknis terkait.
4. Pada tingkat provinsi, usulan-usulan dari Lokpri Perbatasan masuk ke forum Musrenbang, namun di samping itu ada forum/rapat koordinasi antara provinsi dan kabupaten perbatasan, untuk mengusulkan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan, yang mencakup usulan kegiatan pembangunan bidang pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai tambahan, saat ini semua usulan pembangunan harus menerima persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Apabila DPD menyetujui usulan tersebut, usulan akan diteruskan ke BNPP dan disampaikan ke Bappenas.

### Koordinasi di Tingkat Provinsi

1. Keterbatasan infrastruktur jalan tersebut menjadi penyebab kawasan perbatasan relatif terisolasi. Dalam hal rencana pembangunan dan perbaikan jalan regional ini, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, dengan didukung oleh BPPD, antara lain: (a) menggunakan pinjaman daerah yang diizinkan oleh Kemendagri; (b) mengajukan permohonan diskresi kepada presiden, agar dengan surat diskresi itu Kementerian PUPR dapat melaksanakan perbaikan dan pembangunan jalan di kawasan perbatasan,
2. Proses permohonan diskresi diawali dengan surat permohonan gubernur kepada presiden yang meminta Kementerian (PUPR) untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan wilayah Provinsi NTT. Selanjutnya, diharapkan Presiden menugaskan Menteri PUPR untuk menindaklanjuti. Surat Diskresi menjadi salah satu harapan untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan secara afirmatif.
3. Di Provinsi NTT ada rapat koordinasi (rakor) perbatasan tingkat provinsi yang membahas permasalahan perbatasan. Semua kabupaten perbatasan dan lokpri diundang dan turut hadir. Rakor dilaksanakan untuk memantau semua perkembangan pembangunan (fisik) di kawasan lokpri dan sumber-sumber pendanaan yang masuk ke setiap lokpri tersebut.
4. Selain itu, untuk memahami kebutuhan warga perbatasan, setahun sekali Provinsi NTT mengadakan acara dialog gubernur dengan masyarakat kawasan perbatasan. Pada 2020, acara dialog gubernur dengan masyarakat perbatasan di kabupaten Malaka direncanakan dihadiri oleh ribuan warga kawasan Lokpri Perbatasan.

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p><i>Upaya dan terobosan dalam menangani masalah koordinasi</i></p> <p>a) Apa yang dikhawatirkan sebagian pihak tentang konflik kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, antara pemerintah tingkat nasional dengan pemerintah daerah sebetulnya bukan permasalahan khusus. Masalah beda pendapat yang terjadi sebetulnya serupa dengan yang terjadi pada urusan dan pengelolaan kawasan lainnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah bersama BPPD telah berusaha menerapkan pendekatan koordinasi berbasis kawasan (spasial), namun masih memerlukan penguatan;</p> <p>b) Pada tingkat provinsi, BPPD telah berinisiatif untuk menampung usulan-usulan dari kabupaten perbatasan untuk dibahas dalam Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan. Sebagian usulan, yang dapat dibiayai pemerintah provinsi, diteruskan ke Bappeda Provinsi dan OPD terkait untuk diproses. Kegiatan atau proyek yang diusulkan untuk dibiayai pemerintah nasional (K/L), akan diteruskan ke BNPP, untuk dibahas dengan Bappenas. Kekhususan dari Provinsi NTT, sebelum usulan diteruskan ke tingkat nasional, disampaikan lebih dahulu ke DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk disepakati, karena DPD akan ikut serta untuk mendorong dukungan pemerintah tingkat nasional.</p>	<p>a) Dari beberapa pembahasan, ada kecenderungan bahwa usulan yang diprioritaskan ialah untuk infrastruktur jalan regional. Hal ini memang sesuai dengan kebutuhan mendesak kawasan Lokpri untuk membuka kondisi terisolasinya. Namun, sejajar dengan itu sebaiknya fokus perhatian juga diarahkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi lokal kawasan Lokpri; peningkatan pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan kejuruan yang sesuai kebutuhan lokal Lokpri; pemberdayaan perempuan; penguatan kelembagaan dan kerjasama antarlembaga;</p> <p>b) Untuk itu, dalam koordinasi mulai di tingkat kabupaten, disarankan untuk melibatkan lebih banyak OPD yang terkait dengan pemberdayaan kawasan, desa, dan masyarakat (PMD); pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku UMKM melalui pendekatan kelompok (KUKM); serta OPD pariwisata dan perdagangan.</p>

## 5.2.6 Kelembagaan: Penguatan Kapasitas

### Peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)

1. Pengelolaan perbatasan di NTT dilaksanakan oleh BPPD Provinsi NTT dan BPPD kabupaten, yang menjadi lebih kuat posisinya sejalan dengan amanat Permendagri No. 140 tahun 2017 tentang Pembentukan BPP Daerah.
2. Hubungan kerja BPPD dengan Bappeda dan dengan kecamatan berjalan dengan baik. BPPD punya anggaran untuk kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p>a) Provinsi NTT merupakan satu-satunya provinsi yang mempunyai BPPD pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, yang tidak tutup atau terinterupsi dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Memang sempat terjadi sedikit perubahan sewaktu harus menjadi urusan daerah, sesuai arah kebijakan UU Pemda, dan dengan berlakunya Permendagri No. 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Namun saat ini BPPD sudah berfungsi normal kembali, meskipun ada perbedaan dibandingkan dengan struktur organisasi sebelumnya dan perlu penyesuaian prosedur internal;</p>	<p>a) Perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan peran BPPD, tidak hanya sebagai koordinator dan penyalur usulan dari bawah ke OPD lain dan ke BNPP, lalu sebagai pemantau pelaksanaan program/kegiatan di Lokpri. BPPD perlu bekerja sama lebih erat dengan Bappeda khususnya, untuk mempunyai dan menyampaikan gagasan tentang arah pengembangan kawasan Lokpri Perbatasan, sesuai dengan perluasan pendekatan pengembangan kawasan perbatasan yang awalnya berfokus pada pendekatan pertahanan (<i>security</i>) semata, untuk mencakup juga pendekatan kesejahteraan (<i>prosperity</i>). Dengan demikian, BPPD perlu lebih banyak berkonsultasi dan bekerja sama dengan Bappeda dan OPD terkait;</p>

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

PEMBAHASAN	SARAN/PELAJARAN
<p>b) Sudah saatnya BPPD tidak hanya berperan sebagai koordinator dan penyalur usulan dari bawah ke OPD lain dan ke BNPP, namun perlu bekerja sama lebih erat dengan Bappeda khususnya, untuk mempunyai gagasan tentang arah <i>pengembangan</i> kawasan Lokpri Perbatasan. Berbeda dengan pendekatan pertahanan (<i>security</i>) semata, yang berfokus pada koordinasi pengawasan dan pelaksanaan kegiatan, perluasan pada pendekatan kesejahteraan (<i>prosperity</i>) memerlukan lebih banyak konsultasi dan kerja sama dengan Bappeda dan OPD terkait;</p> <p>c) Orientasi dan kapasitas kecamatan sejauh ini masih sebagai koordinator administratif, bukan sebagai koordinator pembangunan yang punya gagasan bagaimana kawasannya dikembangkan. Dengan penentuan Lokpri perbatasan, kecamatan didorong untuk turut mengambil peran dalam peningkatan kesejahteraan warganya, di samping juga berperan dalam pengawasan aspek hankam kawasan perbatasan di area kewenangannya. Camat umumnya punya gagasan pengembangan kawasan, namun masih terkendala oleh kewenangan, kapasitas organisasi, dan personalianya.</p> <p>d) Berikutnya, dalam hal peningkatan peran desa, pemdes, dan BUMDesnya di desa dalam kawasan Lokpri, kades dan BPD perlu diajak untuk berperan sesuai kewenangannya, sehingga program atau kegiatan pembangunan desa dapat terpadu dan sejalan dengan gagasan pengembangan kawasan Lokpri. Dalam terminologi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, suatu unit Lokpri dapat dianggap sebagai unit kawasan perdesaan (pasal 83, 84, 85).</p>	<p>b) Meningkatkan kapasitas kecamatan di kecamatan Lokpri, dari hanya sebagai koordinator administratif, untuk juga menjadi koordinator pemantauan pelaksanaan pembangunan yang punya gagasan bagaimana kawasannya dikembangkan, di samping tanggung jawab tambahannya dalam ikut memantau situasi pertahanan dan keamanan masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian, Camat juga mempunyai gagasan pengembangan kawasannya</p> <p>c) Meningkatkan peran desa, pemdes, dan BUMDes, untuk desa-desa dalam kawasan Lokpri. Kades, juga BPD, perlu diajak untuk juga berperan sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, program atau kegiatan pembangunan desa dapat terpadu dan sejalan dengan gagasan pengembangan kawasan Lokpri. Sesuai dengan pasal 83, 84, 85 UU no.6 tahun 2014 tentang Desa, suatu unit Lokpri dapat dianggap sebagai unit kawasan perdesaan.</p> <p>d) Penguatan kapasitas lembaga terkait pengembangan kawasan Lokpri Perbatasan perlu dilakukan secara berkelanjutan, sesuai dinamika perubahan kondisi dan persoalan.</p>

### 5.3 Analisis GESI

Secara umum, kecamatan-kecamatan di kedua lokasi penelitian, yakni di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten TTU, telah melakukan upaya pemberdayaan untuk mendorong peran perempuan dan kesetaraan gender melalui program-program yang sudah ada sebelumnya, baik program-program dari pemerintah nasional, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah desa. Karena mengembangkan program-program yang sudah ada, fokus pemerintah kecamatan adalah menjembatani lembaga-lembaga daerah terkait untuk memperkuat program-program terkait pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Program-program yang diperkuat oleh pemerintah kecamatan perbatasan di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten TTU meliputi program yang menysasar pemberdayaan perempuan di tingkat rumah tangga, desa, dan kabupaten. Di dalam analisis GESI, ketiga tingkat tersebut merepresentasikan ranah-ranah yang menjadi sasaran analisis dan sasaran perubahan relasi gender, yakni ranah rumah tangga dan ranah publik, yang dapat mencakup perubahan di tingkat komunitas dan di tingkat publik yang lebih luas, seperti perubahan kebijakan dan tata kelola (Carrard, 2013).



## 5.4.1 Ranah Rumah Tangga

Pemerintah kecamatan turut mendorong penguatan dan perlindungan perempuan dalam aspek-aspek rumah tangga. *Pertama*, pemerintah kecamatan memiliki perhatian khusus pada kasus-kasus keluarga yang sering terjadi di wilayah perbatasan, yakni perkawinan anak dan pelibatan perempuan dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah kecamatan melakukan koordinasi dengan tim relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan. *Kedua*, kecamatan sudah mendorong perempuan di lingkup rumah tangga untuk terlibat aktif di semua bidang yang potensial di tiap kecamatan, baik di bidang pekerjaan pertanian, perdagangan, maupun kerajinan seperti tenun ikat.

Dalam perspektif kecamatan, yang terpenting adalah perempuan dapat melakukan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi perempuan dan keluarganya, khususnya dalam hal kemandirian finansial. Akan tetapi, kecamatan belum memiliki perhatian khusus terhadap beban perempuan dalam melaksanakan pekerjaan pertanian, perdagangan, ataupun kerajinan. Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, perempuan cenderung memiliki beban yang lebih berat dari segi waktu maupun tenaga karena adanya beban berlipat tiga atau *triple burden*: peran rumah tangga yang masih dibebankan kepada perempuan; peran di sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan; serta peran partisipasi pengambilan keputusan di desa. Khususnya dalam hal peran dalam tugas-tugas kerumahtanggaan, belum ada intervensi yang mendorong peran setara antara laki-laki dan perempuan di rumah tangga dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga.

## 5.4.2 Ranah Publik

### Tingkat Komunitas Desa

Di tingkat komunitas desa, peran kecamatan difokuskan pada penguatan program/kelompok yang sudah ada sebelumnya, yakni kelompok SPP, SPPN, Kowane, dan PKK. Pemberdayaan perempuan melalui kelompok-kelompok tersebut dihadapkan dengan tantangan regenerasi kepemimpinan. Sebagaimana umumnya kelompok tani/nelayan dan PKK, kepemimpinan cenderung dikuasai oleh perempuan yang memang memiliki relasi dengan kekuasaan di desa atau kecamatan, misalnya pengurus PKK yang merupakan istri pejabat pemerintah kecamatan.

Pemerintah kecamatan belum mengambil upaya yang memungkinkan kelompok perempuan melakukan intervensi terhadap berbagai hal yang menghambat peran perempuan di komunitas desa. Hal ini berkaitan erat dengan halangan gender atau *gender barriers* di ranah rumah tangga yang sering membuat perempuan belum dapat memaksimalkan perannya di komunitas dalam sektor ekonomi dan pembangunan desa.

### Tingkat Publik yang Lebih Luas

Peran kecamatan dalam ranah publik yang lebih luas dari komunitas desa berfokus pada mendorong koordinasi yang kuat di antara OPD kabupaten. Selain melibatkan OPD terkait pemberdayaan perempuan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), kecamatan juga berupaya melibatkan OPD teknis bidang ekonomi (seperti OPD di bidang KUKM, pemberdayaan masyarakat desa, pariwisata, kelautan, dan perikanan) mengingat partisipasi perempuan di Lokpri dalam sektor-sektor yang menjadi lingkup kerja OPD tersebut.

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pemerintah kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten TTU juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga/asosiasi perempuan, baik dalam skala provinsi maupun nasional, untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan, serta memperkuat jejaring atau *networking* untuk memajukan daerah.

Dalam analisis GESI, sebenarnya sangat penting untuk menghubungkan berbagai potensi partisipasi perempuan yang sudah ada di tingkat desa atau di tingkat kecamatan, seperti SPPN dan Kowane, dalam koordinasi antar-OPD maupun dalam peningkatan kerja sama dengan lembaga/asosiasi perempuan dalam skala provinsi dan nasional. Untuk menghadirkan kepentingan kelompok perempuan di skala desa baik dalam penyusunan kebijakan maupun tata kelola wilayah perbatasan, kelompok-kelompok tersebut dapat diundang berperan serta dalam berbagai pengambilan keputusan, baik yang terkait dengan pemberdayaan perempuan di wilayah perbatasan maupun dengan pengelolaan wilayah perbatasan secara umum. Ini merupakan salah satu strategi feminis untuk menghadirkan kepentingan perempuan di berbagai pengambilan keputusan (Kantola, 2006; Phillips, 2013).

Suatu potensi yang juga seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah kecamatan dalam mendorong peran perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan kebijakan dan tata kelola adalah adanya perempuan di jajaran kepemimpinan beberapa OPD kabupaten. *Pertama*, kecamatan dapat menguji kepemimpinan perempuan di jajaran OPD untuk melakukan pembangunan kebijakan yang setara gender. *Kedua*, kecamatan dapat mempromosikan figur-figur perempuan tersebut sebagai panutan atau *role model* partisipasi perempuan di tingkat desa dan kecamatan.

Ranah Individu dan Keluarga	Ranah Publik	
	Ranah Komunitas Desa	Ranah Kebijakan dan Tata Kelola Perbatasan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah banyak isu potensial yang seharusnya ditanggapi oleh kecamatan untuk melakukan perubahan di ranah paling dasar ini. Dengan adanya upaya kecamatan dalam mengintervensi hambatan gender atau <i>gender barriers</i> di ranah rumah tangga, perempuan dapat optimal berpartisipasi di berbagai pekerjaan dalam ranah publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa organisasi perempuan tingkat desa sudah melakukan upaya pemberdayaan perempuan di sektor terkait. Upaya regenerasi organisasi merupakan isu penting agar organisasi perempuan di desa tidak dibatasi oleh kepemimpinan perempuan elite desa. Kecamatan seharusnya berperan dalam mengubah model kepemimpinan organisasi perempuan di desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk dapat menghadirkan kepentingan perempuan di lokpri, kecamatan dapat berperan tidak hanya dengan mendorong koordinasi antar-OPD terkait, tetapi juga dengan menghadirkan organisasi perempuan desa di setiap forum koordinasi pengambilan kebijakan terkait pengelolaan lokpri.</li> </ul>

# BAB VI

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

### 6.1 Kesimpulan

1. Pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan diperluas dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), di samping pendekatan pertahanan (*security*). Hal ini karena adanya kekhawatiran bahwa kerawanan ekonomi masyarakat akan menimbulkan kerawanan di bidang pertahanan. Diubah pula cara pandang terhadap wilayah negara yang bukan lagi berpandangan ke dalam (*inward looking*) melainkan lebih berpandangan keluar (*outward looking*), sehingga menempatkan Lokpri perbatasan sebagai “beranda depan” wilayah negara;
2. Masalah utama dalam peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan, termasuk Lokpri Perbatasan Negara antara lain ialah masalah keterpencilan (terisolasi), karena kendala infrastruktur wilayah, umumnya belum terhubungnya jalan raya, seperti apa yang terjadi pada kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada kasus kawasan perbatasan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) kendalanya adalah dermaga di Kecamatan Lokpri Tanjung Beringin, sementara di Pulau Berhala, bangunan penahan ombak dan pengerukan muara Sungai Sei Rampah;
3. Pembangunan infrastruktur wilayah tersebut, selain di luar kewenangan daerah, juga membutuhkan anggaran besar, di luar kapasitas anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi. Untuk itu daerah berharap ada dukungan afirmatif dari tingkat nasional, melalui kementerian/lembaga yang sesuai, dalam hal ini terutama Kementerian PUPR;
4. Dalam upaya memperoleh dukungan tersebut, berbagai upaya kreatif atau terobosan telah dilakukan, antara lain:
  - a. Kabupaten Serdang Bedagai menyiapkan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan (Lokpri) Tanjung Beringin dan Pulau Beringin sebagai Kawasan “PATAYA” (Pangan, Pariwisata, Budaya), dengan harapan meningkatkan daya tarik pengembangan kawasan perbatasan di kabupaten ini. Beberapa menteri terkait juga diundang untuk melihat potensi dan prospek pembangunan kawasan perbatasan yang bertema PATAYA tersebut;
  - b. Provinsi NTT mengambil upaya dengan mengirim “surat diskresi” ke Presiden RI, guna memberikan diskresi kepada Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur jalan regional sepanjang perbatasan. Dalam keadaan biasa atau bukan prioritas, sebagian kewenangan pembangunan ada pada provinsi. Akan tetapi, provinsi tidak punya anggaran yang cukup besar; meskipun pembangunan jalan ruas tertentu telah diupayakan melalui fasilitas pinjaman daerah;
  - c. Sejalan dengan itu, upaya melalui prosedur reguler, yaitu melalui proses musrenbang kabupaten, provinsi, sampai nasional, juga tetap dilakukan. BPPD Provinsi melalui jalur koordinasi pengembangan perbatasan juga menyampaikan usulan program/kegiatan pembangunan (infrastruktur) ke BNPB, yang selanjutnya diteruskan ke Bappenas;

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

5. Sementara menunggu proses usulan ke tingkat nasional, daerah tidak tinggal diam dan berupaya mempersiapkan apa yang ada dalam kewenangannya. Pemerintah daerah juga mengembangkan gagasan dalam pengembangan kawasan perbatasan, dengan mengacu pada koridor pengembangan wilayah, baik dari BNPP (Desain Besar Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan), maupun RPJMD dan RTRW, sebagaimana dibahas sebelumnya:
  - a. Kabupaten Sergai telah menyiapkan “Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan termasuk P. Berhala” dengan komponen-komponennya;
  - b. Kabupaten TTU (BPPD bekerjasama dengan Bappeda) juga telah menyiapkan “Profil Kawasan Perbatasan RI – RDTL (Timor-Leste),” untuk memudahkan pihak-pihak yang akan bekerjasama. Pejabat BPPD dan kecamatan juga secara informal mempunyai gagasan ke arah mana dan bagaimana kawasan Lokpri Perbatasan akan dikembangkan;
6. Gagasan atau rencana pengembangan kawasan perbatasan di daerahnya juga telah menjadi tema dalam RPJMD kabupaten dan didefinisikan sebagai kawasan strategis kabupaten. Hal ini telah disosialisasikan dalam proses musrenbang desa, kecamatan, sampai kabupaten;
7. Dari berbagai dialog selama proses FGD di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun kecamatan terasa bahwa fokus perhatian selalu bertumpu pada pembangunan infrastruktur, yang masih harus menunggu. Sementara itu, ada sarana fisik seperti Gedung PLBN dan sarana pendukungnya yang sudah siap, tetapi pemanfaatannya masih terbatas untuk administrasi exit-permit. Fokus perlu diimbangi dengan pemberdayaan kawasan, baik pemberdayaan ekonomi lokal maupun peningkatan cakupan pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kelembagaan pendukung (organisasi, aturan main);
8. Dalam penyiapan rencana, program/kegiatan, telah terjalin kerja sama yang erat dan produktif antara Bappeda, BPPD, kecamatan Lokpri, dan OPD terkait. Hal ini menjadi potensi bagi upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan selanjutnya;
9. Dari hasil diskusi pada serial FGD maupun pengamatan, terasa bahwa pihak pemerintah daerah (kabupaten) sangat menaruh perhatian dalam pengembangan kawasan Lokpri Perbatasan. Untuk itu pihak BPPD maupun BNPP perlu lebih membuka diri dan bekerja sama dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan) mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring (memantau program/kegiatan yang berjalan), dan evaluasi. Begitu pula dalam memecahkan beberapa permasalahan kewenangan pengelolaan aset dan kegiatan yang masih menjadi kewenangan sektor tertentu (misalnya lahan dalam penguasaan Kemen LHK dan aset dermaga di bawah kewenangan Perhubungan Laut).
10. Dalam hal aspek gender, terdapat beberapa kondisi yang berbeda di setiap wilayah ataupun aspek turunan yang menjadi fokus pembahasan:
  - a. Pada awalnya, pemberdayaan dan partisipasi perempuan di Kecamatan Lokpri Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai masih rendah. Namun, sejak masuknya Program PNPM (2004) yang antara lain bertujuan memberdayakan perempuan dengan cara mensyaratkan partisipasi perempuan dalam musyawarah, pemberdayaan dan partisipasi perempuan terus meningkat. Selain itu, pembentukan SPP (simpan pinjam untuk perempuan) dan 30persen alokasi penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk persenkegiatan yang diusulkan oleh perempuan juga membantu peningkatan tersebut.

- b. Peran perempuan di Lokpri Kecamatan Perbatasan, Kabupaten TTU, juga meningkat melalui proses perencanaan dengan partisipasi perempuan, keaktifan dari Lembaga PKK, dan perempuan yang telah berpartisipasi dalam pekerjaan di semua bidang. Selain itu, peran perempuan yang besar juga ditunjukkan oleh berdirinya salah satu yayasan yang dikelola oleh kaum perempuan dengan tujuan memfasilitasi kelompok perajin dan usaha tenun ikat dari Kabupaten TTU.
- c. Jika dilihat spesifik dalam hal aspek rumah tangga, pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus untuk mengurangi permasalahan perkawinan anak dan pelibatan perempuan pada lalu-lintas obat-obatan terlarang di kawasan perbatasan, dengan cara melibatkan perempuan di bidang yang potensial di tiap kecamatan. Namun, pelibatan aktif perempuan tersebut tidak diiringi oleh perhatian khusus kecamatan terkait beban kerja perempuan yang akan lebih berat dari segi waktu dan tenaga karena masih adanya pandangan bahwa perempuan harus melaksanakan tugas-tugas rumah tangga lebih besar dari laki-laki.
- d. Pada aspek ranah publik di komunitas desa, kecamatan telah berfokus pada penguatan program atau kelompok yang telah ada sebelumnya, yang dikelola atau dipimpin oleh kaum perempuan. Namun, tantangan muncul dalam hal regenerasi kepemimpinan yang kesempatannya tidak merata untuk semua perempuan. Selain itu, partisipasi kaum perempuan dalam mengatasi hambatan peran perempuan di komunitas desa masih rendah. Pada tingkat yang lebih tinggi, peran kecamatan adalah mendorong koordinasi yang kuat di antara OPD kabupaten yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan ekonomi. Meski telah didukung oleh kecamatan, hingga saat ini peran perempuan masih belum maksimal, baik dalam hal partisipasi pembangunan kebijakan maupun tata kelola wilayah perbatasan.

## 6.2 Rekomendasi Kebijakan

Untuk merespons potensi dan permasalahan yang ada, seperti yang disampaikan sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan pengembangan wilayah dan penguatan kelembagaan, beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain:

1. Melanjutkan upaya mencari dukungan untuk mengatasi keterpencilan (isolasi) akibat kendala infrastruktur wilayah, umumnya belum terhubungnya jalan raya seperti di kawasan perbatasan di Provinsi NTT. Perlu dilanjutkan juga upaya mengatasi tantangan alam dengan mengusahakan dukungan pembangunan dari K/L di tingkat nasional untuk dermaga, bangunan penahan ombak, dan pengerukan muara sungai, seperti pada kasus kawasan perbatasan di Kabupaten Sergai;
2. Perlu sikap proaktif, sebaiknya tidak terpaku dan menunggu hingga pembangunan infrastruktur regional (jalan raya, dermaga) betul-betul terbangun. Berbagai upaya pengembangan berbasis potensi daerah dan lokal perlu dimulai;
3. Memperkuat Lokpri agar betul-betul dapat menjadi kawasan pertumbuhan, terutama yang memiliki PLBN. Pos tersebut perlu dimanfaatkan sebagai sarana pusat kegiatan pelayanan (ruang pameran atau *showroom*, pasar produk kawasan), sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk itu, pengelolaan PLBN perlu lebih inklusif, membuka diri untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu fungsi utamanya sebagai kantor pelayanan keimigrasian;

## Peningkatan Peran dan Koordinasi Kecamatan Lokpri dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

4. Memperkokoh kerangka pengembangan wilayah dengan mengembangkan relasi antarpusat kegiatan, antara Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan Lokpri dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) atau pusat kegiatan wilayah, ataupun ibu kota kabupaten. Kelancaran hubungan ini penting untuk meningkatkan akses dan memudahkan distribusi pelayanan. Untuk itu, pembangunan sarana dan pengembangan kegiatan yang mengisi pusat-pusat tersebut perlu dipersiapkan dan diprogramkan;
5. Melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat di kawasan, baik kelompok kegiatan ekonomi (kelompok tani, perajin rumahan, pengolah hasil), kelompok perempuan, kelompok seni-budaya (sanggar tari, seni), maupun kelompok sadar wisata agar manfaat kehadiran Lokpri Perbatasan betul-betul dapat dirasakan dan mendorong kesejahteraan masyarakat di kawasan Lokpri, bukan hanya menguntungkan pengusaha dari luar daerah;
6. Melakukan kerja sama dengan desa-desa di kawasan Lokpri perbatasan dan sekitarnya, melalui sosialisasi rencana dan program pembangunan kawasan Lokpri dalam proses musrenbang desa dan kecamatan, agar pemerintah desa dapat juga mempertimbangkan peran dan kontribusi apa yang dapat mereka berikan agar terjadi sinergi atau keterpaduan program/kegiatan. Lembaga BUMDes telah ada di setiap desa sebaiknya juga diajak untuk bersama melakukan pembinaan kegiatan ekonomi warga;
7. Mendorong kerja sama antardesa tetangga dengan memiliki potensi/masalah yang sama atau komplementer, untuk membentuk “kawasan perdesaan” (pasal 83, 84, 85 UU no.6 Th 2014 tentang Desa). Pendekatan kawasan perdesaan ini akan sangat membantu dalam proses pembangunan bersama, secara “keroyokan” antara pelaku pembangunan, dari tingkat pemerintahan desa, Pemkab, Pemprov, K/L, dan mitra pembangunan lainnya;
8. Pada aspek kelembagaan (organisasi, aturan main), perlu dijalin koordinasi lebih intensif antara Bappeda, BPPD, OPD-OPD terkait (seperti pertanian, BPD, kelautan dan perikanan, KUKM, perdagangan, dan industri), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Jika perlu, membentuk kelembagaan ad-hoc seperti Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Kabupaten Sergai), atau Forum Koordinasi Pengelolaan Perbatasan (Prov. NTT);
9. Melakukan penguatan kapasitas (*capacity building*) terutama untuk lembaga yang berperan dalam koordinasi, seperti BPPD dan kecamatan, karena pengembangan wilayah kawasan Lokpri ini membutuhkan penguatan peran mereka, setidaknya:
  - a. BPPD membutuhkan penyesuaian, dari peran keimigrasian dan pertahanan, ditambah peran dalam mendukung dan mengoordinasi kegiatan pengembangan kawasan untuk kesejahteraan (*prosperity*);
  - b. Peningkatan peran kecamatan (sesuai PP 17 th 2018 tentang Kecamatan), sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan, pemantauan capaian SPM di wilayahnya, serta peran khusus untuk kecamatan perbatasan, mengingat Lokpri satuan area administrasinya adalah kecamatan.
10. Mendukung BNPP dalam pengembangan Lokpri, sebagai instrumen percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara, sebagai beranda depan wilayah negara;
11. Mendorong Bappeda (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk lebih afirmatif, memberikan perhatian khusus dalam pengembangan ekonomi dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM), terutama untuk kawasan (Kecamatan/Lokpri) perbatasan negara;

12. Pemerintah kabupaten juga dapat mendorong desa-desa bertetangga (perbatasan) untuk membentuk Kawasan Perdesaan, untuk pembangunan prasarana antar-desa (pembangunan jalan), yang memungkinkan kontribusi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah desa secara bersama-sama.
13. Mengembangkan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kegiatan produksi unggulan kawasan dan keterampilan yang terkait, untuk menyiapkan SDM generasi muda setempat, agar dapat berperan aktif dan ikut menikmati hasil pembangunan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan Lokpri dan sekitarnya.
14. Pada aspek gender, terdapat beberapa rekomendasi sesuai dengan aspek turunannya:
  - a. Pada aspek rumah tangga, pihak Kecamatan masih belum memberikan intervensi ataupun sosialisasi yang cukup mengenai penyamaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam hal tugas-tugas rumah tangga, sementara Kecamatan telah mendorong perempuan ikut aktif terlibat dalam pekerjaan di berbagai bidang potensial. Tanpa intervensi tersebut, partisipasi perempuan di pekerjaan-pekerjaan publik tidak akan berjalan dengan maksimal.
  - b. Pada aspek komunitas desa, Kecamatan diharapkan dapat berperan aktif ataupun memberikan kebijakan khusus pada sistem regenerasi kepengurusan organisasi perempuan di desa agar semua perempuan memiliki peluang/kesempatan yang sama untuk memimpin, tidak hanya tertuju pada perempuan elite desa.
  - c. Pada aspek kebijakan dan tata kelola perbatasan, Kecamatan dapat berperan lebih aktif untuk mengundang, mengajak, ataupun memastikan kehadiran organisasi perempuan di tingkat desa saat kegiatan koordinasi pengambilan kebijakan pengelolaan Lokpri, dan tidak hanya mendorong koordinasi dengan OPD Kabupaten.





# DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. 2016. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara pada dalam Workshop Nasional “Kupas Tuntas Kebijakan Asimetris di Perbatasan Negara, di Bappenas,” (paparan Dir. Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Bappenas, pada 10 Agustus 2016).
- BNPP. 2011. *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011, dan LAMPIRAN. Jakarta.
- BNPP. 2015. *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019*,. (Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015, dan LAMPIRAN). Jakarta.
- Carrard, N., Crawford, J., Halcrow, G., Rowland, C. & Willtes, J. (2013). A Framework for Exploring Gender Equality Outcomes from WASH Programmes. *Waterlines*, 32(4), 315-333.
- Hadjisarosa, Dr. Poernomosidhi. 1980. *Konsep Pengembangan Wilayah*. Jakarta: LIPI.
- IntegrityAction.org, 2016. *Integrity Action Gender Equality and Social Inclusion Strategy (GESI) Version 2 (2016-2021)*. (Diakses melalui <https://www.integrityaction.org/media/4702/integrity-action-gesi-strategy-version-2.pdf>)
- Kantola, J. (2006). *Feminist Theorize the State*. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Mahi, Dr. Ali Kabul. 2016. *Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Phillips, A. (2013). *Engendering Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Porter, Michael E. 1998. *Clusters and the New Economics of Competition*. Boston: Harvard Business School Press.
- Porter, Michael E. 2000. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
- Rintuh, Dr. Cornelis. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE FEB-UGM
- Simbolon, Robert. BNPP. 2014. *Rancangan Pengembangan 26 PKSN, Pusat Pertumbuhan Lokpri Perbatasan Tahun 2015-2019*. Disampaikan dalam FGD Penyusunan Rancangan Teknokratik Pembangunan Kawasan Perbatasan Periode 2015-2019. Tanggal 5-7 Februari 2014, di Bandung.
- Tambunan, Tulus T.H. 2016. *Pembangunan Ekonomi Inklusif: Sudah Sejauh Mana Indonesia?* Jakarta: LP3ES.

